



**PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ) TAHUN 2021



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j)**

**UNIT KERJA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

Jalan. A. Syairani Pelaihari Telp. (0512) 21274

RINGKASAN EKSEKUTIF

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia- Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan sebuah laporan yang memuat penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategik (Renstra).

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Pelaihari, Januari 2022

Kepala BPKAD
Kabupaten Tanah Laut,



Muhamad Darmin, S.IP, M.Si
NIP.196612271987031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	3
C. Isu Strategis.....	9
D. Produk dan Layanan	10
E. Sistematika Penyajian.....	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	17
A. Visi RPJMD.....	17
B. Misi RPJMD.....	18
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	18
D. Indikator Kinerja Utama.....	42
E. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021.....	43
F. Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	59
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	65
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	66
1. SasaranRPJMD.....	70
2. Analisa Capaian Sasaran Strategis SKPD.....	72
3. Eselon II (Kepala Badan).....	73
2.1.1. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 1.....	74
2.1.2. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 2.....	79
4. Eselon III.B (Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan)	81
2.1.3. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 3.....	81
4.1). Eselon IV.A (Kasubbid Anggaran).....	83

2.1.4. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 4.....	103
4.2). Eselon IV.A (Kasubbid Perbendaharaan & Verifikasi).....	104
4.3) Eselon IV.A (Kasubbid Pembiayaan).....	115
5. Eselon III.B (Kepala Bidang Akuntansi).....	124
2.1.5. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 5.....	124
5.1). Eselon IV.A (Kasubbid Pengelolaan Kas).....	125
5.2). Eselon IV.A (Kasubbid Akuntansi Pendapatan & Piutang)..	140
5.3). Eselon IV.A (Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban).....	169
6. Eselon III.B (Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian).....	193
2.1.6. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 6.....	193
6.1). Eselon IV.A (Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan)..	195
2.1.7. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 7.....	214
6.2). Eselon IV.A (Kasubbid Perencanaan Kebutuhan).....	215
2.1.8. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 8.....	224
6.3). Eselon IV.A (Kasubbid Pemanfaatan dan Penggunaan)...	225
7. Eselon III.B (Kepala Bidang Penatausahaan Aset)	242
2.1.9. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 9.....	242
7.1). Eselon IV.A (Kasubbid Inventarisasi).....	243
2.1.10. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 10.....	253
7.2). Eselon IV.A (Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan).....	254
8. Eselon III.A (Sekretaris).....	274
2.1.11. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 11.....	274
2.1.12. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 12.....	275
8.1). Eselon IV.A (Kasubbag Umum dan Kepegawaian).....	276

2.1.13. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 13.....	286
8.2). Eselon IV.A (Kasubbag Perencanaan).....	287
2.1.14. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 14.....	297
8.3). Eselon IV.A (Kasubbag Keuangan).....	298
2.1.15. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 15.....	303
8.2). Eselon IV.A (Kasubbag Perencanaan).....	304
B. Akuntabilitas Keuangan.....	305
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021.....	306
2. Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD BPKAD tahun 2021 Berdasarkan Sasaran, Program dan Sub Kegiatan.....	309
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021.....	333
BAB IV PENUTUP	358
A. Kesimpulan.....	358
B. Strategi Peningkatan Kinerja	375

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Hasil Reviu	
Lampiran 2 Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 bertanda tangan	
Lampiran 3 Cascading (Pohon Kinerja)	
Lampiran 4 Matrik Keselarasan Tahun 2021	
Lampiran 5 Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2021	
Lampiran 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2021	
Lampiran 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017-2021	
Lampiran 8 IKU 2019	
Lampiran 9 SOP LAKIP	
Lampiran 10 SK Tim Penyusun LAKIP SKPD Tahun 2021	
Lampiran 11 Rencana Aksi Per Triwulan Tahun 2021	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut salah satu perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, BPKAD Kabupaten Tanah Laut berwenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) kepada Bupati atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang dialokasikan dan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pelaksanaannya juga telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai

dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2021, disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 serta dalam mencapai misi tujuan organisasi. Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 antara lain didasarkan atas :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 55 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) hal-hal yang dimuat tentunya meliputi Penilaian kinerja yang menyangkut baik segi-segi kuantitas dan kualitas dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, motivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian budget, mendorong SKPD agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan menuntun perbaikan dalam memberikan pelayanan publik. Dari pemahaman seperti itu dapat dirinci dalam butir-butir penting untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah antara lain yaitu :

- Seberapa jauh efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Seberapa jauh kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain apakah terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Seberapa banyak (kuantitas) dan bagaimana mutu (kualitas) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.
- Bagaimana dengan ketepatan lokasi serta waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan.

B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Dasar hukum pembentukan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi di atas, sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 5 ayat (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya pada ayat (3) kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD.
2. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Atas dasar ketentuan itu, maka BPKAD selain menjalankan tugas-tugas dan fungsinya selaku SKPD, juga melaksanakan tugas dan fungsi selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun tugas Kepala SKPKD selaku PPKD sesuai Pasal 7 Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan fungsi BUD.

4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SOPD.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Menetapkan SPD.
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
9. Menyajikan informasi keuangan daerah.
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 8 Permendagri no. 13 Tahun 2006, Kuasa BUD mempunyai tugas :

1. Menyiapkan anggaran kas.
2. Menyiapkan SPD.
3. Menerbitkan SP2D.
4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
5. Memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.

6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
7. Menyimpan uang daerah.
8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah.
9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
12. Melakukan penagihan piutang daerah.

Selanjutnya sesuai Pasal 9 Permendagri No.13 Tahun 2006, PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas :

1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
3. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah.
4. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
5. Menyajikan informasi keuangan daerah.
6. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Anggaran;
- 2) Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
- 3) Sub Bidang Pembiayaan.

d. Bidang Akuntansi, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang;
- 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban; dan
- 3) Sub Bidang Akuntansi Pengelolaan Kas.

e. Bidang Penatausahaan Aset, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Inventarisasi;
- 2) Sub Bidang Pemindah tanganan Pemusnahan dan Penghapusan.

f. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan;
- 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan; dan
- 3) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan.

g. UPT; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut terdapat tingkat eselonering sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Eselon II B
- b. Sekretaris Eselon III A
- c. Kepala Bidang (ada 4 Bidang) Eselon III B
- d. Para Kepala Sub Bagian (di bawah Sekretaris ada 3) Eselon IVA
- e. Para Kepala Sub Bidang(di bawah Kepala Bidang ada 11) Eselon IVA.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, BPKAD Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2021 memiliki PNS berjumlah 44 orang yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan struktural dan staf yang terdiri dari:

a) Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari :

- S-2 : 2 orang
- S-1 : 21 orang
- D-III : 15 orang
- D- II : 0 orang
- SLTA : 6 orang
- SLTP : 0 orang
- SD : 0 orang

b) Berdasarkan Golongan, terdiri dari :

- IV/c : 1 orang
- IV/b : 1 orang
- IV/a : 3 orang
- III/d : 4 orang
- III/c : 3 orang
- III/b : 14 orang
- III/a : 5 orang
- II/d : 9 orang
- II/c : 4 orang
- II/b : 0 orang
- II/a : 0 orang
- I/d : 0 orang

c) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf, terdiri dari :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 5 orang
- Eselon IV : 14 orang

- Staf : 21 orang
- Staf Fungsional : 3 orang

C. ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal (SWOT) dapat ditetapkan dan dirumuskan yang menjadi isu-isu strategis pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2018-2023 adalah sebagai berikut :

a). Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlah vital, dimulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin, karena apabila salah pada tahap penganggaran, sudah tentu akan semakin bertambah salah pada waktu pelaksanaan belanja, sehingga akan menyulitkan pada waktu penatausahaan dan akan diragukan akuntabilitasnya saat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

b). Kelengkapan penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan isu-isu yang tidak bisa dikesampingkan, karena begitu penting dan sangat menentukan, tidak saja bagi kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga bagi nasib rakyat Tanah Laut. Proses penganggaran yang baik, kesesuaian pelaksanaan belanja, penatausahaan keuangan yang tertib, dan pertanggungjawaban keuangan yang

akuntabel, bukan merupakan hasil akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, karena apabila kelengkapan dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak kekurangannya, maka penilaian atau opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI menjadi kurang/minus pula. Dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tentunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disampaikan setiap tahun mengharapkan mendapat opini yang terbaik, karena hal ini sebagai bentuk cerminan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

c). Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Aspek lain yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD adalah berkaitan dengan peningkatan pengelolaan aset daerah. Disadari bahwa untuk pengelolaan aset daerah dahulu-dahulunya terpinggirkan, namun sekarang ini menjadi hal yang sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena bagaimana mungkin sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disusun dan disajikan dengan benar dan dapat diyakini kewajarannya kalau pengelolaan aset daerah yang disajikan tidak tertib dan meragukan. Oleh karena itu penataan aset daerah menjadi salah satu prioritas untuk segera dituntaskan dan terus dilakukan bagi tersajinya suatu Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

D. PRODUK DAN LAYANAN

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun terakhir cukup berhasil, tetapi bukan berarti sempurna, tentunya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi, sehubungan dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut selain tugas dan fungsi selaku SKPD juga sebagai SKPKD (PPKD) dan BUD. Tidak mudah memang untuk mencapai apa-apa yang telah ditetapkan, karena

dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renja SKPD yang juga adalah merupakan implementasi dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD. maka BPKAD Kabupaten Tanah Laut diharapkan mewujudkan Tujuan dan Sasaran SKPD yang telah ditetapkan tersebut seperti yang akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

Sedangkan kondisi sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung produk dan pelayanan pada BPKAD untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah SDM aparatur dengan sarana dan prasarana lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.

Adapun sumber daya yang ada pada BPKAD Kab. Tanah Laut adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

**Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021**

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	buah
2	Kendaraan Roda 4	0	buah
3	Kendaraan Roda 2	20	buah
4	AC Split	31	buah
5	Alat Pendingin Lainnya (AC Standing)	2	buah
6	Alat Dapur Lainnya (Water Boiler)	2	buah
7	Alat Penghancur Kertas	1	buah
8	Bangku Tunggu	7	buah
9	Brand Kas	4	buah
10	Camera Electronic	1	buah
11	CCTV	18	buah
12	Digital multi Tester	1	buah
13	Dongkrak Hidrolik	1	buah

14	DVD-Rom Drive	2	buah
15	Filling Besi/Metal	28	buah
16	Genset	2	buah
17	Gordyn	6	buah
18	GPS	2	buah
19	Handycam	2	buah
20	Hard Disk	2	buah
21	Harddisk External	12	buah
22	Hub	2	buah
23	Karpet	8	buah
24	Kipas Angin	5	buah
25	Kursi Besi/Metal	41	buah
26	Kursi Biasa	1	buah
27	Kursi Putar	19	buah
28	Kursi Rapat	82	buah
29	Kursi Tamu	2	buah
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	buah
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	buah
32	Kursi Pejabat Lainnya	3	buah
33	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	15	buah
34	Laptop	30	buah
35	Lemari Besi	14	buah
36	Lemari kayu	11	buah
37	Lemari Kaca	1	buah
38	Meja Besi	1	buah
39	Meja Kayu	71	buah
40	Meja Komputer	2	buah
41	Meja Rapat	17	buah
42	Mesin Jilid	2	buah
43	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	buah
44	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2	buah
45	Mesin Pompa Air	1	buah
46	Mesin Gerinda	1	buah
47	Penyemprot Otomatis	1	buah
48	Mesin Potong Rumput	1	buah

49	Meteran Laser	1	buah
50	Portable Compressor	1	buah
51	Tool Kit Set	1	buah
52	Mesin Bor Tangan	1	buah
53	Loudspeaker	1	buah
54	Microphone/Wireless Mic	2	buah
55	Monitor	1	buah
56	Note Book	6	buah
57	P.C Unit/ Komputer PC	65	buah
58	Peralatan Jaringan Lain-lain	0	buah
59	Printer	89	buah
60	Proyektor + Attachment	3	buah
61	Rak Besi/Metal	85	buah
62	Router	4	buah
63	Scanner	9	buah
64	Server	1	buah
65	Sofa	3	buah
66	Stabilizer/Stavolt	2	buah
67	Switch Hub	2	buah
68	Termometer Standar	1	buah
69	Tangga	1	buah
70	Televisi	2	buah
71	Tong Sampah	2	buah
72	UPS	66	buah
73	White Board	3	buah
74	Wireless Access Point	2	buah
75	Wireless Portable (Sound System)	2	buah
76	Alat Kantor Lainnya (Videowall LED)	1	buah
77	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3	buah
78	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	buah
79	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	buah
80	Bangunan Menara/Tower Air	1	buah
81	Bangunan Nama Instansi/Unit Kerja	1	buah
82	Bangunan Sarana/Prasarana Lainnya	1	buah

83	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2	buah
84	Halaman Gedung	2	buah
85	Instalasi Listrik Gedung Kantor	1	buah
86	Kanopi	1	buah
87	Konstruksi Pagar	1	buah
88	Bangunan Pembuangan Air Kotor Lain-lain	1	buah
89	Jaringan Distribusi Tegangan Di atas 20 KVA	1	buah
90	Jaringan Listrik Lainnya	3	buah
91	Buku Hukum	1	buah
TOTAL		880	buah

Terdapat keterkaitan antara jumlah SDM aparatur dengan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga dapat menunjang dan mendukung dalam rangka pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut khususnya dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 1. Sasaran RPJMD
 - 2. Analisa Capaian Sasaran Strategis SKPD
 - 3. Eselon II (Kepala Dinas/Badan)
 - 4. Eselon III (Kepala Bidang) B

- 1). Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.1
 - 2). Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.2
 5. Eselon III.A (Sekretaris/Kepala Bagian) A
 - 1). Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) A.1
 - 2). Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) A.2
- B.Akuntabilitas Keuangan
1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2021
 2. Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD BPKAD tahun 2021
Berdasarkan Sasaran,Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 3. Perbandingan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

Lampiran1 Pernyataan Hasil Reviu

Lampiran 2 Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 bertanda tangan

Lampiran 3 Cascading (Pohon Kinerja) Tahun 2021

Lampiran 4 Matrik Keselarasan Tahun 2021

Lampiran 5 Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2021

Lampiran 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2021

Lampiran 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017-2021

Lampiran 8 IKU 2019

Lampiran 9 SOP LAKIP

Lampiran 10 SK Tim Penyusun LAKIP SKPD Tahun 2021

Lampiran 11 Rencana Aksi Per Triwulan Tahun 2021

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI RPJMD

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018–2023 dengan memperhitungkan potensi (kekuatan), peluang dan kelemahan serta ancaman (kendala) yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Tanah Laut 2018-2023 yaitu : **Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI”** dimana dari visi itu diartikan sebagai berikut :

- a. **Berkarya;** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. **Inovatif;** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- c. **Tertata;** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- d. **Religius;** Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- e. **Aktual;**
- f. **Sinergis;** Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. MISI RPJMD

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam **5 Misi** sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan mendukung Misi ke- 2 dan Misi ke- 3 Kepala Daerah, dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategi BPKAD Kabupaten Tanah Laut serta cara pencapaian tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini, kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 yaitu bertepatan dengan tahun ke dua tahun Renstra akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2021 pada pembahasan selanjutnya.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dan melihat latar belakang serta mencermati fenomena – fenomena yang berkembang, maka Tujuan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib,
3. Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien.

Pernyataan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Hal ini dapat dipahami mengingat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sudah selayaknya tujuan yang dikemukakan sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan BPKAD Kabupaten Tanah Laut handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui tujuan tersebut diharapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut menjadi motor penggerak bagi SKPD-SKPD lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa Pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan yang telah ditetapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan bagi Kepala Badan beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan lebih lanjut ke dalam sasaran. Oleh karena itu sasaran haruslah terinci dan dapat diukur. Uraian dari tujuan dan sasaran jangka panjang yang akan di capai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang ditetapkan. Konsep dasar strategi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan, jadi merupakan cara atau langkah mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan progam/kegiatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan periode 2018-2023.

Adapun sasaran startegi yang yang telah ditetapkan dan yang akan dicapai BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah
3. Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan
4. Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan

5. Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan
6. Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan
7. Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan
8. Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan
9. Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan
10. Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan
11. Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran
12. Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD
13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD
14. Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD
15. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Setelah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan adalah disusunnya program dan kegiatan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi. Program dan kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan.

Renstra yang disusun oleh SKPD tentulah harus bersinergi dengan RPJMD nya, karena hal ini terkait dengan pencapaian visi, misi yang ada dalam RPJMD. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja oleh SKPD dalam Renstra untuk lima tahun ke depan harus mendukung bagi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Visi Kepala Daerah sebagaimana tersebut diatas agar bisa diwujudkan harus dituangkan dan dirinci ke dalam misi Kepala Daerah yang ditetapkan untuk BPKAD Kabupaten Tanah Laut harus menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai gambaran aktivitas yang akan dilaksanakan. Untuk menggambarkan Visi, Misi, Kepala Daerah dan Tujuan, Sasaran Strategi dan indikator-indikator

beserta target-targetnya pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah																	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT																	
NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN					SASARAN	INDIKATOR SASARAN/NIKU	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Ket
					2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	Persentase ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Kepala Badan
										2. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	BAIK(82)	BAIK(83)	BAIK(84)	BAIK(85)	BAIK(86)	
										3. Meningkatkan kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan
										4. Meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan	Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan anggaran dan pembiayaan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
										5. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	Persentase pelaporan keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Akuntansi
2	-	-	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.	Persentase peningkatan kualitas terbib penatausahaan dan pengelolaan aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	6. Meningkatkan kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	87%	89%	90%	92%	95%	
											Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset
											Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
										7. Meningkatkan kualitas penyusunan RKBM sesuai ketentuan	Persentase RKBM SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
										8. Meningkatkan kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
										9. Meningkatkan kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Penatausahaan Aset
										10. Meningkatkan kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Menciptakan inovasi diselenggarakan kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan dan keuangan yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%	11. Meningkatkan kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%	
										12. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan dipelihara dgn baik	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%	
										13. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretaris
										14. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
										15. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	66	67	68	69	70	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Visi, Misi Kepala Daerah , tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya telah sesuai dengan dokumen Renstra SKPD yang telah ditetapkan, yang menjadi acuan pedoman yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama 5 (lima) tahun atau masa Renstra 2018-2023.

Untuk menggambarkan bahwa penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel matrik keselarasan berikut ini :

**MATRIK KESELARASAN RENSTRA SKPD TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

VISI	: Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI”		
Misi 2	: Menciptakan Inovasi disegala sendi kehidupan Masyarakat dan pengembangan Industri Kreatif		
Misi 3	: Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)		
Tujuan 1	: Meningkatkan kinerja Pengelolaan keuangan secara tertib, akuntabel & transparan	Sasaran 1	: Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Sasaran 2	: Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah
		Sasaran 3	: Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan
		Sasaran 4	: Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kpd stakeholder dlm Penatausahaan keu & pembiayaan daerah
		Sasaran 5	: Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan
Tujuan 2	: Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penatausahaan aset daerah secara tertib	Sasaran 6	: Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan
		Sasaran 7	: Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan
		Sasaran 8	: Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan
		Sasaran 9	: Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan
		Sasaran 10	: Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan & Penghapusan BMD sesuai ketentuan
Tujuan 3	: Terwujudnya tata kelola administrasi yg tertib, efektif dan efisien	Sasaran 11	: Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran
		Sasaran 12	: Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD

Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD

Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD

Sasaran 15 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	ANGGARAN (RP.)	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ya	1.Opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah	Ya	IKU												
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Ya	2.Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Ya	IKU												
3.	Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	Ya	3.Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU	1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	1	Koordinasi dan Penusunan Rencana Anggaran Daerah					

												Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	Ya	16.495.710	Terkait
												Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Ya	14.428.640	Terkait
												Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	Ya	22.236.640	Terkait
												Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	Ya	22.236.640	Terkait
												Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	Ya	6.464.600	Terkait
												Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	Ya	6.464.600	Terkait

											Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perda APBD dan Perkada APBD	Ya	131.036.370	Terkait
											Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perda Perubahan APBD dan Perkada Perubahan APBD	Ya	105.009.500	Terkait
											Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Ya	21.302.600	Terkait
											Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran pembiayaan	Ya	12.462.080	Terkait

4.	Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	Ya	4.Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU					2	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>					
											Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen SPD	Ya	31.654.870	Terkait
											Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya	182.265.230	Terkait
											Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Jenis	Ya	9.999.700	Terkait

											Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya	103.485.010	Terkait
										3	<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>					
											Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Desa yang tersalurkan Bantuan Keuangan	Ya	230.298.251.660	Terkait
											Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya	20.569.890.343	Terkait
5	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	Ya	5.Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU						4	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>				

		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya	131.017.120	Terkait
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya	103.002.740	Terkait
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya	162.639.360	Terkait
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya	257.699.190	Terkait

		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya	165.839.800	Terkait
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya	46.821.590	Terkait
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya	15.108.940	Terkait

												Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah FGD	Ya	56.869.250	Terkait
6	Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	Ya	6.Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU	2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	5	Pengelolaan Barang Milik Daerah					
			7.Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU							Pengamanan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah buku rekonsiliasi pengamanan dan pemeliharaan BMD	Ya	1.155.051.859	Terkait
			8.Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU							Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Buku Hasil Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ya	2.241.836.065	Terkait

7	Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	Ya	9.Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU					Penyusunan Standar Harga	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya	50.533.310	Terkait
										Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya	3.815.197.160	Terkait
										Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya	41.943.640	Terkait
8	Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	Ya	10.Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya	187.141.640	Terkait
9	Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	Ya	11.Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	Ya	BUKAN IKU					Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD	Ya	289.451.490	Terkait
										Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD	Ya	25.724.300	Terkait

											Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD	Ya	44.803.090	Terkait
10	Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	Ya	12.Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU						Penilaian Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Obyek BMD yang dinilai untuk dicatat, dimanfaatkan dan dipindahtangankan	Ya	189.771.140	Terkait
											Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD peserta Pembinaan Pengelolaan BMD	Ya	117.503.950	Terkait
11	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	Ya	13.Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	Ya	BUKAN IKU	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	Baik	Ya	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				

12	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Ya	14.Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	Ya	BUKAN IKU						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Ya	14.269.640	Terkait
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	Ya	1.027.233.314	Terkait
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Ya	59.231.810	Terkait
											Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Ya	1.800.000	Terkait
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Unit Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Ya	965.750.000	Terkait
										7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					

					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah jenis pengadaan	Ya	137.257.890	Terkait
					Pengadaan Mebel	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah jenis pengadaan mebel	Ya	24.895.200	Terkait
				8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	Ya	1.966.800	Terkait
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	Ya	263.665.383	Terkait
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	Ya	1.570.000	Terkait
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	Ya	212.075.924	Terkait
				9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	Ya	10.205.000	Terkait
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	Ya	79.727.880	Terkait
				Pemeliharaan Mebel	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	Ya	10.000.000	Terkait
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	Ya	40.150.000	Terkait
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	Ya	152.200.000	Terkait
			10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah ASN BPKAD	Ya	48.125.000	Terkait

13	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	Ya	15.Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU	

						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Ya	-	Terkait
					11	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja BPKAD	Ya	9.981.060	Terkait
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen RKA SKPD Tahun 2022	Ya	2.553.000	Terkait
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD Tahun 2021	Ya	2.276.200	Terkait
						Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen DPA SKPD Tahun 2022	Ya	6.182.960	Terkait

											Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD Tahun 2021	Ya	5.143.190	Terkait
											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen	Ya	3.569.000	Terkait
14	Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	Ya	16.Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU					12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
											Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah ASN Jumlah orang ASN Se Kabupaten Tanah Laut dan Pejabat Daerah Kabupaten yang dibayarkan BPJS, Orang JKK dan JKM (Orang)	Ya	36.832.015.847	Terkait
											Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi Kantor 75 dokumen BPKAD	Ya	30.683.510	Terkait

											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Laporan akhir Tahun Kantor BPKAD	Ya	2.814.700	Terkait
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan,/Triwulanan/Semesteran Kantor BPKAD	Ya	9.279.950	Terkait
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Ya	17.Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Ya	BUKAN IKU						<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Laporan Kinerja BPKAD	Ya	9.963.600	Terkait
Jumlah total Anggaran															300.718.140.125,00	

Tabel matrik keselarasan dibuat untuk memudahkan bagi BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam menetapkan kinerja serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2021, sehingga terdapat keselarasan antara Renstra SKPD dengan Rencana Kerja Tahunan SKPD atau Perjanjian Kinerja SKPD, sehingga perencanaan dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaras dan berkesinambungan.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

No.	Kinerja Utama/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan asset daerah	Bagian Sekretariat BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut seperti tersaji pada tabel diatas merupakan dasar untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyajikan laporan kinerja pada SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya.

Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategi BPKAD Nomor 1 yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah adalah meliputi pengukuran peningkatan kinerja keuangan dan asset daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut yaitu Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Auditor kegiatannya berupa Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dengan penanggungjawab Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategi BPKAD Nomor 2 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah adalah meliputi pengukuran Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah oleh masyarakat kegiatannya berupa Hasil Survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan penanggungjawab Bagian Sekretariat.

E. PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2021

Perjanjian kinerja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 didasarkan atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dimana berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2021 telah tergambar tolak ukur dan target kinerja yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran.

Kinerja yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran 2021 yang telah tergambar dalam DPA-SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2021 itulah ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja SKPD BPKAD Tahun 2021. Untuk menggambarkan Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan beserta

target-targetnya serta keselarasan dengan Renstra SKPD dan juga sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat disajikan sebagaimana tabel berikut dibawah ini:

**TABEL PERJANJIAN KENERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	SARGIS	IK SARGIS	TARGET	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	NO	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T)
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.Opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP									
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2.Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	(84) BAIK									
3.	Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	3.Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			

									Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	Ya
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Ya
									Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	Ya
									Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	Ya
									Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	Ya
									Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	Ya
									Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perda APBD dan Perkada APBD	Ya

									Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perda Perubahan APBD dan Perkada Perubahan APBD	Ya
									Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Ya
									Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran pembiayaan	Ya
4.	Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	4.Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	100%					2	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>			
									Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen SPD	Ya

									Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya
									Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Jenis	Ya
									Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya
									Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah kali	Ya

									Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya
									Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya
								3	<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>			
									Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Desa yang tersalurkan Bantuan Keuangan	Ya
									Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya
5.	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	5.Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%					4	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>			

									Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya
									Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya
									Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya
									Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya

									Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya
									Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya
									Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya
									Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah FGD	Ya

6.	Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	6.Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	90%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	5	Pengelolaan Barang Milik Daerah			
		7.Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	100%						Pengamanan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah buku rekonsiliasi pengamanan dan pemeliharaan BMD	Ya
		8.Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	100%						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Buku Hasil Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ya
7.	Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	9.Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	100%						Penyusunan Standar Harga	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya
									Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya
									Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya

8.	Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	10.Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	100%						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	Ya
9.	Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	11.Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	100%						Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD	Ya
									Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD	Ya
									Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD	Ya
10.	Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	12.Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%						Penilaian Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Obyek BMD yang dinilai untuk dicatat, dimanfaatkan dan dipindahtangkalan	Ya
									Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD peserta Pembinaan Pengelolaan BMD	Ya

11	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	13.Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	Baik	Ya	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Ya
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	Ya
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Ya
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Ya
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Unit Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Ya
								7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
									Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah jenis pengadaan	Ya

								Pengadaan Mebel	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah jenis pengadaan mebel	Ya
							8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	Ya
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	Ya
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	Ya
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	Ya
							9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	Ya

								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	Ya
								Pemeliharaan Mebel	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	Ya
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	Ya
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	Ya
12	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	14.Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	100%				10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah ASN BPKAD	Ya
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Ya

13	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	15.Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%					11	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja BPKAD	Ya
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen RKA SKPD Tahun 2022	Ya
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD Tahun 2021	Ya
									Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen DPA SKPD Tahun 2022	Ya
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD Tahun 2021	Ya
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen	Ya
14	Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	16.Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%					12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah ASN ,Jumlah orang ASN Se Kabupaten Tanah Laut dan Pejabat Daerah Kabupaten yang dibayarkan BPJS, Orang JKK dan JKM (Orang)	Ya
									Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi Kantor 75 dokumen BPKAD	Ya
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Laporan akhir Tahun Kantor BPKAD	Ya
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan,/Triwulanan/Semesteran Kantor BPKAD	Ya
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	17.Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	68 (BAIK)						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Laporan Kinerja BPKAD	Ya
Jumlah total Anggaran												

Matrik perjanjian kinerja tahun 2021 seperti tergambar diatas telah sesuai dan telah tersaji pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Pejabat Struktural dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada awal tahun sebelum pelaksanaan DPA dan setelah PERDA APBD Tahun 2021 ditetapkan. Sehingga terdapat kesesuaian antara matrik perjanjian kinerja secara keseluruhan dengan dokumen perjanjian kinerja seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dengan disesuaikan dengan target sasaran strategis yang telah disajikan pada dokumen Renstra SKPD.

F. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian/Penetapan kinerja Tahun 2021, melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan dan 67 Sub Kegiatan dengan rincian adalah sebagai berikut :

A. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1). Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 1.1). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - 1.2). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 1.3). Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - 1.4). Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - 1.5). Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - 1.6). Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - 1.7). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

- 1.8). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 1.9). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- 1.10). Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- 2). Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 2.1). Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - 2.2). Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - 2.3). Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - 2.4). Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
 - 2.5). Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - 2.6). Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
 - 2.7). Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3). Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 3.1). Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 3.2). Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

- 3.3). Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - 3.4). Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.5). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - 3.6). Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 - 3.7). Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - 3.8). Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 4). Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 4.1). Sub Kegiatan Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 4.2). Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- B. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 1). Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1.1). Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga
 - 1.2). Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 1.3). Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1.4). Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - 1.5). Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - 1.6). Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah

- 1.7). Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah
- 1.8). Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 1.9). Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 1.10). Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 1.11). Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1). Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.4). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD
 - 1.5). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD
 - 1.6). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.7). Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1). Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2). Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 2.3). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.4). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 3.1). Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 3.2). Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 4.1). Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2). Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.4). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.5). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1). Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 5.2). Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- 6). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.2). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.3). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 6.4). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 7.2). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 7.3). Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
- 7.4). Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7.5). Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2021 BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) tahun 2021 ini merupakan laporan kinerja tahun ketiga RPJMD 2018-2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Instruksi Presiden RI No.7 Th 1999 tentang AKIP). Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa Pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara akuntabel, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

Untuk menggambarkan kinerja sasaran strategis target dan realisasinya di lingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dari Eselon II sampai dengan Eselon IV selama kurun waktu 4 (empat) tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL PERBANDINGAN SASARAN STRATEGIS SESUAI RENSTRA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2018, 2019, 2020 DAN TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN 2018	REALISASI TUJUAN 2018	TARGET TUJUAN 2019	REALISASI TUJUAN 2019	TARGET TUJUAN 2020	REALISASI TUJUAN 2020	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1	Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	1. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akurat, dan transparan.	Persentase ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Opiri BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100%									
											2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	2. Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai Indek	82	87	106,10%	82	90	109,76%	83	93	112,05%	84	94,16	112,10%
											3. Meningkatkan kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	3. Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
											4. Meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Perantaraan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	4. Persentase stakeholder yang jilayri penatuaahan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
											5. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	5. Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
			Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatuaahan aset Daerah secara tertib.	Persentase peningkatan kualitas tertib penatuaahan dan pengelolaan aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6. Meningkatkan kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	6. Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	%	100	100	100%	87	100	114,95%	89	30	33,70%	90	140	155,55%
											7. Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	7. Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	0%	100	0	0%
											8. Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	8. Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	150	150%	100	120	120%
											7. Meningkatkan kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	9. Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
											8. Meningkatkan kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	10. Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
											9. Meningkatkan kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	11. Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
											10. Meningkatkan kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	12. Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	108,80	108,80%	100	2700	2700%	100	850	850%
		2. Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan dan keuangan yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11. Meningkatkan kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	13. Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
											12. Meningkatkan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	14. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
											13. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	15. Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
											14. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	16. Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
											15. Meningkatkan akurabilitas kinerja instansi pemerintah	17. Nilai akurabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	64,15	64,74	100,92%	66	74,98	113,81%	67	88,43	131,99%	68	88,91	130,75%

**TABEL PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 ,2019, 2020 DAN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN %	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN %	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN %	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN %	
1	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100%										
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2. Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai Indeks	82	87	106,10%	82	90	109,76%	83	93	112,05%	84	94,16	112,10%	
		3. Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	3. Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
		4. Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	4. Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
		5. Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	5. Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
2	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.	6. Meningkatkan kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	6. Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	%	100	100	100%	87	100	114,95%	89	30	33,70%	90	140	155,55%	
			7. Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	0	0%	100	0	0%	
			8. Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	150	150%	100	120	120%	
			7. Meningkatkan kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	9. Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
			8. Meningkatkan kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	10. Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
			9. Meningkatkan kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	11. Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
3	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	11. Meningkatkan kualitas penerapan sarpras perkantoran	13. Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
		12. Meningkatkan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	14. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
		13. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	15. Persentase Perencanaan dan Kinerja yang disusun dengan baik sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
		14. Meningkatkan kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	16. Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
		15. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	17. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	64,15	64,74	100,92%	66	74,98	113,61%	67	88,43	131,99%	68	88,91	130,75%	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 15 Sasaran Strategis dan 17 indikator sasaran yang telah ditargetkan selama kurun waktu 4 (empat) tahun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, rata-rata telah tercapai seluruhnya 100% dan terdapat 4 indikator sasaran yang realisasinya melebihi target, namun pada tahun 2021 terdapat 1 indikator yang tidak ada realisasinya dan terdapat 1 indikator yang realisasinya melampaui dari target namun ada penurunan dari tahun sebelumnya.

Selain itu juga disajikan rincian 15 sasaran strategis dan 17 Indikator sasaran sesuai target dan realisasi pencapaian per sasaran strategis serta perbandingan tersebut dapat dilihat baik peningkatan maupun penurunan dalam realisasi pencapaian per sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Untuk menggambarkan analisa pencapaian per sasaran strategis pada tabel yang disajikan diatas dapat diuraikan pada sub bab berikutnya, agar dapat memberikan informasi pencapaian selama 1 (satu) tahun dan bagaimana trend yang terjadi pada setiap tahun selama Tahun Renstra 2018-2023.

1. SASARAN RPJMD

Mencermati Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut, jika dihubungkan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan yaitu : 1). Misi yang ke 2 (dua) yaitu Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif , misi ke 2 ini pada BPKAD dimaksudkan dalam rangka mendukung kegiatan Pameran Pembangunan yang dilaksanakan setiap memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut. Namun Misi ke 2 ini tidak menjadi indikator sasaran pada RPJMD hanya dicantumkan pada Pohon Kinerja BPKAD dan yang melaksanakannya adalah Bagian Sekretariat. 2). Misi ke 3 (tiga) yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dan uraian tentang Visi Tertata : Pelaksanaan pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemegang mandat tertinggi yaitu masyarakat. Termasuk didalamnya adalah penilaian terhadap tata kelola keuangan yang harus tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP), dan Misi ke 3 Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yang harus dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Untuk menggambarkan keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra SKPD selama kurun waktu 5 (lima) Tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Sasaran RPJMD Misi 3 Kabupaten Tanah Laut yang menjadi tanggungjawab Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut

No	SASARAN RPJMD (IKU BUPATI)	INDIKATOR SASARAN	Satuan	RPJMD					RENCANA STRATEGIS											KETERANGAN (CATATAN)
				TARGET					TARGET					REALISASI						
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	33	
MISI 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)																				
Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi																				
I		Indeks Reformasi Birokrasi		6,0	6,1	6,2	6,3	6,4		6,1										
1.	Sasaran 1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori) Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)		B (68,00)	BB (71)	BB (74)	BB (77)	A (81)		BB (71)										
				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			WTP	WTP	WTP			
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD		100%	90%	85%	80%	80%	100	90%					100					
	Program Peminanaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Pemerintahan	LPPD (skor)		3,000 (sangat tinggi)	3,025 (sangat tinggi)	3,05(sangat tinggi)	3,075(sangat tinggi)	3,1 (sangat tinggi)	3,06	3,025 (sangat tinggi)										
	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			WTP	WTP	WTP			

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran RPJMD sesuai target yang telah ditentukan selama kurun waktu 5 (lima tahun) yaitu Misi Ke 3 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi dengan Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator sasaran RPJMD yaitu Opini Pengawasan Eksternal (BPK) terhadap kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan hasil sebagai berikut untuk tahun ke 1 yaitu tahun 2019 telah tercapai 100%, pada tahun ke 2 yaitu tahun 2020 juga telah tercapai 100% kemudian pada tahun ke 3 yaitu tahun 2021 juga telah tercapai 100% yaitu selama kurun waktu RPJMD tahun ke 1, tahun ke 2 dan tahun ke 3 RPJMD telah mencapai targetnya yaitu mempertahankan Opini WTP. Sedangkan Misi yang ke 2 yaitu Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif, pada BPKAD dimaksudkan dalam rangka mendukung kegiatan Pameran Pembangunan yang dilaksanakan setiap memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut, namun pada Tahun 2021 kegiatan pameran Pembangunan ditiadakan akibat masih adanya Pandemi Covid 19 yang belum berakhir, sehingga tidak dapat dilaksanakan.

2. ANALISA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS SKPD

Untuk menggambarkan tabel realisasi capaian sasaran strategis beserta analisa capaiannya yaitu berjumlah 15 Sasaran Strategis dengan 17 indikator sasaran dapat dijelaskan per indikator sasaran strategis dengan target dan realisasinya serta dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam pembahasan ini akan dibandingkan selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 2018, 2019,2020 dan 2021 sehingga tergambar capaian kinerja per sasaran serta penanggungjawabnya secara terinci dengan penjelasan berikut ini.

3. ESELON II (KEPALA BADAN)

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2021 yang telah ditetapkan adalah juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPKAD 2021

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2020		PENJELASAN RUMUS	PENANGGUNGJAWAB / SUMBER DATA
			SATUAN	TARGET		
1	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Indeks	Baik (84)	Hasil survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Bagian Sekretariat BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Target indikator IKU pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut disajikan disesuaikan dengan target indikator yang telah disajikan pada dokumen Renstra SKPD, dan pada Pohon Kinerja dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dan target ini telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan dilaksanakan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai Pimpinan SKPD. Sebagaimana telah disajikan pada tabel sebelumnya bahwa IKU SKPD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sasaran Strategis SKPD dan Kepala Badan mengemban Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2 SKPD yaitu

LKj BPKAD TAHUN 2021

merupakan target perjanjian kinerja Kepala Badan, maka selanjutnya dapat dilihat realisasi yang telah dicapai dari tahun 2018 sampai dengan pada tahun 2021 dengan penjelasan yang lebih rinci. Kepala Badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh SDM yang cukup berkualitas di bidangnya masing-masing walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari seluruh aparatur dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yaitu sebanyak 43 PNS yang terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Eselon III, 14 (empat belas) orang Pejabat Eselon IV dan 24 (dua puluh empat) orang staf serta dibantu staf PTT sebanyak 19 (Sembilan belas) orang yang siap membantu dan melayani tugas dan fungsi yang dibutuhkan Organisasi.

2.1.1. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 1

Sasaran Strategis nomor 1 adalah menjadi tanggungjawab Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Eselon II sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis nomor 1 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian tergambar pada tabel sebagai berikut :

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1																
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																
No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
			rata-rata capaian kinerja				100,00			100,00			100,00			100,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator sasaran Opini BPK RI Atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100%, pada tahun 2020 sebesar 100%, pada tahun 2019 juga mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2018 juga mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 100%.

Dalam rangka untuk mendukung indikator sasaran nomor 1 sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang juga merupakan IKU BPKAD nomor 1 ini dilaksanakan seluruh Kepala Bidang (Kepala Bidang Belanja & Pembiayaan, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset dan Kepala Bidang Penatausahaan Aset) beserta seluruh Kasubbid dibawahnya dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Untuk menggambarkan bahwa penyelarasan berkaitan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, baik target IKU SKPD dan target IKU Kabupaten serta capaian IKU SKPD maupun IKU Kabupaten dapat dijelaskan dibawah ini.

Bahwa Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan target WTP dan telah terealisasi dengan capaian WTP dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP oleh BPK RI atas LKPD tahun 2013 untuk yang pertama kali dengan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) mengungkapkan sebanyak 14 temuan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 7 temuan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 Laporan Keuangan SKPD Akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual), sehingga masih berbasis Cash menuju akrual yang belum sepenuhnya berbasis Akrual.
- Kemudian pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2014 untuk yang kedua kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan mengungkapkan sebanyak 4 temuan dengan bukti surat Nomor 8B/LHP/XIX.BJM/05/2015 tanggal 25 Mei 2015

- Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD tahun 2015 untuk yang ketiga kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 9 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 3 temuan, dengan bukti surat Nomor 07.A/LHP/XIX.BJM/05/2016 dan Nomor 07.B/LHP/XIX.BJM/05/2016 serta Nomor 07.C/LHP/XIX.BJM/05/2016 tanggal 27 Mei 2016
- Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini dari BPK RI atas LKPD tahun 2016 untuk yang keempat kalinya dengan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 7 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4 temuan, dengan bukti surat Nomor 12.A/LHP/XIX.BJM/05/2017 dan Nomor 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017.
- Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 untuk yang kelima kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 3 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor : 11.B/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei 2018. sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
- Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 untuk yang keenam kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 8 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor : 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2018 dan Nomor : 12.C/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
- Sedangkan pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 untuk yang ketujuh kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 10 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 6 temuan, bukti surat Nomor :

7.B/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan bukti surat Nomor : 7.C/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

- Sedangkan pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 untuk yang kedelapan kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 26 temuan, bukti surat Nomor : 12.A/LHP/IX.BJM/05/2021 tanggal 27 Mei 2021, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023, bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel pada tahun 2021 telah berhasil dilaksanakan 100%.

Untuk mencapai target tersebut tercapai dikarenakan adanya :

1. Komitmen Aparatur dan Pemangku Kepentingan
 - a. Penguatan Komitmen Bebas Temuan dan Rekomendasi Pemeriksa pada Tahun 2015 dengan penandatanganan pakta integritas
 - b. Peningkatan Intensitas Koordinasi Internal dan Eksternal
2. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
 - a. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur Pemda
 - b. Sistem Reward and Punishment
 - c. Penataan Organisasi dan Kelembagaan
3. Sistem Informasi Keuangan Daerah
 - a. SIMDA-Keuangan
 - b. SIMDA-BMD
 - c. SIMDA Pendapatan
4. Kelengkapan Regulasi Daerah
5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Melalui upaya-upaya tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut optimis bisa mempertahankan Opini WTP selama semua dilakukan secara konsisten dan

berkelanjutan. Untuk kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut akan menuangkan action plan mempertahankan Opini WTP dalam sebuah Peraturan Bupati Tanah Laut dan mencanangkan slogan “Sekali WTP tetap WTP atau Forever WTP”. Progres Action Plan / Rencana Aksi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Daerah telah mensosialisasikan tentang adanya regulasi terbaru berkaitan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada setiap pelaksanaan coffee morning untuk seluruh pimpinan SKPD.
3. Melakukan rapat koordinasi/penyamaan persepsi dengan Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pengurus barang untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
4. Dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan aset, Pemerintah Daerah (BPKAD) telah mengadakan pembinaan terhadap entitas akuntansi, sosialisasi regulasi, melaksanakan rekonsiliasi dan monitoring, melaksanakan FGD untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada Pemerintah Daerah.
5. Dalam menyamakan persepsi tentang pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi serta BPK dan BPKP.
6. Bupati Tanah Laut telah menetapkan revisi Kebijakan Akuntansi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 125 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
7. Pemerintah Daerah sudah menggunakan SIMDA versi 2.7.14 yang mengakomodir full basis akrual.
8. Pemerintah Daerah sudah membuat jaringan online berbasis website dengan menggunakan SIM-Cloude, sehingga SIMDA Keuangan telah terintegrasi antara SKPD dengan SKPKD
9. Pemerintah Daerah akan melakukan penyesuaian kode rekening secara bertahap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
10. Pemerintah Daerah akan memberikan penghargaan setiap tahunnya bagi SPKD terbaik, Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan

Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Para Pimpinan SKPD belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
2. Kurangnya koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
3. Kurangnya tenaga Akuntansi pada setiap SKPD terutama di SKPKD.
4. Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.
5. Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset belum sepenuhnya memahami tentang Akuntansi Berbasis Akrua dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
6. Sering terjadi mutasi tenaga teknis pengelola keuangan dan aset, sehingga harus ada pembenahan ulang bagi SKPD terkait.
7. Belum terintegrasi antara Simda Keuangan dengan SIMDA BMD.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan setiap adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaru untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada pelaksanaan coffe morning.
2. Melakukan rapat-rapat koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
3. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan BKD dalam pemerataan tenaga IT.
4. Melakukan Pembinaan entitas akuntansi,melaksanakan rekonsiliasi,monitoring, sosialisasi regulasi, FGD tentang pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas

5. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap tenaga ahli/tenaga teknis pengelola keuangan dan Aset dalam hal mutasi unit kerja.
6. Memberikan penghargaan bagi Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset

Dalam rangka untuk mendukung indikator sasaran nomor 1 ini yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab 4 (empat) Kepala Bidang dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yaitu Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan, Kepala Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Kepala Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut dan dapat dijelaskan melalui Sasaran Strategis masing-masing jabatan struktural Eselon III dan IV pada pembahasan selanjutnya.

2.1.2. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 2

Sasaran Strategis nomor 2 adalah menjadi tanggungjawab Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Eselon II sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis nomor 2 ini adalah merupakan Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian tergambar pada tabel yang selanjutnya dapat dilihat realisasi yang telah dicapai dari tahun 2018 sampai dengan pada tahun 2021 sebagai berikut :

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2																
Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah																
No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai	82	87	106,1	82	90	109,76	83	93	112,05%	84	94,16	112,10%
			Rata-rata capaian kinerja				106,10			109,76			112,05%			112,10%

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama BPKAD nomor 2 ini maka sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 selama 8 (delapan) tahun dilaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKPD khususnya terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah terhadap 4 bidang pelayanan yaitu pelayanan satu pintu di Sekretariat, pelayanan bantuan keuangan lainnya, pelayanan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pada bidang Akuntansi. Jumlah responden sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dari Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survei kepada masyarakat yang menjadi konsumen dari 4 bidang pelayanan tersebut, dengan jumlah responden adalah 150 (seratus lima puluh) orang. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dalam periode minggu terakhir bulan April sampai dengan minggu keempat bulan Juni. Dari hasil survey tersebut didapat nilai indeks dengan hasil 87 dari target 82 pada tahun 2018 atau capaian 106,10%, kemudian pada tahun 2019 didapat nilai indeks dengan hasil 90 dari target 82 atau capaian sebesar 109,76%, sedangkan pada tahun 2020 didapat nilai indeks dengan hasil 93 dari target 83 atau capaian sebesar 112,05%, sedangkan pada tahun 2021 didapat nilai indeks dengan hasil 94,16 dari target 84 atau capaian sebesar 112,10%, sehingga dengan demikian terdapat peningkatan trend kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pencapaian nilai hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah

dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut berada dalam mutu pelayanan SANGAT BAIK, sehingga dengan demikian realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. atau terdapat peningkatan sebesar 0,05 % dari tahun 2020 Dengan demikian bahwa dengan adanya hasil survey kepuasan masyarakat yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut berada dalam mutu pelayanan Sangat Baik.

Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1). Kurangnya pengetahuan responden dalam mengisi kuisisioner
- 2). Keterbatasan SDM yang khusus untuk mendistribusikan dan mengumpulkan kuisisioner

Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi sebagai berikut :

- 1).Melakukan pendampingan kepada responden
- 2).Menunjuk SDM khusus yang mendistribusikan dan mengumpulkan kuisisioner

Dalam rangka untuk mendukung indikator sasaran nomor 2 ini dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Untuk menggambarkan masing-masing tanggungjawab dari pengemban sasaran 1 dan pengemban sasaran 2 Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

3. ESELON III.B (Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan)

2.1.3 Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 3

Sasaran Strategis nomor 3 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis nomor 3 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3	Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	3	Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja							100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan adalah perjanjian kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan dengan realisasi capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung indikator sasaran nomor 3 ini dilaksanakan oleh Kasubbid Anggaran dengan pencapaian Program dan Kegiatan serta pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan yaitu paling lambat pada tanggal 31 Desember.

Pada tahun 2018 penetapan APBD Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017, dan untuk penetapan APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2018 Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Sedangkan pada tahun 2019 penetapan APBD Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019 Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2019 Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Pada tahun 2020 penetapan APBD Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020 Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2020 Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Pada tahun 2021 penetapan APBD Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2021 Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2021 Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

4.1). Eselon IV. A1 (Kasubbid Anggaran)

Sasaran Strategis nomor 3 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atau Pejabat Eselon III.B tersebut, dilaksanakan atau menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bidang Anggaran atau Pejabat Eselon IV.A sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani. Untuk menggambarkan pencapaian kinerja Kasubbid Anggaran Tahun 2021 yang menjadi tanggungjawabnya akan dipaparkan dari pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja beserta analisisnya yaitu sebagai berikut :

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS sesuai ketentuan	1	Jumlah Dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS sesuai ketentuan	2 Dok.	2 Dok	100%
2	Melaksanakan Sosialisasi Penyusunan RKA SKPD sesuai ketentuan	1	Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi dan memahami penyusunan RKA sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
3	Melaksanakan Pembahasan RKA SKPD sesuai ketentuan		Jumlah SKPD yang mengikuti pembahasan RKA sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
4	Melaksanakan Penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai ketentuan		Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai ketentuan	2 Dok.	2 Dok.	100%
5	Melaksanakan fasilitasi evaluasi atas Raperda dan Raperkada APBD serta Raperda dan Raperkada Perubahan APBD ke Pemprov sesuai ketentuan		Jumlah dokumen Raperda dan Raperkada APBD serta Raperda dan Raperkada Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi Gubernur	4 Dok.	4 Dok.	100%
6	Melaksanakan fasilitasi Penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD sesuai ketentuan		Jumlah Dokumen Penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD sesuai ketentuan	2 Dok.	2 Dok.	100%
7	Melaksanakan penyusunan penerbitan Penyediaan Dana Anggaran SKPD sesuai ketentuan		Jumlah SPD-SKPD dan PPKD yang diterbitkan sesuai ketentuan	280 SPD	852 SPD	304%
8	Melaksanakan pembinaan penganggaran SKPD sesuai ketentuan		Jumlah SKPD yang dibina dalam penganggaran sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%

LKj BPKAD TAHUN 2021

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran Rp	Realisasi	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
A.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			16.495.710	7.895.900	47,87	
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dok.		2 Dok	100	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			14.428.640	9.783.100	67,80	
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dok.		2 Dok	100	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD			22.236.640	18.918.300	85,08	

		Jumlah SKPD	40 SKPD		40 SKPD	100	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			22.236.640	18.290.700	82,25	
		Jumlah SKPD	40 SKPD		40 SKPD	100	
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			6.464.600	489.700	7,58	
		Jumlah SKPD	40 SKPD		40 SKPD	100	
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			6.464.600	508.300	7,86	
		Jumlah SKPD	40 SKPD		40 SKPD	100	
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			131.036.370	104.812.700	79,99	
		Jumlah Dokumen Perda APBD dan Perkada APBD	2 Dok.		2 Dok.	100	
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang			105.009.500	77.365.300	73,13	

	Penjabaran Perubahan APBD						
		Jumlah Dokumen Perda P APBD dan Perkada P APBD	2 Dok.		2 Dok.	100	
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			21.302.600	15.365.300	72,13	
		Jumlah Dokumen Pedoman Penyusunan RKA SKPD	6 Dok.		9 Dok.	150	
A.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						
1	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			31.654.870	23.950.900	75,66	
		Jumlah Dokumen SPD	750 Dok.		852 Dok.	113	

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbid Anggaran Tahun 2021

A. Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021

- 1). Melaksanakan Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah dokumen Penyusunan KUA dan PPAS dengan Target Kinerja sebanyak 2 dokumen (KUA dan PPAS Tahun 2022), sampai TRIWULAN IV Tahun 2021 telah terealisasi kinerja sebesar 100%.

- 2). Melaksanakan Sosialisasi Penyusunan RKA SKPD sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi dan memahami penyusunan RKA sesuai ketentuan dengan target kinerja sebanyak 40 SKPD sampai TRIWULAN IV Tahun 2021 telah realisasi kinerja sebesar 100%.
- 3). Melaksanakan Pembahasan RKA SKPD sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah SKPD yang mengikuti pembahasan RKA sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 40 SKPD sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2021 telah terealisasi kinerja 100%.
- 4). Melaksanakan Penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah SKPD dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 2 Dokumen sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2021 realisasi kinerja 100%, yaitu dengan telah ditetapkannya PERDA Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang APBD Tahun 2021 dan PERDA Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang APBD Perubahan Tahun 2021.
- 5). Melaksanakan fasilitasi evaluasi atas Raperda dan Raperkada APBD serta Raperda dan Raperkada Perubahan APBD ke Pemprov sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah SKPD dalam rangka Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 4 Dokumen sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2021 telah terealisasi kinerja 100%.
- 6). Melaksanakan fasilitasi Penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah SKPD dalam rangka Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 2 Dokumen sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2021 telah terealisasi kinerja 100%. Dengan telah ditetapkannya PERDA Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang APBD Tahun 2021 dan PERDA Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang APBD Perubahan Tahun 2021.
- 7). Melaksanakan penyusunan penerbitan Penyediaan Dana Anggaran SKPD sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah SPD-SKPD dan PPKD yang diterbitkan sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 280 dokumen sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2021 realisasi kinerja sebanyak 852 Dokumen atau realisasi capaian kinerja melebihi yaitu 304%, dengan telah ditetapkannya dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD setiap Triwulan sebagai Dokumen resmi penyediaan dana SKPD yang siap digunakan.
- 8). Melaksanakan pembinaan penganggaran SKPD sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah SKPD yang dibina dalam penganggaran sesuai ketentuan dengan target kinerja sebanyak 40 SKPD sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2021 realisasi kinerja 100%, yaitu terlaksananya Pembinaan serta Sosialisasi kepada 40 SKPD mengenai Pedoman Penyusunan RKA – SKPD APBD 2021 dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Tahun 2021.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2021

- 1). Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan KUA dan PPAS dengan Pagu anggaran Sebesar Rp35.201.950,00 setelah perubahan APBD TA.2021 menjadi 16.495.710 dengan realisasi sampai dengan TW. IV sebesar Rp.7.895.900. dengan Target Kinerja sebanyak 2 dokumen (KUA dan PPAS Tahun 2022), sampai TRIWULAN IV Tahun 2021 telah terealisasi kinerja sebesar 100%.
- 2). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 14.428.640,00 setelah perubahan APBD TA.2021 menjadi Rp. 14.428.640 dengan realisasi sampai dengan TW.IV sebesar Rp 9.763.100,00. dengan Target Kinerja sebanyak 2 dokumen (KUPA dan PPAS Tahun 2021), sampai TRIWULAN IV Tahun 2021 telah terealisasi kinerja sebesar 100%.
- 3). Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 22.236.640,00 dengan realisasi sampai dengan TW. IV sebesar Rp 18.918.300,00. dengan Target Kinerja sebanyak 40 SKPD sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2021 telah terealisasi kinerja 100%.
- 4). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Pagu anggaran Sebesar Rp 22.236.640,00 dengan realisasi sampai dengan TW. IV sebesar Rp.18.290.700,00. dengan Target Kinerja sebanyak 40 SKPD sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2021 telah terealisasi kinerja 100%.
- 5). Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Sebesar Rp 6.464.600,00 dengan realisasi sampai dengan TW. IV sebesar Rp.489.700,00. dengan Target Kinerja sebanyak 40 SKPD sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2021 telah terealisasi kinerja 100%.
- 6). Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Sebesar Rp 6.464.600,00 dengan realisasi sampai dengan TW. IV sebesar Rp.508.300,00. dengan Target Kinerja sebanyak 40 SKPD sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2021 telah terealisasi kinerja 100%.
- 7). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 195.347.170,00 setelah perubahan APBD TA.2022 menjadi Rp. 131.036.370,00 dengan realisasi sampai dengan TW.IV sebesar Rp 104.812.700,00. Sub Kegiatan ini dengan target kinerja sebanyak 2

Dokumen yaitu dengan telah ditetapkannya 1). PERDA Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun 2021 dan 2). PERKADA Nomor 267 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun 2021

- 8). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 148.072.000,00 setelah perubahan APBD TA.2022 menjadi Rp. 105.009.500,00 dengan realisasi sampai dengan TW.IV sebesar Rp 77.078.500,00. Sub Kegiatan ini dengan target kinerja sebanyak 2 Dokumen yaitu dengan telah ditetapkannya 1) PERDA Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2021. 2). PERKADA Nomor 98 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2021.
- 9). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.302.600,00 dengan realisasi sampai dengan TW.IV sebesar Rp 15.365.300,00. Sub Kegiatan ini dengan target kinerja sebanyak sebanyak 6 dokumen yaitu : 1). SE Bupati Nomor 910/2447/BPKAD tanggal 3 September 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/ RKA-PPKD TA 2022. 2). SE Bupati Nomor 910/2495/BPKAD tanggal 13 September 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD TA 2021. 3). Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2021 4). Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021 5). KUA-PPAS Rancangan APBD Tahun 2021 6). Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021 sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2021 telah terealisasi sebanyak 9 Dokumen yaitu 1). SE Bupati Nomor 910/2447/BPKAD tanggal 3 September 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/ RKA-PPKD TA 2022. 2). SE Bupati Nomor 910/2495/BPKAD tanggal 13 September 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD TA 2021. 3). Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2021 4). Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021 5). KUA-PPAS Rancangan APBD Tahun 2021 6). Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021 7). PERBUP nomor 13 Tahun 2021 Perubahan I atas PERBUP No 267 tahun 2020 8). PERBUP nomor 25 Tahun 2021 Perubahan II atas PERBUP No 267 tahun 2020 9). PERBUP nomor 46 Tahun 2021 Perubahan III atas PERBUP No 267 tahun 2020 sampai saat ini telah tercapai sebesar 150%.
- 10). Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 55.979.870,00 setelah perubahan APBD TA.20222 menjadi Rp. 31.654.870,00 dengan

realisasi sampai dengan TW.IV sebesar Rp 23.950.900,00. Sub Kegiatan ini dengan target kinerja sebanyak 750 Dokumen sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2021 telah terealisasi 852 Dokumen sehingga dengan demikian capaian kinerja melebihi target yaitu 113%.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

- Adanya pandemi covid 19 yang mengakibatkan rapat-rapat/pertemuan tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya.

Rencana Aksi

- Terus berkoordinasi dengan PIC yang sudah ditugaskan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri untuk mendampingi Pemerintah Daerah dalam hal penggunaan aplikasi SIPD.

Foto - Foto Dokumen Kegiatan Kasubbid Anggaran Tahun 2021







**PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT**



**PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2021**





**PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT**



**PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2021**





BUPATI TANAH LAUT



NOTA KEUANGAN

RANCANGAN PERUBAHAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**





**PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2021**



TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**





BUPATI TANAH LAUT



**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 98 TAHUN 2021**



TENTANG

**PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

LI





BUPATI TANAH LAUT



SURAT EDARAN

NOMOR : 910/ 2576 /BPKAD

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD/RKA-SKPKD
TAHUN ANGGARAN 2021**





BUPATI TANAH LAUT



**NOTA KEUANGAN
RANCANGAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**





PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT



PPAS

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**





**PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT**



KUA

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**





BUPATI TANAH LAUT

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 267 TAHUN 2020**



TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I





2.1.4. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 4

Sasaran Strategis nomor 4 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis nomor 4 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam
Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
4	Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	4	Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100,00			100,00			100,00			100,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan trend capaian kinerjanya dari tahun 2018 samapai dengan tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 %. Untuk mendukung sasaran strategis Kepala Bidang Pembiayaan nomor 4 ini Indikator sasaran dilaksanakan oleh 2 (dua) Kasubbid yaitu Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi dan Kepala Sub Bidang Pembiayaan dengan pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini.

4.2). Eselon IV. A1 (Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi)

Sasaran Strategis nomor 4 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atau Pejabat Eselon III.B tersebut, dilaksanakan atau menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi atau Pejabat Eselon IV.A1 sesuai dengan Program dan Kegiatan, Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani. Untuk menggambarkan pencapaian kinerja Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi Tahun 2021 yang menjadi tanggungjawabnya akan dipaparkan dari pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja beserta analisisnya yaitu sebagai berikut :

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan SP2D, penatausahaan keuangan daerah yang tertib sesuai dgn PerUU dan sebagai bahan dokumen pertanggung jawaban	1	Jumlah SP2D, SP2B, SPB, Daftar Penguji dan SKPP yang diterbitkan sesuai ketentuan	7.500 SP2D, 250 SP2B, 2 SPB, 400 Daftar Penguji	7.512 SP2D, 250 SP2B, 2 SPB, 0 Daftar Penguji	100%
2	Melaksanakan perhitungan Pembayaran JKK-JKM dan IWP 4% sesuai ketentuan	2	Jumlah Laporan Hasil Perhitungan Pembayaran JKK-JKM dan IWP 4% sesuai ketentuan	24 Lap. JKK, 24 Lap. JKM dan 24 Lap. IWP	24 Lap. JKK, 24 Lap. JKM dan 24 Lap. IWP	100%
3	Melaksanakan monitoring penatausahaan keuangan SKPD sesuai ketentuan	4	Jumlah SKPD yang termonitoring dalam penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
4	Melaksanakan koordinasi/konsolidasi/evaluasi dengan stakeholder mengenai penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	5	Jumlah stakeholder yang dikoordinasi/dikonsolidasi /dievaluasi mengenai penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	43 Stakeholder	43 Stakeholder	100%

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran RP	Realisasi	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
A.1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						
1	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			9.999.700	5.119.000	51%	
		Jumlah Jenis	9 jenis (SP2D,UP,GU,LS)		9 jenis (SP2D,UP,GU,LS Gaji)	100%	

LKj BPKAD TAHUN 2021

			Gaji & TPP, LS Pihak Ke III, SP2B, SPB, Daftar Penguji, SKPP))		&TPP, LS Pihak Ke III, SP2B, SPB, Daftar Penguji, SKPP)		
2	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			14.864.580	4.273.000	28%	
		Jumlah Kali	4 kali (24 Lap. JKK, 24 Lap. JKM dan 24 Lap. IWP)		4 kali (24 Lap. JKK, 24 Lap. JKM dan 24 Lap. IWP	100%	
3	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			43.874.670	38.468.000	87%	
		Jumlah Dokumen	2 dokumen		5 Dokumen	250 %	
4	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			103.485.010	82.261.200	79%	
		Jumlah Dokumen	10189 Dokumen		8224 Dokumen	100%	
		Jumlah Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi Tahun 2021

B. Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan SP2D, penatausahaan keuangan daerah yang tertib sesuai dgn PerUU dan sebagai bahan dokumen pertanggung jawaban dengan indikator Jumlah SP2D, SP2B, SPB, Daftar Penguji dan SKPP yang diterbitkan sesuai ketentuan sebagaimana yang ditargetkan yaitu 7.500 SP2D,

250 SP2B, 2 SPB, 400 Daftar Penguji dan 220 SKPP, sampai dengan Triwulan IV telah dicapai sebanyak 7.512 SP2D, 250 SP2B, 2 SPB, 0 Daftar Penguji dan 221 SKPP atau dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian tersebut masih ada yang menggunakan sistem manual/Excel dikarenakan belum ada peningkatan atau progres di sistem SIPD seperti pencatatan realisasi SPB Dana BOS dan daftar penguji.

- 2) Melaksanakan perhitungan Pembayaran JKK-JKM dan IWP 4% sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Perhitungan Pembayaran JKK-JKM dan IWP 4% sesuai ketentuan sebagaimana ditargetkan yaitu 24 Lap. JKK, 24 Lap. JKM dan 24 Lap. IWP, saat ini telah penyampaian laporan sebanyak 24 Lap. JKK, 24 Lap. JKM dan 24 Lap. IWP sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Melaksanakan monitoring penatausahaan keuangan SKPD sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah SKPD yang termonitoring dalam penatausahaan keuangan sesuai keuangan dengan target kinerja sebanyak 40 SKPD Pengelola Keuangan yaitu terdiri dari Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran dan telah diberikan sosialisasi terkait penatausahaan keuangan daerah tahun anggaran 2021 sebanyak 51 Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu telah kami lakukan dengan mengadakan acara sosialisasi (100%) yaitu Sosialisasi tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun 2021. Terkait dengan monitoring terhadap pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah di tahun anggaran 2021 telah kami lakukan dengan capaian 40 SKPD pada Triwulan IV (100%).
- 4) Melaksanakan koordinasi/konsolidasi/evaluasi dengan stakeholder mengenai penatausahaan keuangan sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah stakeholder yang dikoordinasi/dikonsolidasi/dievaluasi mengenai penatausahaan keuangan sesuai ketentuan yaitu sebanyak 43 Stakeholder telah kami lakukan baik dengan 40 SKPD maupun dengan Pihak PT. Taspen, BPJS Kesehatan maupun dengan pihak Bank Kalsel telah terealisasi capaian kinerja sebesar 100%. Dan kegiatan koordinasi dengan stakeholder akan terus dilakukan.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2021

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan pagu anggaran Rp. 9.999.700,- sampai dengan akhir Triwulan IV pencapaian realisasi sebesar Rp. 5.119.000,- atau 51% karena pihak Bank baru launching sistem transaksi non tunai di pertengahan bulan Desember 2021. Sub Kegiatan ini dengan target kinerja pelayanan sebanyak 9 jenis (SP2D,UP,GU,LS

Gaji & TPP, LS Pihak Ke III, SP2B, SPB, Daftar Penguji, SKPP) dan telah terealisasi capaian kinerjanya 100%.

- 2) Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan pagu anggaran Rp. 14.864.580,- sampai dengan akhir Triwulan IV telah terealisasi Rp. 4.273.000,-(28%). Sub Kegiatan ini dengan target kinerja melakukan Rekonsiliasi dengan 40 SKPD maupun dengan Pihak PT. Taspen, BPJS Kesehatan maupun dengan pihak Bank Kalsel sebanyak 4 kali (Triwulanan) dengan hasil yaitu 24 Lap. JKK, 24 Lap. JKM dan 24 Lap. IWP.
- 3) Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 43.874.670,- sampai dengan akhir Triwulan IV telah terealisasi Rp. 38.468.000,- (87%). Sub Kegiatan ini dengan target kinerja sebanyak 2 Dokumen (SE Bupati Penatausahaan Keuangan Daerah dan SE Bupati tentang SPPD) dan telah terealisasi 5 Dokumen (1.SE Bupati Penatausahaan Keuangan Daerah 2.SE Bupati tentang SPPD 3. SK Bupati Pengguna Anggaran 4. SK Bupati KPA 5. SK Bupati Bendahara Pengeluaran) atau dengan capaian kinerja sebesar 150%.
- 4) Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 103.485.010,- sampai dengan akhir Triwulan IV telah terealisasi Rp. 82.261.200,- (79%). Sub Kegiatan ini dengan target kinerja sebanyak 10189 Dokumen dan 2 Dokumen dan telah terealisasi sebanyak 8224 Dokumen dan 2 Dokumen yaitu (1. Dokumen Laporan Realisasi Pembayaran Gaji ASN diKabupaten Tanah Laut Tahun 2021 2). Dokumen Laporan Realisasi Pembayaran TPP ASN diKabupaten Tanah Laut Tahun 2021) kedua dokumen Laporan tersebut disampaikan ke Kemenkeu melalui Aplikasi SIKD sebagai syarat dalam rangka penyaluran DAU dari Pusat Ke Daerah, karena jika tidak melaporkan kedua Dokumen Laporan diatas maka Penyaluran DAU di Kabupaten Tanah Laut pada Bulan berikutnya akan ditunda.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

- o Belum bisa menjalankan Sistem/Aplikasi yang baru dari Kemendagri (SIPD), dimana masih memakai sistem/aplikasi yang lama (SIMDA)

Rencana Aksi

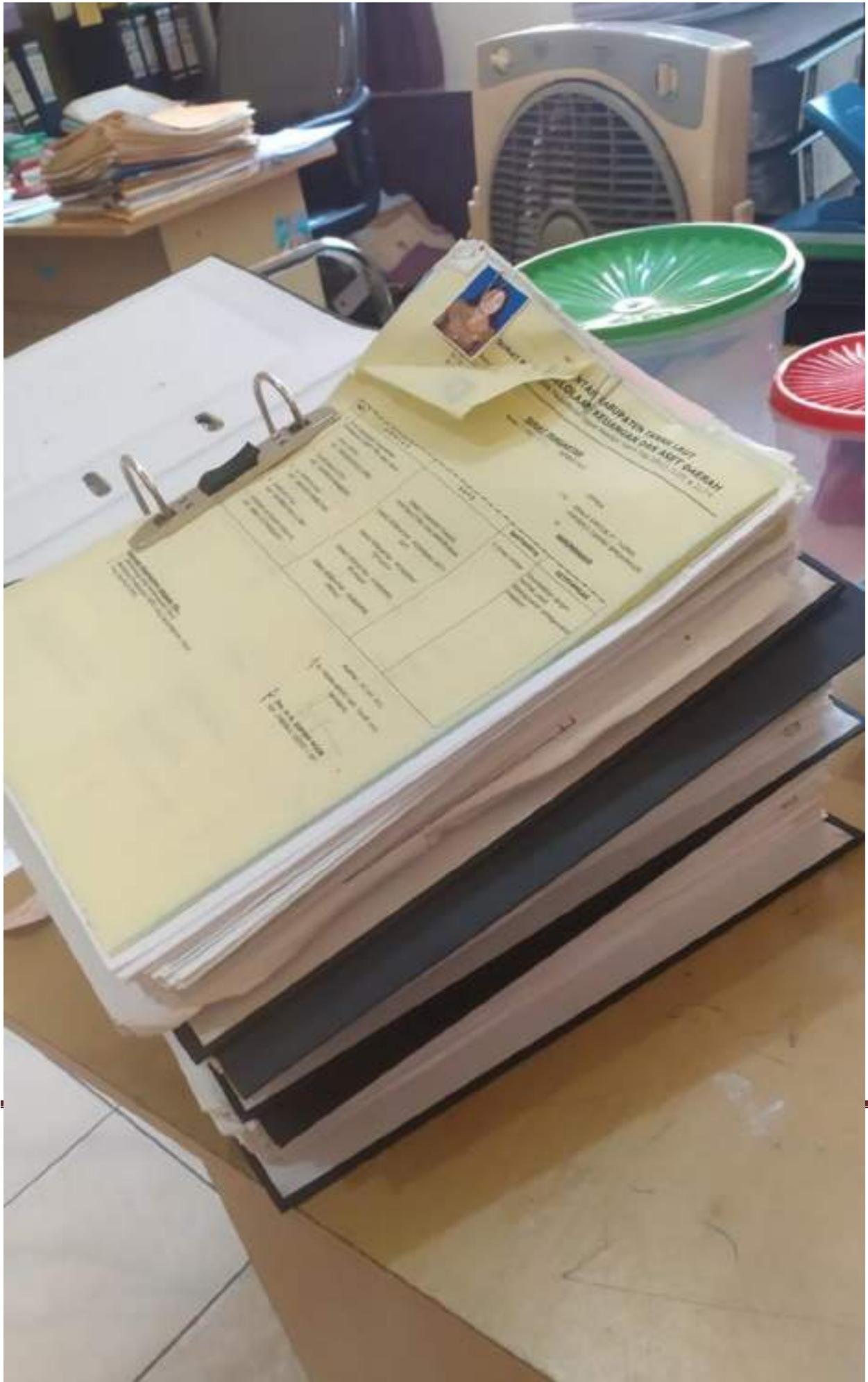
- Meningkatkan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pengelola Keuangan SKPD agar memahami peraturan perundang-undangan yang terbaru khususnya Permendagri Nomor 77 tahun 2020.
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak Bank terkait Transaksi Non Tunai agar lebih mempermudah sistem yang sudah dijalankan.

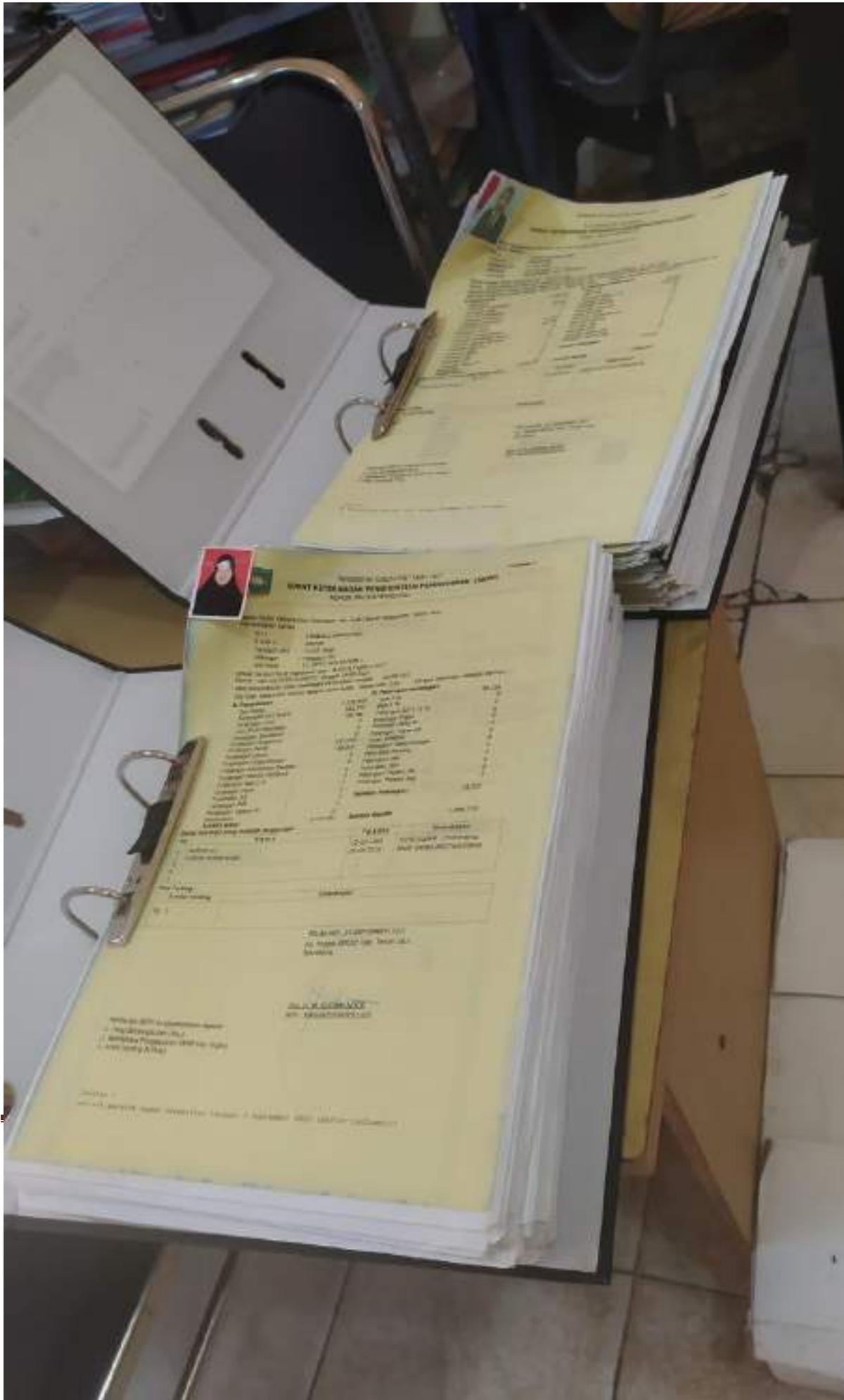
Foto-foto Kegiatan pada Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi tahun 2021











BUKTI KETERANGAN PENGENDALIAN PANGKAWAN (BUP)
NO. 101-102-103-104

A. Pengeluaran		B. Penghasilan	
Saldo awal	100.000	Saldo awal	100.000
Saldo akhir	100.000	Saldo akhir	100.000
...
Jumlah akhir	100.000	Jumlah akhir	100.000

BUKTI KETERANGAN PENGENDALIAN PANGKAWAN (BUP)
NO. 101-102-103-104

JULIA K. GORRANCE
AK. 1000000000000

BUKTI KETERANGAN PENGENDALIAN PANGKAWAN (BUP)
NO. 101-102-103-104



4.3). Eselon IV.A1 (Kasubbid Pembiayaan)

Sasaran Strategis nomor 4 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atau Pejabat Eselon III.B tersebut, juga dilaksanakan atau menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bidang Pembiayaan atau Pejabat Eselon IV.A1 sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani. Untuk menggambarkan pencapaian kinerja Kepala Sub Bidang Pembiayaan Tahun 2021 yang menjadi tanggungjawabnya akan dipaparkan dari pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja beserta analisisnya yaitu sebagai berikut :

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan penyediaan bahan penganggaran pembiayaan daerah sesuai ketentuan	1	Jumlah dokumen penganggaran belanja transfer, belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	100%
2	Melaksanakan pelayanan penyaluran belanja transfer & belanja tidak terduga sesuai ketentuan	2.	Jumlah pemohon yang menerima penyaluran belanja transfer dan belanja tidak terduga sesuai ketentuan	136 orang	132 orang	97%
3	Melaksanakan sosialisasi penatausahaan pembiayaan daerah bagi aparat desa sesuai ketentuan	3	Jumlah aparatur desa yang mengikuti dan memahami sosialisasi penatausahaan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	130 orang	130 orang	100 %

4	Melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang melakukan monitoring terkait penyaluran dana hibah dan bansos sesuai ketentuan	4.	Jumlah SKPD yang menerima dana hibah dan bansos yang terkoordinasi sesuai ketentuan	6 SKPD	16 SKPD	100 %
5	Melaksanakan penyusunan laporan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	5	Jumlah dokumen laporan pembiayaan daerah yang dilaporkan sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran RP	Realisasi	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
A.1	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>						
1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			12.462.080,00	9.832.500,00	78,90%	
		Jumlah dokumen	3 dokumen		3 dokumen	100%	
A.2	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>						

1	Penatausahaan Pembiayaan Daerah			182.265.230,00	120.562.800,00	66,15%	
		Jumlah dokumen	1 dokumen		1 dokumen	100%	
2	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			46.414.190,00	22.490.000,00	48,46%	
		Jumlah dokumen	1 dokumen		1 dokumen	100%	
A.3	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>						
1	Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan			230.298.251.660 ,00	229.718.923.660 ,00	99,75%	
		Jumlah Desa yang tersalurkan Bantuan Keuangan	130 Desa		130 Desa	100%	
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			20.569.890.343, 00	6.471.571.965, 00	31,46%	
		Jumlah dokumen	1 dokumen		1 dokumen	100%	

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbid Pembiayaan Tahun 2021

A. Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja yang telah dilaksanakan:

- a. Melaksanakan penyediaan bahan penganggaran pembiayaan daerah sesuai ketentuan dengan indicator Jumlah dokumen penganggaran belanja transfer, belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan dengan target 2 dokumen yaitu 1). RKA Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Tahun 2021 2) RKA Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun 2021, sehingga capaian kinerja telah terealisasi 100%.

- b. Melaksanakan pelayanan penyaluran belanja transfer & belanja tidak terduga sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah pemohon yang menerima penyaluran belanja transfer dan belanja tidak terduga sesuai ketentuan dengan target kinerja sebanyak 136 orang dengan realisasi sebanyak 132 orang (130 Pemerintah Desa dan 2 SKPD ()), sehingga capaian kinerja telah terealisasi 100%. Penerbitan SPP-SPM Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Tahap I dan Tahap II serta kurang salur bagi hasil \l pajak daerah direalisasikan ke 130 desa yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Tersalurkannya BLT bulan 1 sampai dengan BLT bulan ke 12 kepada 130 desa, Dana Desa Tahap 1 dan Tahap 2 kepada 130 desa sedangkan untuk tahap 3 hanya dapat disalurkan kepada 126 desa sehingga terdapat 4 desa yaitu Desa Damit Hulu, Desa Bumi Harapan, Desa Bentok Darat dan Desa Panggung Baru karena tidak menyampaikan syarat penyaluran Dana Desa Tahap 3. Tersalurkan Belanja Tak Terduga kepada 2 SKPD yaitu BPBD sebagai SKPD Teknis yang melakukan penanggulangan bencana kebakaran, puting beliaung dan abrasi serta penanganan tanggap darurat covid 19 (PPKM level 4) dan Belanja Bantuan Sosial tidak terencana kepada Dinas Sosial di Kabupaten Tanah Laut.

- c. Melaksanakan sosialisasi penatausahaan pembiayaan daerah bagi aparat desa sesuai ketentuan Jumlah aparatur desa yang mengikuti dan memahami sosialisasi penatausahaan pembiayaan daerah sesuai ketentuan dengan target kinerja sebanyak 130 Orang Pemerintah Desa diKabupaten Tanah Laut, sehingga capaian kinerja telah terealisasi 100%. Sosialisasi kepada SKPD teknis terkait pelaksanaan hibah dan bansos Tahun Anggaran 2021 serta penganggaran hibah dan bansos pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan terlaksananya sosialisasi tindak lanjut hasil rekonsiliasi sisa dana desa dari tahun 2015 sampai dengan 2019 kepada 130 desa.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang melakukan monitoring terkait penyaluran dana hibah dan bansos sesuai ketentuan Jumlah SKPD yang menerima dana hibah dan bansos yang terkoordinasi sesuai ketentuan dengan target kinerja sebanyak 6 SKPD dan telah terealisasi sebanyak 16 SKPD yaitu 6 SKPD (Bagian Kesra Setda Tanah Laut, Badan Kesbangpol, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial) serta 11 Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut, sehingga capaian kinerja telah terealisasi 100%.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pembiayaan daerah sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah dokumen laporan pembiayaan daerah yang dilaporkan sesuai ketentuan dengan target kinerja sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi sebanyak 1 dokumen yaitu Dokumen Laporan pembiayaan daerah yaitu berupa Laporan Pertanggungjawaban Penatausahaan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 .

B. Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2021

- 1. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 12,462,080.00 dengan realisasi sd Tw IV sebesar Rp

9.832.500,00, Sub Kegiatan sudah terlaksana dengan target 3 dokumen yaitu dokumen lampiran pada APBD Tahun 2021 terdiri dari ; 1). Lampiran Hibah Uang 2). Lampiran Bansos Uang 3). Lampiran Hibah dan Bansos Barang, sehingga capaian kinerja telah terealisasi 100%. Sub Kegiatan ini juga mengeluarkan Dokumen Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1084-KUM/2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Tahun Anggaran 2021, dana ini akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

2. Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 182.265.230.00 dengan realisasi sd Tw IV sebesar Rp 120.562.800 atau capaian sebesar 66,15 %, Sub Kegiatan ini untuk kegiatan sosialisasi kepada aparat pemerintah desa se kabupaten tanah laut sudah terlaksana dan kegiatan lainnya sudah terlaksana dengan target kinerja sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi sebanyak 1 dokumen yaitu Dokumen Laporan pembiayaan daerah yaitu berupa Laporan Pertanggungjawaban Penatausahaan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 .
3. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 46,414,190.00 dengan realisasi sd Tw III sebesar Rp 22.490.000,-, atau capaian sebesar 48,46%. Sub Kegiatan sudah dilaksanakan dengan target 1 dokumen yaitu 1 dokumen Laporan Deposito yang diberikan kepada bank yang ditunjuk sebagai Bank Penempatan Kas Daerah yaitu berupa Laporan Hasil Rekapitulasi bunga deposito setiap bulan, yang mana Laporan tersebut akan digunakan sebagai bahan pada waktu pemeriksaan dari Auditor Pengawas BPK setiap tahunnya. Terlaksananya workshop internet banking Bank Kalsel untuk kelancaran proses pemindahbukuan atas transaksi bendahara sekaligus koordinasi tentang pencairan Deposito pada bank kalsel TA 2021.

4. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 230.298.251.660.00 dengan realisasi sd Tw IV sebesar Rp 229.718.923.660.00 atau capaian sebesar 99.75 %, Sub Kegiatan ini sudah melaksanakan penyaluran Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan tahap I dan Tahap II. untuk Dana Desa Tahap I, Tahap II, Tahap III dan BLT bulan 1 sd 12 disalurkan melalui pemotongan langsung dari rekening kas daerah ke rekening kas desa oleh KPPN. Sub Kegiatan sudah dilaksanakan dengan target 1 dokumen.

5. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 20.569.890.343.00 dengan realisasi sd Tw IV sebesar Rp. 6.471.571.965.00 atau capaian keuangan sebesar 31.46 %, Sub Kegiatan ini terealisasi karena adanya penyaluran Dana Belanja Tak Terduga kepada BPBD untuk tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor, penyaluran penanggulangan bencana tanggap darurat penanganan covid 19 (PPKM Level 4) dan bantuan sosial tidak terencana untuk korban bencana kebakaran, putting beliung dan abrasi. Sub Kegiatan sudah dilaksanakan dengan target 1 dokumen yaitu 1 dokumen Laporan Pelaksanaan Penggunaan Dana Darurat Mendesak Tahun 2021, dan dokumen ini akan digunakan sebagai bahan Auditor pada waktu pemeriksaan setiap tahunnya.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

- Terdapat desa yang tidak diajukan penyaluran dana desa tahap III nya ke KPPN karena desa yang bersangkutan tidak menyampaikan syarat penyaluran tahap III ke BPKAD.

Rencana Aksi

- Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, kepada SKPD yang langsung berkaitan dengan masyarakat pemohon hibah dan bantuan sosial agar di informasikan kepada masyarakat.

- Melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang melakukan pembinaan ke desa sehubungan dengan tidak dapat diajukan penyaluran dana desa tahap 3

Foto Kegiatan Kasubbid Pembiayaan Triwulan IV Tahun 2021





2) Dokumen Peraturan Bupati



5. ESELON III.B (Kepala Bidang Akuntansi)

2.1.5 Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 5

Sasaran Strategis nomor 5 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Akuntansi atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis nomor 5 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Akuntansi dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
5	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	5	Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja							100,00			100,00			100,00			100,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan capaian kerjanya baik pada tahun 2018, 2019, 2020 dan pada tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 %, yaitu dibuktikan dengan telah tersajinya LKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya serta telah disampaikan secara tepat waktu untuk dilakukan Audit oleh Tim Auditor. Untuk mendukung sasaran strategis Kepala Bidang Akuntansi nomor 5 Indikator sasaran ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pengelolaan Kas, Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban dan Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Piutang dengan pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan pencapaian Program, Kegiatan dan

Sub Kegiatan sesuai DPA Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini.

5.1). Eselon IV. A1 (Kasubbid Akuntansi Pengelolaan Kas)

Pada tahun 2014 Laporan Keuangan SKPD berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual), sehingga capaian kinerja hanya mencapai 50%, karena Laporan Keuangan SKPD belum sepenuhnya berbasis akrual.

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) dan pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 dibuat berdasarkan Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 ini adalah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yaitu BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Demikian juga pada tahun 2016,tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual telah disampaikan oleh seluruh SKPD dan telah di Audit oleh BPK – RI dan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 (delapan) tahun berturut-turut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual. Dengan demikian bahwa pelaporan keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berbasis Akrual dapat dijamin terpenuhi 100%.

Untuk mendukung Sasaran strategis No 5 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Akuntansi diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Pengelolaan Kas yaitu

dengan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Pengelolaan Kas Tahun 2021 sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kinerja Utama		Indikator Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan Rekonsiliasi Kas SKPKD sesuai ketentuan	1	Jumlah Kas SKPKD yang telah direkonsiliasi sesuai ketentuan	12 Dokumen	12	100 %
2	Melaksanakan Pembinaan Pertanggungjawaban keuangan SKPD sesuai ketentuan	2	Jumlah SKPD yang terbina dan memahami mekanisme pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100 %
3	Melaksanakan fasilitasi terhadap pelayanan laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan	3	Jumlah SKPD yang terfasilitasi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
4	Melaksanakan monitoring kas SKPD sesuai ketentuan	4	Jumlah Kas SKPD yang termonitoring sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%

5	Melaksanakan konsolidasi Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Laporan BLUD, Laporan Dana BOS, Laporan SIKD sesuai ketentuan	5	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Laporan BLUD, Laporan Dana BOS, Laporan SIKD sesuai ketentuan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
6	Melaksanakan penyusunan LKPD, Raperda, Raperbup, Perda, Perbup Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan	6	Jumlah Dokumen LKPD, Raperda, Raperbup, Perda, Perbup Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

2. Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021

	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	56.871.550,00	42.057.000,00	73,95 %	Jumlah FGD	2 FGD	1 FGD	50 %
				2. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	165.841.770,00	146.382.180,00	88,26%	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %
				3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	257.720.720,00	253.377.500,00	98,29%	Jumlah Dokumen	3 dokumen	3	100%
	Jumlah				Rp 480.434.040	441.816.680,00					

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja Kasubbid Akuntansi Pengelolaan Kas Tahun 2021

Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021

- 1) Jumlah Kas SKPKD yang telah direkonsiliasi sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen telah terealisasi 12 dokumen atau capaian kinerjanya sebanyak 100%. 12 Dokumen tersebut adalah : Rekonsiliasi Kas Umum Daerah selama 12 bulan sebanyak 12 dokumen. Yaitu melaksanakan rekonsiliasi Kas Umum Daerah dengan Bank Kalsel berupa Berita Acara Rekonsiliasi dan ditandatangani oleh Petugas Rekonsiliasi dari BPKAD, Kasubbid Akuntansi Pengelolaan Kas, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bank Kalsel Cabang Pelayari dan Kepala BPKAD. Yaitu berisi tentang Kas Umum Daerah antara data pada inputan SIMDA Keuangan dengan Rekening Koran pada Bank Kalsel data ini berguna untuk data yang diminta BPK RI pada waktu Audit LKPD.
- 2) Jumlah SKPD yang terbina dan memahami mekanisme pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan dengan target kinerja sebanyak 40 SKPD telah terlaksana, mengingat adanya pergantian baik pergantian bendahara maupun kasubag perencanaan keuangan maka perlu dilaksanakan pembinaan ulang terhadap bendahara pengeluaran dan kasubag perencanaan keuangan atau capaian kinerjanya sebanyak 100 %
- 3) Jumlah SKPD yang terfasilitasi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan, dengan target kinerja 40 SKPD, telah terlaksana 100%.
- 4) Jumlah Kas SKPD yang termonitoring sesuai ketentuan dengan target 40 SKPD, telah dilaksanakan 100%.
- 5) Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Laporan BLUD, Laporan Dana BOS, Laporan SIKD sesuai ketentuan dengan target kinerja sebanyak 3 dokumen terealisasi 3 dokumen atau capaian kinerjanya 100 %, 3 Dokumen tersebut yaitu : 1). Dokumen Laporan SIKD Semester I 2021, 2). Dokumen Laporan Semester II 2021 3). Dokumen MOU Pengadaan Layanan Cloud sesuai Kontrak Kerja Nomor :027/02/SP/BPKAD/2021 tanggal 1 Januari 2021 Dimana Bidang Akuntansi bekerja sama dalam rangka pengadaan sewa

layanan cloud database system keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan PT. Lawang Sewu melalui Kontrak Kerjasama Nomor : 027/02/SP/BPKAD/2021 Tanggal 1 Januari 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp[197.208.000,- Yaitu pekerjaan pengadaan sewa layanan Cloud database system Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut berupa Layanan Sewa Cloud Simda Keuangan Daerah, selama setahun. Adapun proses pembayaran layanan sewa cloud tersebut PT. Lawang Sewu mengirimkan Invoicenyanya tiap dua bulan sekali, baru kita lakukan pembayaran. Sampai dengan Triwulan IV sesuai target 12 bulan telah selesai direalisasikan pembayarannya yang setiap bulan dibayar sebesar Rp16.500.000,-.

- 6) Jumlah Dokumen LKPD Unaudited, LKPD Audited, Raperda, Raperbup, Perda, Perbup Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan dengan target 6 dokumen telah terealisasi sebanyak 6 dokumen atau capaian kinerjanya sebanyak 100%.
6 Dokumen terdiri dari :
1. Dokumen LKPD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Unaudited 2020
 2. Dokumen LKPD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Audited 2020
 3. Dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020
 4. Dokumen Raperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020
 5. Dokumen Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020.
 6. Dokumen Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2021

- 1) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp. 56.871.550,00 dengan realisasi 42.057.000,00 atau capaian kinerjanya 73,95%. Target Kinerja semula sebanyak 2

FGD hanya terealisasi 1 FGD jadi realisasi capaian kinerja 50% hal ini disebabkan karena masih adanya pandemi Covid 19.

2) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp. 165.841.770,00 dengan realisasi sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 146.382.180 atau capaian kinerjanya 88,26%. Sub Kegiatan ini target kinerja 6 dokumen telah terealisasi 100% terdiri dari :

1. Dokumen LKPD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Unaudited 2020
2. Dokumen LKPD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Audited 2020
3. Dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020
4. Dokumen Raperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020
5. Dokumen Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020.
6. Dokumen Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020

3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pagu anggaran Rp. 257.720.720,00 dengan realisasi Rp. 253.377.500 atau capaian kinerjanya 98,29%. Sub Kegiatan ini target kinerjanya adalah sebanyak 3 dokumen terdiri dari... 1).Dokumen Laporan SIKD Semester I 2021, 2). Dokumen Laporan Semester II 2021 3).Dokumen MOU Pengadaan Layanan Cloud sesuai Kontrak Kerja Nomor : 027/02/SP/BPKAD/2021 tanggal 1 Januari 2021, sehingga capaian kinerja tercapai 100%.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

- Sumber Daya Manusia di subbidang akuntansi pengelolaan kas masih kurang
- Terdapat mutasi staf (bendahara pengeluaran) di masing-masing SKPD

Rencana Aksi

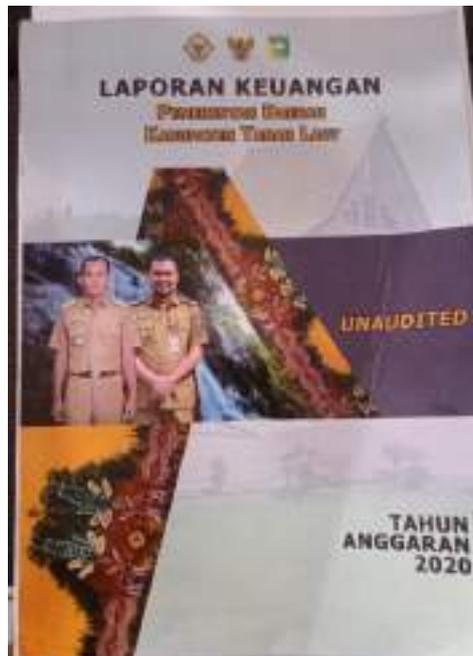
- Mengusulkan penambahan staf ke kasubag umum dan kepegawaian
- Melaksanakan pembinaan kepada Bendahara SKPD yang baru.

Foto - Foto Kegiatan Kasubbag Pengelolaan Kas Triwulan IV Tahun 2021

1). Rekon kas bos



2). LKPD Un Audited





3). FGD Trouble Shooting Penyusunan LKPD 2020



4). Rekon kas Daerah

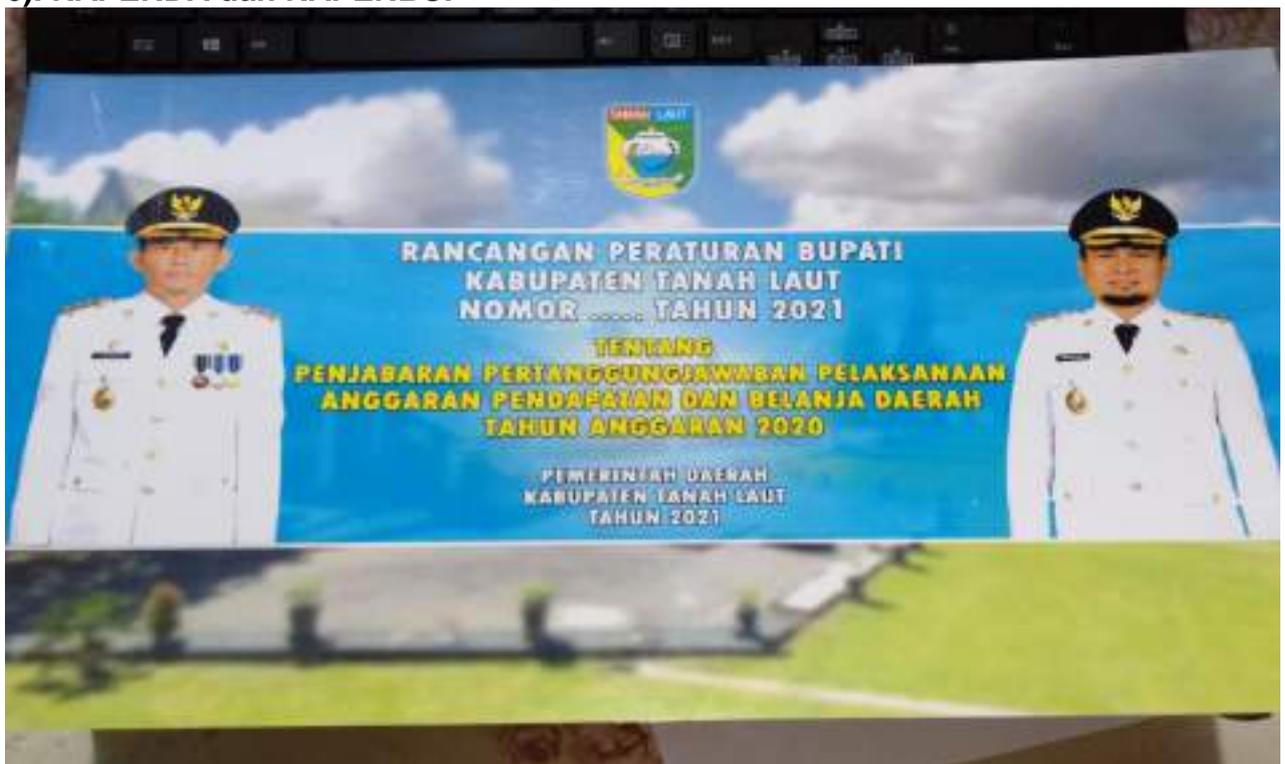


5). LKPD Audited





6). RAPERDA dan RAPERBUP





7). Dokumen SIKD Semester II



8). Rekonsiliasi Kas BLUD Semester I





9). RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SUBBID PENGELOLAAN KAS





5.2). Eselon IV. A 1 (Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Piutang)

Untuk mendukung Sasaran strategis No 5 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Akuntansi diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Piutang yaitu dengan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Piutang Tahun 2021 sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Melaksanakan koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang melakukan koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas sesuai ketentuan	26 SKPD	26 SKPD	100 %
2	Melaksanakan Pembinaan Bendahara Penerimaan SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Bendahara Penerimaan yang terbina dan memahami mekanisme pelaporan keuangan sesuai ketentuan	26 Bendahara Penerimaan	26 SKPD	100 %
3	Melaksanakan fasilitasi terhadap stakeholder dalam penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan	Jumlah stakeholder yang difasilitasi dalam penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan	10 SKPD	10 SKPD	100 %

4	Melaksanakan monitoring SKPD yang mengelola pendapatan dan piutang sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang termonitoring pendapatan dan piutang sesuai ketentuan	26 SKPD	26 SKPD	100 %
5	Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pendapatan dan Piutang Pemkab sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pendapatan dan Piutang Pemkab hasil konsolidasi sesuai ketentuan	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
6	Melaksanakan Koordinasi penerimaan pajak daerah atas belanja SKPD	Jumlah SKPD yang melakukan koordinasi penerimaan pajak daerah atas belanja SKPD	40 SKPD	40 SKPD	100%

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian %
Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			131.017.400,00	125.306.920,00	95,64%
		Jumlah Dokumen	7 dokumen		7 dokumen	100%
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			46.821.590,00	42.384.000,00	90,52%
		Jumlah Dokumen	12 dokumen		12 dokumen	100%

Analisis Pencapaian Kinerja Subbid Akuntansi Pendapatan dan Piutang Tahun 2021

1. Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Jumlah SKPD yang melakukan koordinasi akuntansi penerimaan dan kas sesuai ketentuan yang dilaksanakan dengan mengundang Bendahara Penerimaan se-Kabupaten Tanah Laut berjumlah 26 (dua puluh enam) SKPD sudah terealisasi sebanyak 3 kali (per-triwulan) yaitu Triwulan IV TA. 2020, Triwulan I TA. 2021, Triwulan II TA. 2021 dan Triwulan III Tahun 2021. Target kinerja sebanyak 26 SKPD Pengelola Penerimaan Daerah yaitu :

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan
3. Dinas PRKPLH
4. Sekretariat Daerah
5. DKPP
6. Dinas Peternakan Kesehatan dan Kesehatan Hewan
7. Dinas Pariwisata
8. Dinas Pemuda dan Olah Raga
9. Dinas Komunikasi dan Informasi
10. Dinas Perhubungan
11. Badan Pendapatan
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
13. Dinas Cooperas dan Perdagangan
14. Dinas PU PRP
15. Dinas PMPTSP
16. Kecamatan Jorong
17. Kecamatan Panyipatan
18. Kecamatan Batu Ampar
19. Kecamatan Kintap
20. Kecamatan Bajuin
21. Kecamatan Kurau
22. Kecamatan Bumi Makmur
23. Kecamatan Tambang Ulang
24. Kecamatan Bati-Bati
25. Kecamatan Takisung
26. Kecamatan Pelaihari

2. Jumlah Bendahara Penerimaan yang terbina dan memahami mekanisme pelaporan keuangan sesuai ketentuan.

Pembinaan terhadap Bendahara Penerimaan dari 26 (dua puluh enam) SKPD dilaksanakan monitoring penginputan pendapatan ke dalam Aplikasi SIMDA Keuangan telah terealisasi 26 (dua puluh enam) SKPD. Jumlah stakeholder yang difasilitasi dalam penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan. Target kinerja sebanyak 26 Bendahara Penerimaan SKPD telah terealisasi sebesar 100%.

3. Fasilitasi dalam penyelesaian kerugian daerah dengan diselenggarakannya Rapat-rapat Penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diselenggarakan 4 kali. Target kinerja sebanyak 10 SKPD yaitu :
 1. Dinas PU PRP
 2. Sekretariat Daerah
 3. Badan Pendapatan
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 6. BKPSDM
 7. Inspektorat
 8. Dinas Koperasi dan Perdagangan
 9. Dinas Sosial
 10. Dinas Pendidikan

4. Jumlah SKPD yang termonitoring pendapatan dan piutang sesuai ketentuan Monitoring pendapatan dilakukan dengan melakukan pembinaan dan monitoring ke 26 (dua puluh enam) SKPD pengelola Penerimaan SKPD.

5. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pendapatan dan Piutang Pemkab hasil konsolidasi sesuai ketentuan. Target kinerja adalah 3 Dokumen dan telah terealisasi yaitu sebagai berikut :
 1. Dokumen LKPD Pendapatan dan Piutang Unaudit Tahun 2020
 2. Dokumen LKPD Pendapatan dan Piutang Audited Tahun 2020
 3. Dokumen Daftar Piutang Daerah Tahun 2020

6. Jumlah SKPD yang melakukan koordinasi penerimaan pajak daerah atas belanja SKPD Monitoring dan koordinasi penerimaan pajak daerah atas belanja SKPD telah dilaksanakan 3 (kali) kali pada Triwulan I Tahun 2021, Triwulan III Tahun 2021 dan per 30 November 2021. Target kinerja sebanyak 40 SKPD dan telah terealisasi 100%.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021

- 1). Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan Pagu anggaran Sebesar Rp131.017.400,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp125.306.920,00 atau capaian sebesar 95,64%. Target kinerja sebanyak 7 Dokumen telah terealisasi 100 % dengan rincian terdiri dari :

1. Dokumen LKPD Pendapatan dan Piutang Unaudit Tahun 2020
2. Dokumen LKPD Pendapatan dan Piutang Audited Tahun 2020
3. Dokumen Daftar Piutang Daerah Tahun 2020
4. Dokumen Hasil Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Pendapatan Triwulan IV Tahun 2020
5. Dokumen Hasil Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Pendapatan Triwulan I Tahun 2021
6. Dokumen Hasil Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Pendapatan Tw II Tahun 2021
7. Dokumen Hasil Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Pendapatan Tw III Tahun 2021

- 2). Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 46.821.590,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp42.384.000,00 atau capaian sebesar 90,52%. Target Kinerja Sub Kegiatan

ini sebanyak 12 dokumen yaitu 12 Dokumen Rekapitulasi Penyelesaian Kerugian daerah Bulan Januari sd Bulan Desember 2021, sehingga telah terealisasi sebesar 100%.

Selanjutnya pada Sub Kegiatan ini juga telah menetapkan beberapa dokumen kebijakan yang mendukung pada Subbid Akuntansi Pendapatan dan Piutang antara lain yaitu ;

1. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 218 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut .
2. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyampaian Laporan Keuangan dan Aset SKPD secara elektronik atau digitalisasi yaitu dalam rangka mendukung kegiatan Inovasi Reformasi Birokrasi yaitu Penyampaian Pelaporan Keuangan dan Aset SKPD secara Digital (Pelaporan secara elektronik dan digitaliasi).
3. SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/939-KUM/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara atas kerugian daerah yang sudah lunas, yaitu menginformasikan tentang kerugian daerah yang telah selesai pelunasannya.
4. Pada sub Kegiatan ini juga melakukan Rekonsiliasi Pemantauan kerugian daerah dengan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Semester I dan semester II tahun 2021 dengan dihasilkannya Matrik Progres Peyeleasaan Kerugian Daerah di Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 sebagai bahan evaluasi Pimpinan dalam mengambil kebijakan selanjutnya.
5. Telah melaksanakan koordinasi akuntansi penerimaan kas dan pendapatan BLUD untuk Semester I Tahun 2021 dan Tiwulan III Tahun 2021. Melakukan koordinasi penerimaan pajak daerah atas belanja SKPD selama 4 Kali kegiatan dengan hasil 4 Laporan.

6. Telah melakukan rapat penyelesaian kerugian daerah sebanyak 4 kali yaitu (tanggal 16 Februari 2021,10 Juni 2021,10 September 2021 dan 22 Desember 2021) dengan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sesuai SK Bupati Nomor 188.45/280-KUM/2021 tanggal 25 Januari 2021 dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi terhadap SKPD sebagai bahan untuk mengambil kebijakan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah selanjutnya. Sedangkan anggota Tim Penyelesaian TGR adalah sbb :
 1. Sekretaris Daerah
 2. Badan Pendapatan
 3. BPKAD
 4. BKPSDM
 5. Inspektorat
7. Melakukan validasi pendapatan BOS Tahap I bukti surat Nomor 900/828/AKT/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021
8. Melakukan validasi dan verifikasi pendapatan Dana BOS Tahap II dengan bukti surat nomor 900/1181/AKT/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
9. Melakukan rapat koordinasi terkait penyusunan Diskresi atas tindak lanjut temuan pengelolaan Dana Desa.

Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

a. Permasalahan

Masih ada beberapa Bendahara Penerimaan SKPD yang belum memahami Simda Keuangan dikarenakan ada pergantian bendahara penerimaan, input data penerimaan oleh pembantu bendahara penerimaan atau pegawai PTT, sehingga bila ada kesalahan inputan data yang ditemukan oleh Bidang Akuntansi BPKAD akan kesulitan menjelaskan perbedaaan data/kesalahan input data Antara Simda Keuangan dengan Rekening Koran Kas Daerah. Di samping itu kendala yang dihadapi oleh Bendahara Penerimaan dalam

penginputan pendapatan adalah pada waktu menginput pendapatan untuk pengurangan piutang.

b. Upaya Pemecahan Masalah

- Memberikan pembinaan kepada Bendahara Penerimaan tersebut agar bisa memahami inputan data penerimaan pada Simda Keuangan.

Rencana Aksi

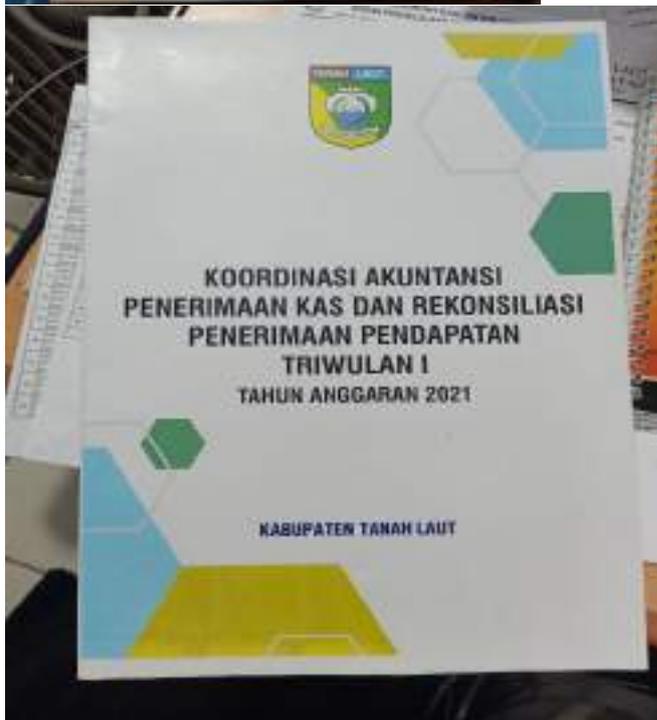
- Mendata Bendahara Penerimaan yang belum memahami Simda Keuangan;
- Mengadakan diskusi permasalahan input data penerimaan pada Simda Keuangan;
- Memberikan bantuan pembelajaran pemahaman Simda Keuangan kepada Bendahara Penerimaan.

Foto - Foto Kegiatan Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Piutang Tahun Anggaran 2021

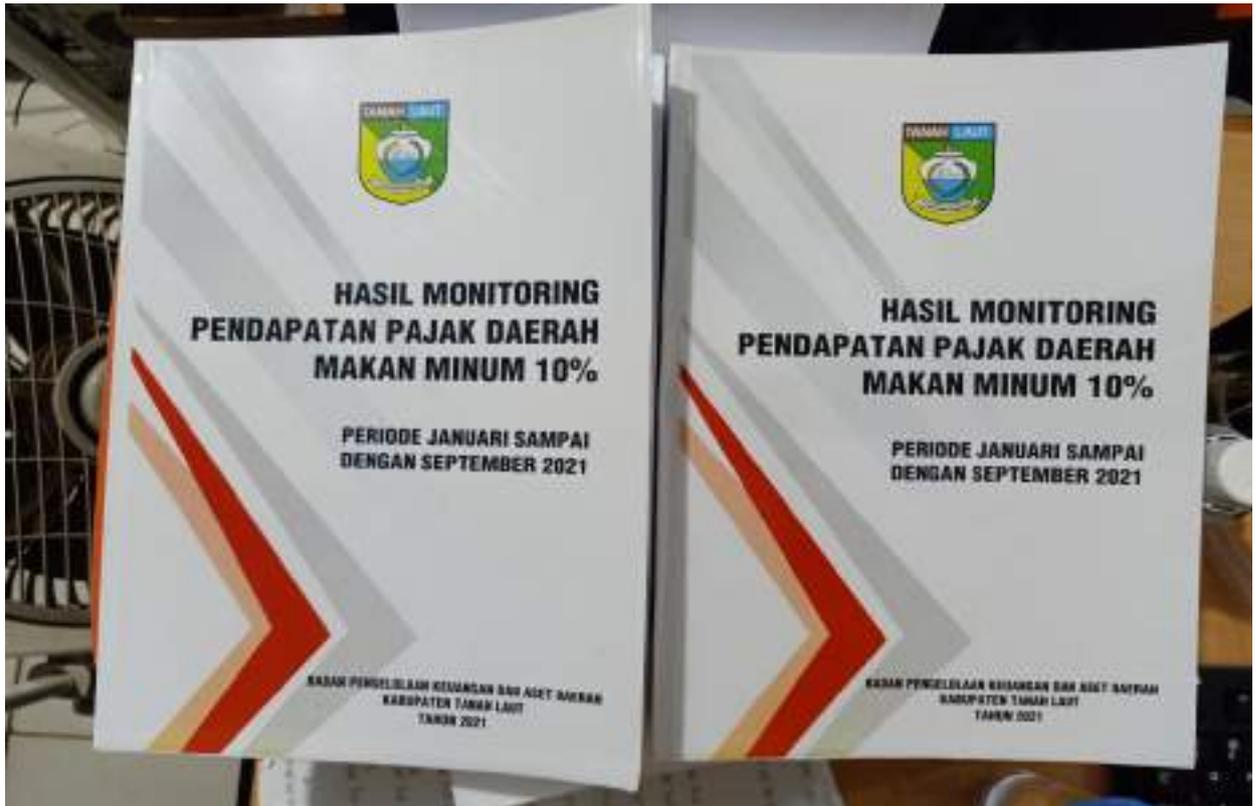
HASIL CETAKAN KEGIATAN KOORDINASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS









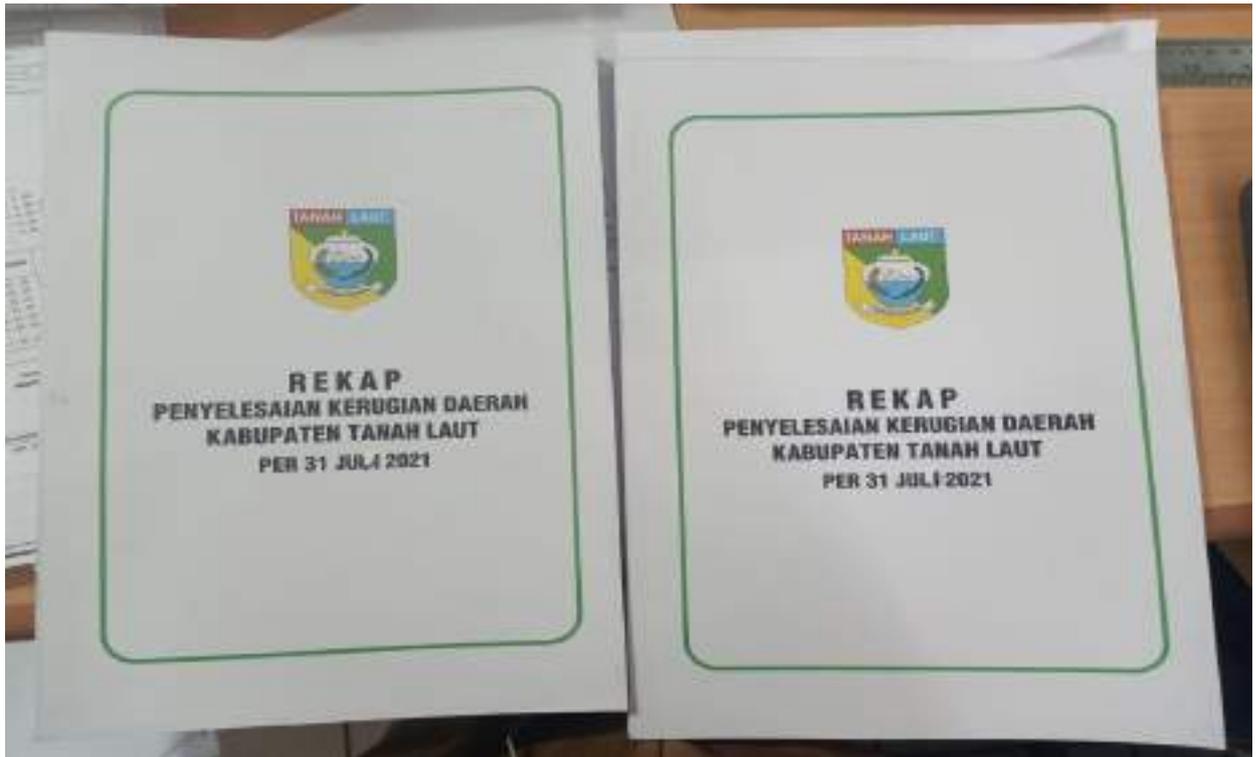


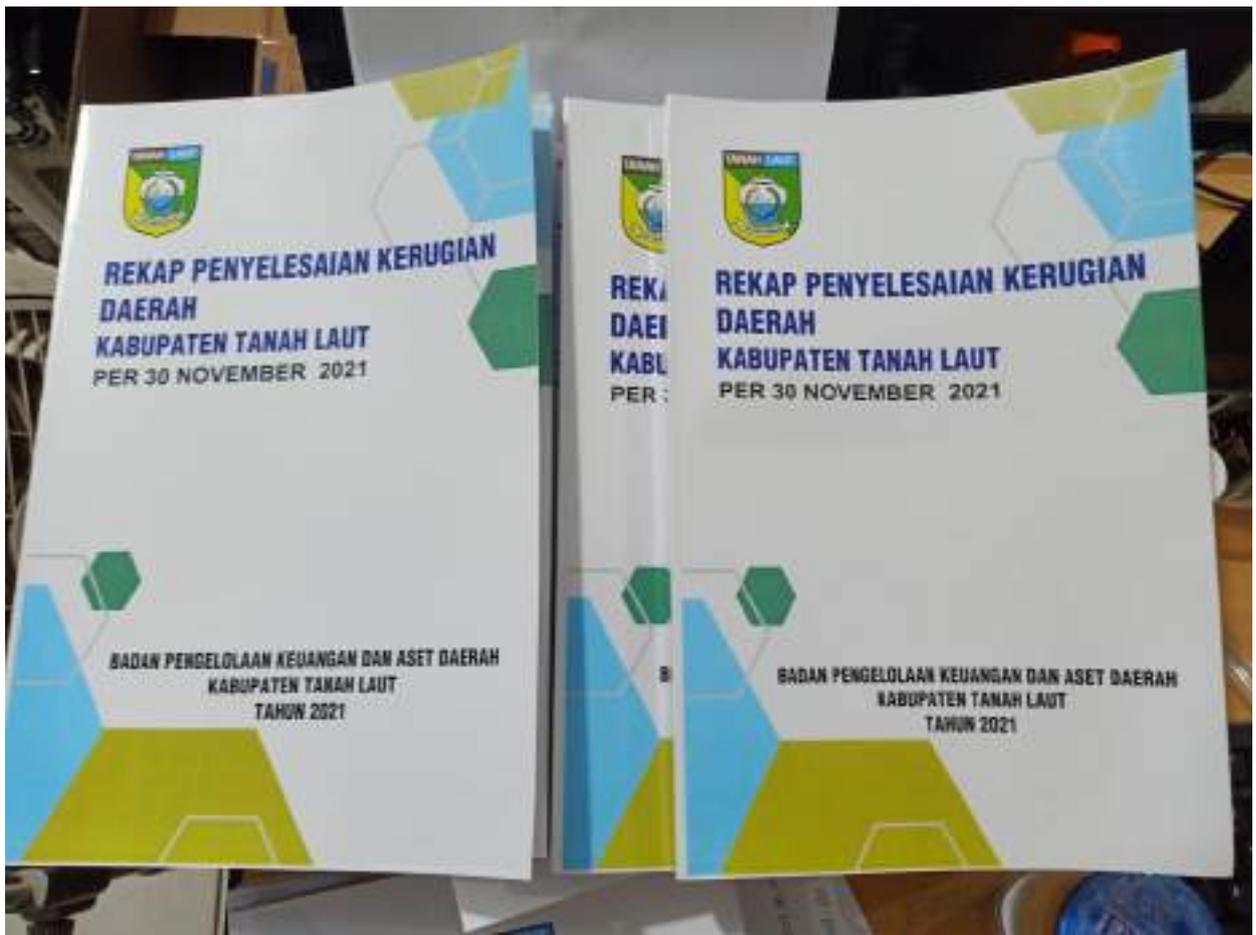
HASIL CETAKAN KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH











FGD AKUNTANSI





KOORDINASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS TRIWULAN IV TAHUN 2020



LKj BPKAD TAHUN 2021



KOORDINASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS TRIWULAN I TAHUN 2021





KOORDINASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS TRIWULAN II TAHUN 2021







KOORDINASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS TRIWULAN III TAHUN 2021





**KOORDINASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DAN PENDAPATAN BLUD
SEMESTER I DAN TRIWULAN III TAHUN 2021**





RAPAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TANGGAL 16 FEBRUARI 2021





RAPAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH 10 JUNI 2021



LKj BPKAD TAHUN 2021



RAPAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH 10 SEPTEMBER 2021







RAPAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH 22 DESEMBER 2021



RAPAT KOORDINASI, PEMBINAAN DAN MONITORING



5.3). Eselon IV. A1 (Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban)

Untuk mendukung Sasaran strategis No 5 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Penatausahaan Aset diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban yaitu dengan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban Tahun 2021 sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan Rekonsiliasi belanja dan beban sesuai ketentuan	1	Jumlah SKPD pengelola belanja dan beban yang telah melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan	40 SKPD	40	100%
2	Melaksanakan Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai ketentuan	2	Jumlah Bendahara Pengeluaran SKPD yang terbina dan memahami mekanisme pelaporan keuangan sesuai ketentuan	40 Bendahara Pengeluaran	40	100%
3	Melaksanakan Pembinaan terhadap SKPD penerima DAK sesuai ketentuan	3	Jumlah SKPD yang telah dibina dan memahami mekanisme teknis penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sesuai ketentuan	16 SKPD	16	100%

4	Melaksanakan monitoring SKPD yang mengelola belanja dan beban sesuai ketentuan	4	Jumlah SKPD yang termonitoring belanja dan beban sesuai ketentuan	40 SKPD	40	100%
5	Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Belanja, Beban dan Aset Pemkab sesuai ketentuan	5	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Belanja, Beban dan Aset Pemkab sesuai ketentuan	4 Dokumen	4	100%
6	Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, DAK Fisik dan DAK Non Fisik atas Realisasi Keuangan Pemkab sesuai ketentuan	6	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, DAK Fisik dan DAK Non Fisik atas Realisasi Keuangan hasil konsolidasi sesuai ketentuan	8 Dokumen	8	100%
7	Melaksanakan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	7	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0	0%

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran RP	Realisasi	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Pengelolaan Keuangan Daerah						

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran RP	Realisasi	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
.1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			103.002.740	96.058.250	93,26%	
		Jumlah dokumen	4 Dok		4 Dok	100%	
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			162.639.360	155.783.340	95,78%	
		Jumlah dokumen	8 Dok		8 Dok	100%	
3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			15.108.940	0	0%	

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran RP	Realisasi	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen	1 Dok		0	0%	

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbid Akuntansi Belanja & Beban Tahun 2021

Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021

- 1). Jumlah SKPD pengelola belanja dan beban yang telah melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebanyak 40 SKPD, telah terealisasi untuk triwulan IV TA 2021 pada bulan Desember 2021.
- 2). Jumlah Bendahara Pengeluaran SKPD yang terbina dan memahami mekanisme pelaporan keuangan sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebanyak 40 Bendahara Pengeluaran, pada triwulan IV TA 2021 sudah dilakukan pembinaan bendahara pengeluaran sampai bulan Desember 2021.
- 3). Jumlah SKPD yang telah dibina dan memahami mekanisme teknis penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebanyak 16 SKPD, sampai triwulan IV TA 2021 sudah semua SKPD menyampaikan laporan tahap 1.
- 4). Jumlah SKPD yang termonitoring belanja dan beban sesuai ketentuan, dengan target kinerja 40 SKPD, sampai triwulan IV TA 2021 telah dilakukan monitoring terhadap belanja SKPD untuk laporan triwulan IV TA 2021.
- 5). Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Belanja, Beban dan Aset Pemkab sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen yaitu (Laporan Hasil Kegiatan, Laporan Hasil Rekonsiliasi Belanja dan Beban dengan SKPD Per-Triwulan, Laporan Hasil Rekonsiliasi Belanja Modal Per-Triwulan dan Laporan Hasil Rekonsiliasi

Pajak Pusat Per-Semester), sampai Triwulan IV Tahun 2021 sudah ada realisasi kinerja 100%.

6). Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, DAK Fisik dan DAK Non Fisik atas Realisasi Keuangan hasil konsolidasi sesuai ketentuan dengan Target Kinerja Sebanyak 8 dokumen yaitu (Laporan Bulanan, Laporan DAK Fisik Kabupaten Tanah Laut, Laporan DAK Non Fisik Kabupaten Tanah Laut, Laporan Hasil Kegiatan Belanja dan Beban, Laporan Keuangan Belanja dan Beban Audited, Laporan Keuangan Belanja dan Beban Unaudit, Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan dan Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis APBD) telah terealisasi seluruhnya sebanyak 8 dokumen, sehingga realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

7). Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan Target Kinerja sebanyak 1 Dokumen, tidak terealisasi karena aplikasi SIPD belum digunakan sepenuhnya untuk penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun Anggaran 2021

1). Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 103.002.740,00 dengan realisasi sd Tw IV sebesar Rp 96.058.250,00 atau capaian sebesar 93,26%. Target kinerja sebanyak 4 Dokumen terdiri dari (Laporan Hasil Kegiatan, Laporan Hasil Rekonsiliasi Belanja dan Beban dengan SKPD Per-Triwulan, Laporan Hasil Rekonsiliasi Belanja Modal Per-Triwulan dan Laporan Hasil Rekonsiliasi Pajak Pusat Per-Semester), sehingga telah terealisasi capaian kinerja sebesar 100%.

2). Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan Pagu anggaran Sebesar Rp162.639.360,00,- dengan realisasi sd Tw IV sebesar

Rp155.783.340,00 atau capaian sebesar 100%. Target kinerja sebanyak 8 dokumen terdiri dari (Laporan Bulanan, Laporan DAK Fisik Kabupaten Tanah Laut, Laporan DAK Non Fisik Kabupaten Tanah Laut, Laporan Hasil Kegiatan Belanja dan Beban, Laporan Keuangan Belanja dan Beban Audited, Laporan Keuangan Belanja dan Beban Unaudit, Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan dan Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis APBD) telah terealisasi seluruhnya sebanyak 8 dokumen, sehingga realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

- 3). Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp15.108.940,00 dengan realisasi sd Tw IV sebesar Rp0,00 atau capaian sebesar 0%. Dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen namun tidak terealisasi dikarenakan belum adanya kepastian mengenai Aplikasi yang digunakan dan selalu ada pemutakhiran kode rekening serta uraian atas rekening belanja dan pendapatan yang dikeluarkan dari Kemendagri, sehingga tidak dapat menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan AKt Pemda Tahun 2021.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

- Sumber Daya Manusia di subbidang akuntansi belanja dan beban masih kurang,
- Terdapat mutasi staf (bendahara pengeluaran) di masing-masing SKPD,
- Pelaporan SIPD masih dalam proses di Kemendagri,
- Ada menu baru dari aplikasi SIMDA Keuangan.

Rencana Aksi

- Memaksimalkan SDM yang ada di subbidang akuntansi belanja dan beban,
- Melakukan Pembinaan untuk meningkatkan kualitas SDM,
- Melakukan koordinasi dengan Kabupaten lain terkait system pelaporan pada aplikasi SIPD,

- Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Foto - Foto Kegiatan Kasubbid Akuntansi Belanja & Beban Triwulan IV TA 2020, Triwulan I s.d IV Tahun Anggaran 2021

1). Rekonsiliasi Keuangan Triwulan IV TA 2020 pada tanggal 29 Maret s.d 1 April 2021



2). Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester 2 TA 2020 pada tanggal 28 Februari 2021



3). Rekonsiliasi Belanja Modal Triwulan I TA 2021 pada tanggal 10, 11 dan 14 Juni 2021





4). Rekonsiliasi Keuangan Triwulan I TA 2021 pada tanggal 21 s.d 24 Juni 2021





5). FGD Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap 1 TA 2021, tanggal 01 Juli 2021



6). Rekonsiliasi Keuangan Triwulan II TA 2021 pada tanggal 02 s.d 05 Agustus 2021





7). Rekonsiliasi Belanja Modal Triwulan II TA 2021 pada tanggal 24, 25 dan 26 Agustus 2021



8). Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester 1 TA 2021 pada tanggal 31 Agustus 2021



**9). Pembinaan penginputan saldo awal, tanggal 09 September 2021
(dibagi 2 sesi yaitu pagi dan sore)**



10). Narasumber Penginputan Saldo Awal di Dinkes, tanggal 24 September 2021



11). Bimbingan Teknis Refocussing dan Realokasi Kegiatan/Anggaran berdasarkan SIMDA Keuangan versi 2.9.0.9, tanggal 28 September 2021



12). Rapat Koordinasi DAK Fisik, DAK Non Fisik dan DID tanggal 01 November 2021



13). Rekonsiliasi Keuangan Triwulan II TA 2021 pada tanggal 01, 02, 03 dan 04 November 2021





14). Rekonsiliasi Belanja Modal Triwulan II TA 2021 pada tanggal 23, 24 dan 25 November 2021



15). *Focus Group Discussion (FGD)* Evaluasi DAK Fisik TA. 2021 dan Persiapan DAK Fisik TA 2022 tanggal 30 Desember 2021



16). Cetakan









6.ESELON III.B (Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset)

2.1.6. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 6

Sasaran Strategis nomor 6 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis nomor 6 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6
Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
6	Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	6	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	%	100	100	100	87	100	114,95	89	30	33,70	90	140	155,55
		7	Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100	0	0
		8	Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	150	150	100	120	120
Rata-rata capaian kinerja							100,00			104,99			61,23			91,85

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan,

Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan dan Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan pada tahun 2019 capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 104,99% dari tahun 2018 terdapat peningkatan kinerja sebesar 4,99%. Namun pada tahun 2020 capaian kinerja mengalami penurunan yaitu 61,23% dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kendala pandemi Covid 19, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kinerja sebesar 91,85% sehingga untuk indikator sasaran strategis no 6 yaitu presentase BMD (Tanah) yang memiliki sertifikat sesuai ketentuan hanya tercapai 140% dari target sebesar 90%, atau capaian sebesar 155,55% hal ini dikarenakan adanya dukungan dari Pihak BPN, kemudian indikator sasaran strategis no 7 yaitu Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan tidak tercapai atau 0% dikarenakan pelaksanaan pengajuan permohonan duplikasi BPKB BMD (Kendaraan Bermotor) dari target 2 buah, realisasi 0 buah (tidak dapat realisasi). Pengajuan permohonan duplikasi BPKB kendaraan dinas bermotor tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. sehingga kedua sasaran Kepala Bidang PPA tersebut tidak tercapai targetnya atau mengalami penurunan kinerja. Namun pada indikator sasaran strategis no 8 milik Kepala Bidang PPA mengalami kenaikan capaian pada tahun 2021 yaitu sebesar 120%, hal ini dikarenakan dari target BMD sebesar 10 telah tercapai sebesar 12 yang dipelihara, sehingga dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan kinerja. Sehingga secara keseluruhan untuk sasaran strategis no 6 Kepala Bidang PPA pada tahun 2021 capaian kinerjanya mengalami peningkatan kinerja sebesar 30,62%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 6 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021

6.1). ESELON IV.A1 (Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan)

Untuk mendukung Sasaran strategis No 6 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan yaitu dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan Tahun 2021 sesuai dengan Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan pengajuan permohonan penyertifikatan BMD (Tanah) sesuai ketentuan	1	Jumlah BMD (Tanah) yang telah memenuhi persyaratan penyertifikatan sesuai ketentuan	30 Persil BMD	42 Persil BMD	140%
2	Melaksanakan pengajuan permohonan duplikasi BPKB BMD (Kendaraan Bermotor) sesuai ketentuan	2	Jumlah BMD (Kendaraan Bermotor) yang telah memenuhi persyaratan Duplikasi BPKB sesuai ketentuan	2 Buah BMD	0 Buah BMD	0%
3	Melaksanakan Rekonsiliasi/Verifikasi Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	3	Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi/verifikasi pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	41 SKPD	41 SKPD	100%
4	Melaksanakan Penelusuran BMD yang	4	Jumlah BMD yang ditelusuri sesuai ketentuan	10 Lokasi	4 Lokasi	40%

	belum jelas lokasinya sesuai ketentuan					
5	Melaksanakan Pemeliharaan BMD-PPKD sesuai ketentuan	5	Jumlah BMD-PPKD yang dipelihara sesuai ketentuan	10 Buah BMD	12 Buah BMD	120%
6	Melaksanakan Penguasaan Fisik BMD-PPKD sesuai ketentuan	6	Jumlah BMD-PPKD yang dikuasai fisiknya sesuai ketentuan	40 Buah BMD	40 Buah BMD	100%
7	Melaksanakan monitoring BMD yang dikuasai sesuai ketentuan	7	Jumlah BMD yang dikuasai dimonitoring sesuai ketentuan	50 Kali	75 Kali	150%

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Targ et Kinerja	Anggaran Rp	Realisasi	Capa ian %	K et
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						
A.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah						
1	Pengamanan Barang Milik Daerah			1.155.051.859	719.530.370	62,29 %	
		Jumlah buku rekonsiliasi pengamanan dan pemeliharaan BMD	5 buku		5 buku	100%	

		Jumlah Pembuatan Papan Nama Kepemilikan TMD	40 buah		40 buah	100%	
		Jumlah Pembuatan Patok Tanda Batas TMD	80 buah		80 buah	100%	
		Jumlah Penyelesaian Penyertifikatan	1 LS		1 LS	100%	
		Jumlah Permohonan BPKB Duplikat	2 permohonan		0 permohonan	0%	
		Jumlah Permohonan Penyertifikatan	30 permohonan		42 permohonan	140%	
2	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			2.241.836.065	2.162.106.340	96,44 %	
		Jumlah Buku Hasil Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	1 Dok		1 Dok	100%	
		Jumlah Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor	5 buah alat angkutan		6 buah alat angkutan	120%	
		Jumlah Pemeliharaan Rumah Negara	5 buah ruma		6 buah rumah negara	120%	

			h negar a				
		Jumlah Rehab Rumah Negara	1 buah ruma h negar a		1 buah rumah negara	100%	

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan Tahun 2021

Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021

1. Jumlah BMD (Tanah) yang telah memenuhi persyaratan penyertifikatan sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 30 persil, realisasi sebanyak 42 persil permohonan penyertifikatan pada tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut peruntukkan :
 - 1) Pendopo Makam Keramat Tabanio dengan luas tanah 10.000 m²
 - 2) Polindes Benua Lawas dengan luas tanah 178,5 m²
 - 3) Rumah Dinas Paramedis Padang Luas dengan luas tanah 223,12 m²
 - 4) SMPN 10 Pelaihari dengan luas tanah 10.372,5 m²
 - 5) Gedung Olahraga Asam Jaya dengan luas tanah 1.000 m²
 - 6) Pendopo Makam Keramat Handil Birayang Bawah dengan luas tanah 2.112 m²
 - 7) Pustu Bawah Layung dengan luas tanah 365 m²
 - 8) Puskesmas Bentok Kampung dengan luas tanah 6.400 m²
 - 9) SMPN 3 Jorong (Tambahan) dengan luas tanah 4.692 m²
 - 10) Perumahan Nelayan Muara Kintap dengan luas tanah 20.188 m²
 - 11) Rencana RS Bumi Makmur dengan luas tanah 18.925 m²
 - 12) Lapangan Sepak Bola Sungai Rasau dengan luas tanah 9.672 m²
 - 13) Sekaya Maritim Muara Kintap dengan luas tanah 326 m²
 - 14) SDN Kintap 2 dengan luas tanah 8.748 m²
 - 15) Jalan Masuk RSUD H. Boejasin (Pengadaan Tanah) dengan luas tanah 3.486 m²
 - 16) Tanah Kantor Disnakerperin dengan luas tanah 1.000 m²
 - 17) Kolam Renang Tirta Kenanga dengan luas tanah 10.945 m²
 - 18) Kawasan Perumahan Dinas Jl. Hutan Kota (Lokasi 2) dengan luas tanah 1.845 m²
 - 19) Rumdin Polres dengan luas tanah 457 m²

- 20)Pustu Batilai dengan luas tanah 221 m²
- 21)Pasar Martadah Baru dengan luas tanah 11.570 m²
- 22)Rumdin SDN 4 Jorong dengan luas tanah 4.319 m²
- 23)Kantor UPT KB Kec. Panyipatan dengan luas tanah 268 m²
- 24)Tanah ex. Transmigrasi (Lapangan RW.9) dengan luas tanah 12.180 m²
- 25)Tanah ex. Transmigrasi (Tanah Kas Desa RW.9) dengan luas tanah 8.844 m²
- 26)Tanah ex. Transmigrasi (4 Buah Bangunan) dengan luas tanah 15.484 m²
- 27)Hibah PT. Arutmin (Rencana Pasar Hewan Telaga) dengan luas tanah 50.431 m²
- 28)SDN Pemuda dengan luas tanah 4.160 m²
- 29)Fasum Taman Pelangi dengan luas tanah 25 m²
- 30)Lapangan Sepak Bola Kelurahan Pabahanan dengan luas tanah 11.050 m²
- 31)Tanah Kas Kelurahan Pabahanan (Posyandu & Bank Sampah) dengan luas tanah 4.466 m²
- 32)Tanah Kas Kelurahan Pabahanan (Lahan Kosong) dengan luas tanah 3.022 m²
- 33)Tanah Kas Kelurahan Pabahanan (Tanah untuk Jalan) dengan luas tanah 465 m²
- 34)Rencana Kantor Camat Panyipatan dengan luas tanah 19.640 m²
- 35)Rumdin SDN Gunung Mas dengan luas tanah 3.000 m²
- 36)Rumdin SDN Angsau 3 dengan luas tanah 348 m²
- 37)Tanah Gunung Khayangan (Lokasi 1) dengan luas tanah 80.600 m²
- 38)Tanah Gunung Khayangan (Lokasi 2) dengan luas tanah 80.500 m²
- 39)Tanah Gunung Khayangan (Lokasi 3) dengan luas tanah 79.900 m²
- 40)Tanah Gunung Khayangan (Lokasi 4) dengan luas tanah 80.200 m²
- 41)Tanah Gunung Khayangan (Lokasi 5) dengan luas tanah 86.200 m²
- 42)Tanah Gunung Khayangan (Lokasi 6) dengan luas tanah 82.400 m².

2. Jumlah BMD (Kendaraan Bermotor) yang telah memenuhi persyaratan Duplikasi BPKB sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 2 permohonan realisasi masih 0%, dikarenakan BPKB yang dimohonkan untuk pembuatan BPKB Duplikat telah ditemukan setelah dilakukan pemasangan pengumuman di media massa, sehingga proses pembuatan BPKB Duplikat dibatalkan.
3. Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi/verifikasi pemeliharaan BMD sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 41 SKPD realisasi mencapai 100%.
4. Jumlah BMD yang ditelusuri sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 10 lokasi realisasi 40%, dikarenakan kurangnya kerjasama pihak ketiga/masyarakat dalam membantu/menunjukkan lokasi dan batas-batas tanah.

5. Jumlah BMD-PPKD yang dipelihara sesuai ketentuan dengan target 10 buah BMD dengan rincian 5 buah kendaraan dinas dan 5 buah rumah negara, realisasi 120% atau 12 buah BMD berupa 6 buah kendaraan dinas PPKD yang dipelihara yaitu mobil PPKD DA 358 LA/DA 1369 LM, DA 42 L, DA 1024 LZ, DA 239 L, DA 987 L dan DA 110 L. Serta 6 buah bangunan rumah negara yaitu rumah negara nomor 50.13.01/0005, 50.13.01/0006, 50.13.01/0012, 50.13.01/0013, 50.13.01/0030-50.13.01/0036 dan 50.13.01/0037-50.13.01/0041.
6. Jumlah BMD-PPKD yang dikuasai fisiknya sesuai ketentuan dengan target 40 Buah BMD, realisasi masih 100%, yaitu berupa terlaksananya pemasangan Papan Nama Kepemilikan sebanyak 40 buah pada lokasi tanah :
 - 1) Tanah peruntukkan Tanah Pemda (Hibah PT. Arutmin) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
 - 2) Tanah peruntukkan Gedung Olahraga Asam Jaya sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
 - 3) Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Asri Mulya sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
 - 4) Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Muara Asam-asam sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
 - 5) Tanah peruntukkan Polindes Damar Lima sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
 - 6) Tanah peruntukkan Polindes Tajau Pecah sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
 - 7) Tanah peruntukkan Kas Desa Ambawang HP.2 sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
 - 8) Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Pagatan Besar HP.1 sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
 - 9) Tanah peruntukkan Tanah TCUN Desa Pagatan Besar sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
 - 10) Tanah peruntukkan Objek Wisata Batu Lima sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
 - 11) Tanah peruntukkan Polindes Benua Lawas sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
 - 12) Tanah peruntukkan Pendopo Makam Keramat Tabanio sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
 - 13) Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Ranggung sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
 - 14) Tanah peruntukkan Rumah Dinas Belakang Kecamatan Bati-bati sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan

- 15) Tanah peruntukkan Lapangan Sepak Bola Desa Padang sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 16) Tanah peruntukkan Pasar Banyu Irang sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 17) Tanah peruntukkan Rumdin Guru SDN Banyu Irang 1 sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 18) Tanah peruntukkan Rencana Puskesmas Bentok Kampung sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 19) Tanah peruntukkan Rumdin Paramedis Padang Luas sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 20) Tanah peruntukkan Pasar Bawah Layung sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 21) Tanah peruntukkan Eks. Pasar Tambang Ulang (Sentra IKM Disnakerperin Kab. Tanah Laut) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 22) Tanah peruntukkan Tanah Kosong Eks. PTPN XIII Lokasi (11) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 23) Tanah peruntukkan Rencana Kantor Camat Panyipatan sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 24) Tanah peruntukkan Eks. Transmigrasi (Eks. Gudang/Kantor Ulat Sutera) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 25) Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (Lapangan Sepak Bola Sukaramah) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 26) Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (Tanah Kering/Fasum) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 27) Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (Eks. Gudang Logistik) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 28) Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (Puskesmas Eks. Transmigrasi) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 29) Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (Rumah Dinas SDN Sukaramah) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 30) Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (Rumah Dinas Guru) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 31) Tanah peruntukkan Kantor UPT KB Kec. Panyipatan sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 32) Tanah peruntukkan Eks. Transmigrasi (Koperasi Unit Desa) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 33) Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi Lapangan Sepak Bola (Sebrang SMA Panyipatan) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan

- 34) Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (Rumah Dinas) Batu Mulya sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 35) Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (Perladangan Tanah Kas Pemuda Dusun Sundawa RT 05) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 36) Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (Pekuburan Dusun Sundawa RT 05) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 37) Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (TK & Rumah Dinas) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
- 38) Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Batu Mulya sebanyak 2 buah papan nama kepemilikan
- 39) Tanah peruntukkan Tanah Eks. PTPN XIII (Dibelakang Pembekal Alus) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan

Serta pemasangan Patok Tanda Batas Tanah sebanyak 80 buah pada lokasi tanah :

- 1) Tanah peruntukkan Tanah Pemda (Hibah PT. Arutmin) sebanyak 4 buah patok tanda batas
- 2) Tanah peruntukkan Poskeskel Angsau sebanyak 2 buah patok tanda batas
- 3) Tanah peruntukkan Tanah Kosong Eks. PTPN XIII Lokasi 1 (Setelah MAN IC) sebanyak 4 buah patok tanda batas
- 4) Tanah peruntukkan Tanah Kosong Eks. PTPN XIII Lokasi 4 sebanyak 2 buah patok tanda batas
- 5) Tanah peruntukkan Tanah Kosong Eks. PTPN XIII Lokasi 5 sebanyak 5 buah patok tanda batas
- 6) Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Asri Mulya (Pecahan Kantor Desa Asri Mulya) sebanyak 6 buah patok tanda batas
- 7) Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Muara Asam-asam sebanyak 2 buah patok tanda batas
- 8) Tanah peruntukkan Polindes Tajau Pecah sebanyak 4 buah patok tanda batas
- 9) Tanah peruntukkan Kas Desa Ambawang HP.2 sebanyak 6 buah patok tanda batas
- 10) Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Pagatan Besar HP.1 sebanyak 4 buah patok tanda batas
- 11) Tanah peruntukkan Tanah TCUN Desa Pagatan Besar sebanyak 2 buah patok tanda batas
- 12) Tanah peruntukkan Objek Wisata Batu Lima sebanyak 4 buah patok tanda batas
- 13) Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Ranggung sebanyak 5 buah patok tanda batas

- 14) Tanah peruntukkan Rencana Puskesmas Bentok Kampung sebanyak 4 buah patok tanda batas
 - 15) Tanah peruntukkan Rumdin Paramedis Padang Luas sebanyak 2 buah patok tanda batas
 - 16) Tanah peruntukkan Rencana Kantor Camat Panyipatan sebanyak 6 buah patok tanda batas
 - 17) Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Batu Mulya sebanyak 4 buah patok tanda batas
 - 18) Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (4 Bangunan Rumdin) sebanyak 4 buah patok tanda batas
 - 19) Tanah peruntukkan Rencana Terminal Ambungan sebanyak 2 buah patok tanda batas
 - 20) Tanah peruntukkan Tanah Eks. PTPN XIII (Dibelakang Pembekal Alus) sebanyak 2 buah patok tanda batas
 - 21) Tanah peruntukkan Tanah Eks. PTPN XIII (Gunung Khayangan Belakang Rest Area) sebanyak 1 buah patok tanda batas
 - 22) Tanah peruntukkan RSUD Kintap Type D sebanyak 5 buah patok tanda batas
7. Jumlah BMD yang dikuasai dimonitoring sesuai ketentuan dengan target 50 Kali, realisasi 75 kali atau 150%.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2021

- 1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.155.051.859,- realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 719.530.370,- atau sebesar 62,29%, dengan tolak ukur kinerja sebagai berikut :
- 1) Jumlah buku rekonsiliasi pengamanan dan pemeliharaan BMD, dengan target 5 buku realisasi 5 buku atau 100%. Sedangkan 5 buku yang dimaksud adalah buku hasil Rekonsiliasi Pengamanan dan pemeliharaan yang dilaksanakan dengan seluruh SKPD setiap Triwulan tahun 2021.
 - 2) Jumlah Pembuatan Papan Nama Kepemilikan TMD, dengan target 40 buah realisasi 40 buah atau 100%, dengan rincian pembuatan papan nama kepemilikan pada tanah milik Pemerintah Kab. Tanah Laut sebagai berikut :
 1. Tanah peruntukkan Tanah Pemda (Hibah PT. Arutmin) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
 2. Tanah peruntukkan Gedung Olahraga Asam Jaya sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan

3. Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Asri Mulya sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
4. Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Muara Asam-asam sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
5. Tanah peruntukkan Polindes Damar Lima sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
6. Tanah peruntukkan Polindes Tajau Pecah sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
7. Tanah peruntukkan Kas Desa Ambawang HP.2 sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
8. Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Pagatan Besar HP.1 sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
9. Tanah peruntukkan Tanah TCUN Desa Pagatan Besar sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
10. Tanah peruntukkan Objek Wisata Batu Lima sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
11. Tanah peruntukkan Polindes Benua Lawas sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
12. Tanah peruntukkan Pendopo Makam Keramat Tabanio sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
13. Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Ranggung sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
14. Tanah peruntukkan Rumah Dinas Belakang Kecamatan Bati-bati sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
15. Tanah peruntukkan Lapangan Sepak Bola Desa Padang sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
16. Tanah peruntukkan Pasar Banyu Irang sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
17. Tanah peruntukkan Rumdin Guru SDN Banyu Irang 1 sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
18. Tanah peruntukkan Rencana Puskesmas Bentok Kampung sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
19. Tanah peruntukkan Rumdin Paramedis Padang Luas sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
20. Tanah peruntukkan Pasar Bawah Layung sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
21. Tanah peruntukkan Eks. Pasar Tambang Ulang (Sentra IKM Disnakerperin Kab. Tanah Laut) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan

22. Tanah peruntukkan Tanah Kosong Eks. PTPN XIII Lokasi (11) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
23. Tanah peruntukkan Rencana Kantor Camat Panyipatan sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
24. Tanah peruntukkan Eks. Transmigrasi (Eks. Gudang/Kantor Ulut Sutera) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
25. Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (Lapangan Sepak Bola Sukaramah) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
26. Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (Tanah Kering/Fasum) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
27. Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (Eks. Gudang Logistik) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
28. Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (Puskesmas Eks. Transmigrasi) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
29. Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (Rumah Dinas SDN Sukaramah) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
30. Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (Rumah Dinas Guru) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
31. Tanah peruntukkan Kantor UPT KB Kec. Panyipatan sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
32. Tanah peruntukkan Eks. Transmigrasi (Koperasi Unit Desa) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
33. Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi Lapangan Sepak Bola (Sebrang SMA Panyipatan) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
34. Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (Rumah Dinas) Batu Mulya sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
35. Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (Perladangan Tanah Kas Pemuda Dusun Sundawa RT 05) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
36. Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (Pekuburan Dusun Sundawa RT 05) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
37. Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (TK & Rumah Dinas) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan
38. Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Batu Mulya sebanyak 2 buah papan nama kepemilikan
39. Tanah peruntukkan Tanah Eks. PTPN XIII (Dibelakang Pembekal Alus) sebanyak 1 buah papan nama kepemilikan

- 3) Jumlah Pembuatan Patok Tanda Batas TMD, dengan target 80 buah realisasi 80 buah atau 100%, dengan rincian pembuatan patok tanda batas TMD pada tanah milik Pemerintah Kab. Tanah Laut sebagai berikut :
1. Tanah peruntukkan Tanah Pemda (Hibah PT. Arutmin) sebanyak 4 buah patok tanda batas
 2. Tanah peruntukkan Poskeskel Angsau sebanyak 2 buah patok tanda batas
 3. Tanah peruntukkan Tanah Kosong Eks. PTPN XIII Lokasi 1 (Setelah MAN IC) sebanyak 4 buah patok tanda batas
 4. Tanah peruntukkan Tanah Kosong Eks. PTPN XIII Lokasi 4 sebanyak 2 buah patok tanda batas
 5. Tanah peruntukkan Tanah Kosong Eks. PTPN XIII Lokasi 5 sebanyak 5 buah patok tanda batas
 6. Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Asri Mulya(Pecahan Kantor Desa Asri Mulya) sebanyak 6 buah patok tanda batas
 7. Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Muara Asam-asam sebanyak 2 buah patok tanda batas
 8. Tanah peruntukkan Polindes Tajau Pecah sebanyak 4 buah patok tanda batas
 9. Tanah peruntukkan Kas Desa Ambawang HP.2 sebanyak 6 buah patok tanda batas
 10. Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Pagatan Besar HP.1 sebanyak 4 buah patok tanda batas
 11. Tanah peruntukkan Tanah TCUN Desa Pagatan Besar sebanyak 2 buah patok tanda batas
 12. Tanah peruntukkan Objek Wisata Batu Lima sebanyak 4 buah patok tanda batas
 13. Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Ranggung sebanyak 5 buah patok tanda batas
 14. Tanah peruntukkan Rencana Puskesmas Bentok Kampung sebanyak 4 buah patok tanda batas
 15. Tanah peruntukkan Rumdin Paramedis Padang Luas sebanyak 2 buah patok tanda batas
 16. Tanah peruntukkan Rencana Kantor Camat Panyipatan sebanyak 6 buah patok tanda batas
 17. Tanah peruntukkan Tanah Kas Desa Batu Mulya sebanyak 4 buah patok tanda batas
 18. Tanah peruntukkan Tanah Eks. Transmigrasi (4 Bangunan Rumdin) sebanyak 4 buah patok tanda batas

19. Tanah peruntukkan Rencana Terminal Ambungan sebanyak 2 buah patok tanda batas
 20. Tanah peruntukkan Tanah Eks. PTPN XIII (Dibelakang Pembekal Alus) sebanyak 2 buah patok tanda batas
 21. Tanah peruntukkan Tanah Eks. PTPN XIII (Gunung Khayangan Belakang Rest Area) sebanyak 1 buah patok tanda batas
 22. Tanah peruntukkan RSUD Kintap Type D sebanyak 5 buah patok tanda batas
- 4) Jumlah Penyelesaian Penyertifikatan, dengan target 1 LS realisasi 100%.
 - 5) Jumlah Permohonan BPKB Duplikat, dengan target 2 permohonan realisasi 0% dikarenakan BPKB yang dimohonkan untuk pembuatan BPKB Duplikat telah ditemukan setelah dilakukan pemasangan pengumuman di media massa, sehingga proses pembuatan BPKB Duplikat dibatalkan.
 - 6) Jumlah Permohonan Penyertifikatan, dengan target 30 permohonan, Jumlah BMD (Tanah) yang telah memenuhi persyaratan penyertifikatan sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 30 persil, realisasi sebanyak 42 persil permohonan penyertifikatan pada tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut peruntukkan :
 1. Pendopo Makam Keramat Tabanio dengan luas tanah 10.000 m²
 2. Polindes Benua Lawas dengan luas tanah 178,5 m²
 3. Rumah Dinas Paramedis Padang Luas dengan luas tanah 223,12 m²
 4. SMPN 10 Pelaihari dengan luas tanah 10.372,5 m²
 5. Gedung Olahraga Asam Jaya dengan luas tanah 1.000 m²
 6. Pendopo Makam Keramat Handil Birayang Bawah dengan luas tanah 2.112 m²
 7. Pustu Bawah Layung dengan luas tanah 365 m²
 8. Puskesmas Bentok Kampung dengan luas tanah 6.400 m²
 9. SMPN 3 Jorong (Tambahan) dengan luas tanah 4.692 m²
 10. Perumahan Nelayan Muara Kintap dengan luas tanah 20.188 m²
 11. Rencana RS Bumi Makmur dengan luas tanah 18.925 m²
 12. Lapangan Sepak Bola Sungai Rasau dengan luas tanah 9.672 m²
 13. Sekaya Maritim Muara Kintap dengan luas tanah 326 m²
 14. SDN Kintap 2 dengan luas tanah 8.748 m²
 15. Jalan Masuk RSUD H. Boejasin (Pengadaan Tanah) dengan luas tanah 3.486 m²
 16. Tanah Kantor Disnakerperin dengan luas tanah 1.000 m²

17. Kolam Renang Tirta Kenanga dengan luas tanah 10.945 m²
18. Kawasan Perumahan Dinas Jl. Hutan Kota (Lokasi 2) dengan luas tanah 1.845 m²
19. Rumdin Polres dengan luas tanah 457 m²
20. Pustu Batilai dengan luas tanah 221 m²
21. Pasar Martadah Baru dengan luas tanah 11.570 m²
22. Rumdin SDN 4 Jorong dengan luas tanah 4.319 m²
23. Kantor UPT KB Kec. Panyipatan dengan luas tanah 268 m²
24. Tanah ex. Transmigrasi (Lapangan RW.9) dengan luas tanah 12.180 m²
25. Tanah ex. Transmigrasi (Tanah Kas Desa RW.9) dengan luas tanah 8.844 m²
26. Tanah ex. Transmigrasi (4 Buah Bangunan) dengan luas tanah 15.484 m²
27. Hibah PT. Arutmin (Rencana Pasar Hewan Telaga) dengan luas tanah 50.431 m²
28. SDN Pemuda dengan luas tanah 4.160 m²
29. Fasum Taman Pelangi dengan luas tanah 25 m²
30. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Pabahanan dengan luas tanah 11.050 m²
31. Tanah Kas Kelurahan Pabahanan (Posyandu & Bank Sampah) dengan luas tanah 4.466 m²
32. Tanah Kas Kelurahan Pabahanan (Lahan Kosong) dengan luas tanah 3.022 m²
33. Tanah Kas Kelurahan Pabahanan (Tanah untuk Jalan) dengan luas tanah 465 m²
34. Rencana Kantor Camat Panyipatan dengan luas tanah 19.640 m².
35. Rumdin SDN Gunung Mas dengan luas tanah 3.000 m²
36. Rumdin SDN Angsau 3 dengan luas tanah 348 m²
37. Tanah Gunung Khayangan (Lokasi 1) dengan luas tanah 80.600 m²
38. Tanah Gunung Khayangan (Lokasi 2) dengan luas tanah 80.500 m²
39. Tanah Gunung Khayangan (Lokasi 3) dengan luas tanah 79.900 m²
40. Tanah Gunung Khayangan (Lokasi 4) dengan luas tanah 80.200 m²
41. Tanah Gunung Khayangan (Lokasi 5) dengan luas tanah 86.200 m²
42. Tanah Gunung Khayangan (Lokasi 6) dengan luas tanah 82.400 m².

2. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.241.836.065,- realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 2.162.106.340 atau sebesar 96,44%, dengan tolak ukur kinerja sebagai berikut :

- 1) Jumlah Buku Hasil Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD, dengan target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen atau 0%.
- 2) Jumlah Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor, dengan target 5 buah alat angkutan realisasi 6 buah alat angkutan atau 120% yaitu pemeliharaan mobil PPKD DA 358 LA/DA 1369 LM, DA 42 L, DA 1024 LZ, DA 239 L, DA 987 L dan DA 110 L.
- 3) Jumlah Pemeliharaan Rumah Negara, dengan target 5 buah rumah negara realisasi realisasi sebesar 6 buah rumah negara yang sudah dipelihara atau sebesar 120% yaitu rumah negara yang berlokasi di Jln. Hutan Kota Kelurahan Angsau dengan nomor 50.13.01/0005, 50.13.01/0006, 50.13.01/0012, 50.13.01/0013, dan rumah negara yang berlokasi di Jln. Karya Kelurahan Pelaihari dengan nomor 50.13.01/0030-50.13.01/0036, serta rumah negara yang berlokasi di Jln. Pasar Hewan Kelurahan Pelaihari dengan nomor 50.13.01/0037-50.13.01/0041
- 4) Jumlah Rehab Rumah Negara, dengan target 1 buah rumah negara realisasi fisik sudah mencapai 100%.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

1. Kondisi Pandemi Covid-19 yang masih merebak di Kabupaten Tanah Laut sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan.
2. Banyaknya jumlah aset yang besar dan lokasi yang menyebar di 11 kecamatan, sehingga memerlukan waktu dan SDM yang lebih.
3. Kurangnya kerjasama SKPD/instansi terkait dalam pendataan/penelusuran aset-aset yang belum memiliki bukti kepemilikan.
4. Kurangnya kerjasama masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam melengkapi berkas administrasi pengamanan aset.
5. Terbatasnya SDM di Subbid Pengamanan dan Pemeliharaan.
6. Adanya ancaman/tekanan dari pihak ketiga/masyarakat dalam penertiban dan pengamanan aset.

Rencana Aksi

- 1) Membuat permohonan penambahan SDM serta meningkatkan kinerja SDM yang sudah ada.

- 2) Membuat permohonan petugas keamanan ke instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan aset.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pendataan/penelusuran asset-aset yang belum memiliki bukti kepemilikan.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal terkait dalam percepatan penyelesaian pengamanan BMD.
- 5) Melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak ketiga/masyarakat dalam tertib administrasi kelengkapan berkas pengamanan BMD.

Foto - Foto Kegiatan



Monitoring pengamanan BMD



Monitoring pengamanan BMD



Koordinasi dengan instansi vertikal



Koordinasi dengan instansi vertikal



Monitoring pengamanan BMD



Koordinasi dengan masyarakat



Monitoring pengamanan BMD



Monitoring pengamanan BMD



Rapat Koordinasi dengan instansi terkait



Monitoring pengamanan BMD



Monitoring pengamanan BMD



Rapat koordinasi dengan instansi terkait



Rekonsiliasi Pengamanan&Pemeliharaan



Rekonsiliasi Pengamanan&Pemeliharaan



Koordinasi dengan instansi terkait



Koordinasi dengan instansi terkait



Pemeliharaan Mobil Dinas PPKD



Pemeliharaan Rumah Negara PPKD



Pengadaan Trail (untuk kecamatan)



Pengadaan Kendaraan Alat Angkutan (Double Cabin)

6.ESELON III.B (Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset)

2.1.7. Analisa_Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 7

Sasaran Strategis nomor 7 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani

Sasaran strategis nomor 7 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7
Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
7	Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	9	Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100,00			100,00			100,00			100,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan yang telah dipelihara sesuai ketentuan capaian kinerjanya trend dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%, yaitu dengan telah tersajinya instrumen standar satuan harga sebagai standar atau pedoman dalam penganggaran belanja di Kabupaten Tanah Laut. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 7 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Perencanaan Kebutuhan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan dibawah ini.

6.2). ESELON IV.A1 (Kasubbid Perencanaan Kebutuhan)

Untuk mendukung Sasaran strategis No 7 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Perencanaan Kebutuhan yaitu dengan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Perencanaan Kebutuhan Tahun 2021 sesuai dengan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	1	Jumlah SKPD yang melakukan penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
2	Melaksanakan penyusunan Standar Satuan Harga sesuai ketentuan	2	Jumlah Dokumen Buku Standar Satuan Harga sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	Melaksanakan Pembuatan Standar Kebutuhan Barang sesuai ketentuan	3	Jumlah Dokumen Buku Standar Kebutuhan Barang sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	100%
4	Melaksanakan Rekonsiliasi/Verifikasi Barang Pakai Habis dan RKBMD sesuai ketentuan	4	Jumlah SKPD yang direkonsiliasi/verifikasi Barang Pakai Habis sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
5	Melaksanakan Penyusunan Beban Persediaan sesuai ketentuan	5	Jumlah dokumen Beban Persediaan sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	100%

LKj BPKAD TAHUN 2021

6	Melaksanakan Sosialisasi Standar Satuan Harga dan Perbup sesuai ketentuan	6	Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi Standar Satuan Harga dan Perbup sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
7	Melaksanakan Monitoring Barang Pakai Habis sesuai ketentuan	7	Jumlah Barang Pakai Habis SKPD yang telah termonitoring sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran RP	Realisasi	Capaian %	Ke t
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						
A.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah						
1	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			41.943.640	39.678.300	94,5%	
		Jumlah dokumen	3 Dok		3 Dok	100%	
2	Penyusunan Standar Harga			50.533.310	45.389.000	89,8%	
		Jumlah dokumen	1 Dok		1 Dok	100%	
3	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			3.815.197.160	3.487.257.570	91,4%	
		Jumlah dokumen	4 Dok		4 Dok	100%	

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbid Perencanaan Kebutuhan Tahun 2021

Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021

- 1) Jumlah SKPD yang melakukan penyusunan RKBMD (untuk RKBMD perubahan Tahun Anggaran 2021) dengan Target Kinerja sebanyak 40 SKPD sampai Triwulan

IV Tahun 2021 sudah 40 SKPD yang sudah melaksanakan dan ini sudah cetak, sehingga realisasi kinerja 100%.

- 2) Jumlah dokumen Buku Standar Satuan Harga dengan Target Kinerja Sebanyak 1 dokumen yaitu Buku Standar Satuan Harga Tahun 2022 dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tanggal 25 Juni 2021 sehingga telah terealisasi capaian sebesar 100%.
- 3) Jumlah dokumen Buku Standar Kebutuhan Barang dengan Target Kinerja sebanyak 1 dokumen (Buku Standar Kebutuhan Barang Tahun 2022) sampai dengan TW III sudah dilaksanakan pencetakan dan capaian kinerja terealisasi sebesar 100%.
- 4) Jumlah SKPD yang di rekonsiliasi/ verifikasi Barang Pakai Habis dengan Target Kinerja sebanyak 40 SKPD, realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 ini sudah dilaksanakan Rekonsiliasi Belanja Pakai Habis Triwulan I sebanyak 40 SKPD sehingga capaian kinerja terealisasi sebesar 100%, dan dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi triwulan II, III sebanyak 40 SKPD dan triwulan IV untuk 40 SKPD ditambah dengan 5 dari Kelurahan.
- 5) Jumlah dokumen Beban Persediaan yang tersusun dengan Target Kinerja sebanyak 1 dokumen (Dokumen Beban Persediaan Tahun 2020), sampai dengan Triwulan IV sudah tersusun dan capaian kinerja terealisasi sebesar 100% dikarenakan sudah terealisasi di triwulan III.
- 6) Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi Standar Satuan Harga/ Peraturan Bupati Tanah Laut dengan Target Kinerja sebanyak 40 SKPD, realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 ini sudah dilaksanakan dihadiri oleh 40 SKPD ditambah 5 dari Kelurahan dan capaian kinerja terealisasi sebesar 100%.
- 7) Jumlah Barang Pakai Habis SKPD yang telah termonitoring Tahun 2021 dengan Target Kinerja sebanyak 40 SKPD sampai Triwulan IV Tahun 2021 ini dilaksanakan terhadap 40 SKPD (11 Kecamatan, 5 Kelurahan), sehingga realisasi kinerja mencapai 100%.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2021

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 41.943.640,- dengan capaian sd TW IV sebesar Rp 39.678.300,-, atau realisasi sebesar 94,5 %. Realisasi penggunaan dana tersebut untuk belanja cetak yaitu:
 1. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 147 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan dengan sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan
 3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 172 Tahun 2020 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Selain belanja cetak juga telah dilaksanakan realisasi honorarium tim pelaksana kegiatan sejak bulan April sampai dengan bulan September Tahun 2021.

Pada bulan Desember Tahun 2021 telah selesai disusun 2 (dua) Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor (SIMPKB) Sebagai Inovasi Pelayanan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 50.533.310,- dengan realisasi sd TW IV sebesar Rp 45.389.000,- atau capaian sebesar 89,8%, pada sub kegiatan ini terealisasi belanja cetak 1 (satu) dokumen standar harga satuan Tahun 2022 dan pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan rapat persiapan penyusunan standar harga satuan Tahun Anggaran 2023.
- 3) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 3.815.197.160,- dengan realisasi sd TW IV sebesar Rp 3.487.257.570,- atau capaian sebesar 91,4%. Dokumen yang menjadi target sebanyak 4 dokumen dan sudah terealisasi 4 (empat) dokumen atau 100%.

Untuk kegiatan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah pada bulan Desember 2021 telah dilaksanakan koordinasi RKBMD dengan 40 SKPD ditambah dengan 5 Kelurahan. Sub kegiatan ini juga ada kinerja yang menjadi tanggungjawab Subbid Perencanaan Kebutuhan yaitu Penyediaan kendaraan dinas operasional dan jabatan dengan cara Sewa. Tahun 2021 ini Kendaraan dinas yang disewakan adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit yang digunakan oleh 5

(lima) SKPD antara lain BPKAD, Bappeda, Bapenda, DPUPRP dan Sekretariat Daerah. Pada tanggal 31 Desember 2021 kontrak kerja/sewa dengan pihak ketiga akan berakhir dan unit akan dikembalikan kepada pihak ketiga. Selain itu Subbid Perencanaan Kebutuhan bersama dengan PPK dan tim Pokja UKPBJ Kabupaten Tanah Laut sudah mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan sewa kendaraan dinas bermotor perorangan dan berpenumpang untuk Tahun Anggaran 2022.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

1. Masih terdapat beberapa pengurus barang SKPD yang masih terlambat menyerahkan laporan- laporan hasil rekonsiliasi barang persediaan untuk triwulan III dan triwulan IV.
2. Dalam penyusunan Standar Satuan Harga, kendala yang dihadapi adalah banyak jenis produk yang belum terakumulasi pada sistem informasi perencanaan daerah (SIPD) sehingga banyak SKPD komplain serta banyaknya keinginan SKPD dalam merancang anggaran belanja barang jasa dan belanja modal tanpa adanya penyusunan perencanaan kebutuhan SKPD.
3. Untuk penyusunan usulan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) TA. 2022 dan usulan RKBMD Perubahan TA. 2021 tidak sesuai dengan permintaan karena memenuhi pokok-pokok pikiran anggota DPRD.
4. Pada penginputan standar satuan harga pada Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) sangat lambat bahkan tidak ada koneksi jaringan, padahal sudah menggunakan WIFI yang sudah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Aksi

1. Meningkatkan percepatan pengumpulan pelaporan dengan lebih sering menghubungi/ kontak dengan SKPD untuk kepentingan kelancaran pelaporan dan menyampaikan surat peringatan dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk SKPD yang belum mengumpulkan laporan.
2. SKPD membuat permohonan penambahan standar harga satuan dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) oleh Kepala Dinas/Badan dengan hasil survey produk bisa melalui marketplace atau pasar lokal.
3. Dilaksanakan desk setiap SKPD dengan melibatkan Sub bagian perencanaan, Sub bagian umum dan kepegawaian serta pengurus barang SKPD tentang tata cara pengisian dan penyusunan usulan RKBMD sesuai dengan keadaan SKPD itu sendiri.
4. Menggunakan hotspot pribadi demi kelancaran dan ketepatan dalam penginputan standar satuan harga pada SIPD.

Foto - Foto Kegiatan Kasubbag Perencanaan Triwulan IV Tahun 2021
1). Foto Cetak Dokumen Peraturan Bupati Tanah Laut



2). Foto Penyerahan secara Simbolis Kendaraan Sewa dari Penyedia ke Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut





3). Foto Cetak Buku Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Buku Laporan Stock Opname



4). Foto kegiatan rekonsiliasi belanja barang pakai habis



5). Foto kegiatan rapat persiapan penyusunan standar satuan harga TA. 2023



6). Foto kegiatan rekonsiliasi barang persediaan triwulan IV



7). Foto kegiatan pendampingan mahasiswa STPDN



8). Foto kegiatan persiapan pelaksanaan pekerjaan sewa kendaraan dinas bermotor perorangan dan berpenumpang TA. 2023 dengan Tim Pokja UKPBJ dan kegiatan penginputan SSH pada SIPD



6.ESELON III.B (Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset)

2.1.8. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 8

Sasaran Strategis nomor 8 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani

Sasaran strategis nomor 8 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
8	Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	10	Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100,00			100,00			100,00			100,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan sesuai ketentuan capaian kinerjanya trendnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%, dengan telah dimanfaatkan dan digunakannya BMD di Kabupaten Tanah Laut sehingga menghasilkan pendapatan untuk daerah. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 8 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pemanfaatan dan Penggunaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan dibawah ini.

6.3). ESELON IV.A1 (Kasubbid Pemanfaatan dan Penggunaan)

Untuk mendukung Sasaran Strategis No 8 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Pemanfaatan dan Penggunaan yaitu dengan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Pemanfaatan dan Penggunaan Tahun 2021 sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan Rekonsiliasi/Verifikasi Pemanfaatan & Penggunaan BMD sesuai ketentuan	1	Jumlah SKPD yang dilakukan Rekonsiliasi/Verifikasi Pemanfaatan & Penggunaan BMD sesuai ketentuan	41 SKPD	41 SKPD	100%
2	Melaksanakan Monitoring BMD yang dimanfaatkan dan digunakan sesuai ketentuan	2	Jumlah BMD yang dimanfaatkan dan digunakan dimonitoring sesuai ketentuan	42 BMD	42 Buah BMD	100%
3	Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD sesuai ketentuan	3	Jumlah SKPD yang dilakukan Sosialisasi Pemanfaatan & Penggunaan BMD sesuai ketentuan	15 Kali	15 Kali	100%

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021

LKj BPKAD TAHUN 2021

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran Rp	Realisasi	Capaian %	Ke
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						
A.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah						
1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			187.141.640	156.385.900	83,56%	
		Jumlah buku rekap pemindahtanganan (hibah keluar) BMD per 31 Desember 2021	1 dok		1 dok	0%	
		Jumlah buku rekap pemindahtanganan (hibah masuk) BMD per 31 Desember 2021	1 dok		1 dok	100%	
		Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan	1 dok		1 dok	100%	
		Jumlah dokumen monitoring pemanfaatan dan monitoring	1 dok		1 dok	100%	

		penggunaan BMD					
		Jumlah dokumen pelaksanaan pemanfaatan BMD	1 dok		1 dok	100%	
		Jumlah dokumen pemusnahan BMD per Desember 2021	1 dok		1 dok	100%	
		Jumlah dokumen penghapusan BMD per Desember 2021	1 dok		1 dok	100%	
		Jumlah dokumen rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan BMD	1 dok		1 dok	100%	
		Jumlah sosialisasi pemanfaatan dan	15 kali		15 kali	100%	

		penggunaan BMD					
--	--	-------------------	--	--	--	--	--

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbid Pemanfaatan dan Penggunaan Tahun 2021

Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021

1. Jumlah SKPD yang dilakukan Rekonsiliasi/Verifikasi Pemanfaatan & Penggunaan BMD sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 41 SKPD

Untuk kegiatan ini sudah direalisasikan/dilaksanakan s.d triwulan IV (periode 01 Oktober s/d 10 Desember 2021) tanggal 13 s/d 15 Desember 2021) terhadap 41 SKPD dengan perincian :

- a. tanggal 13 Desember 2021 pada 15 (lima belas) SKPD yaitu : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Kurau dan Kecamatan Kintap.
- b. tanggal 14 Desember 2021 pada 15 (lima belas) SKPD yaitu : Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, RSUD H. Boejasin Pelaihari, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Bumi Makmur.
- c. tanggal 15 Desember 2021 pada 11 (sebelas) SKPD yaitu : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kecamatan Takisung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kecamatan Jorong, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Tambang Ulang, Inspektorat Kabupaten dan Badan Pendapatan Daerah.

2. Jumlah BMD yang dimanfaatkan dan digunakan dimonitoring sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 42 BMD, realisasi sebanyak 42 BMD atau 100,00% dengan perincian pelaksanaan sebagai berikut :

1. Monitoring BMD berupa tanah yang rencananya akan digunakan oleh PDAM Kab. Tanah Laut yang berlokasi di Jalan A. Syairani Pelaihari.
2. Monitoring BMD berupa 1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen beserta peralatan dan mesin yang digunakan oleh Organisasi Angkutan Darat Kab. Tanah Laut, Dinas Sosial Kab. Tanah Laut dan Koperasi Mufakat Sejahtera Bersama Kab. Tanah Laut.
3. Monitoring BMD berupa 1 (satu) unit gedung veteran/gedung juang yang digunakan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kab. Tanah Laut.
4. Monitoring BMD berupa 1 (satu) unit Bangunan Gudang yang digunakan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa Banjarmasin.
5. Monitoring BMD berupa 1 (satu) unit Bangunan Gudang yang digunakan oleh PT. Gede Langgeng Makmur Banjarmasin.
6. Monitoring BMD berupa 1 (satu) unit Bangunan Booth ATM yang digunakan oleh Bank BPD Kalsel Capem Pemkab Tanah Laut.
7. Monitoring BMD berupa 1 (satu) unit Bangunan Rumah Dinas yang digunakan oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari.
8. Monitoring BMD berupa 1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen, yaitu Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanah Laut yang sebagian aula kantornya digunakan oleh Koperasi Pegawai Negeri Tuntung Pandang Kab. Tanah Laut.
9. Monitoring BMD berupa 1 (satu) unit Bangunan Rumah Dinas yang digunakan oleh Khairandi yang berlokasi di Jalan Karya Pelaihari.
10. Monitoring BMD berupa 1 (satu) unit Bangunan Rumah Dinas yang digunakan oleh Rahmadianor yang berlokasi di Jalan Karya Pelaihari.
11. Monitoring BMD berupa 1 (satu) unit Bangunan Rumah Dinas yang digunakan oleh Rahmad Hidayat yang berlokasi di Jalan Pancapan Pelaihari.
12. Monitoring BMD berupa 1 (satu) unit Bangunan Booth ATM di Kec. Kurau yang digunakan oleh BRI Cabang Pelaihari.
13. Monitoring BMD berupa 1 (satu) unit Bangunan Rumah Dinas yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat Pelaihari.

14. Monitoring BMD berupa 1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang digunakan oleh Organisasi Angkutan Darat Kab. Tanah Laut, Dinas Sosial Kab. Tanah Laut dan Koperasi Mufakat Sejahtera Bersama Kab. Tanah Laut.
15. Monitoring BMD berupa tanah yang berlokasi di Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang yang digunakan oleh Petani an. Bahrian.
16. Monitoring BMD berupa tanah yang berlokasi di Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang yang digunakan oleh Kelompok Tani Kartika.
17. Monitoring BMD berupa 1 (satu) unit bangunan rumah dinas yang berlokasi di Jalan Hutan Kota Pelaihari yang akan digunakan oleh Pengurus Penyuluh Sosial Masyarakat (PENSOSMAS TALA) dengan pola dioperasikan oleh pihak lain. Rumah dinas dimaksud adalah dengan nomor 50.13.01/0013.
18. Monitoring BMD berupa 1 (satu) unit bangunan gedung kantor permanen yang berlokasi di Jalan Pembangunan Pelaihari (eks. Kantor Pengelolaan Pasar) yang dimohon oleh Badan Narkotika Nasional Kab. Tanah Laut yang akan digunakan sebagai Kantor.
19. Monitoring BMD yang tercatat di KIB Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pola dioperasikan oleh pihak lain berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Tractor Roda 2 dan 1 (satu) buah Power Thresher/Perontok Padi yang digunakan oleh Kelompok Tani Harapan Utama.
 - 1 (satu) buah Hand Tractor Roda 2 dan 1 (satu) buah Power Thresher/Perontok Padi yang digunakan oleh Kelompok Tani Sumber Tani.
20. Monitoring BMD berupa 1 (satu) unit Rumah Negara Golongan II Type A Permanen yang berada di SMPN 6 Jorong dan digunakan oleh Guru Non PNS bernama M. Noor Adi Saputra.
21. Monitoring BMD yang dipinjampakaikan kepada BKKBN Prop. Kalimantan Selatan berupa :
 - 1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang difungsikan sebagai kantor UPT KB. Kec. Batu Ampar.
 - 1 (satu) buah lemari besi, 2 (dua) buah meja kayu, 15 (lima belas) buah kursi rapat, 1 (satu) buah meja komputer, 4 (empat) buah kursi kerja, 4 (empat) buah meja kerja, 2 (dua) buah komputer/PC, 1 (satu) buah printer, 4 (empat) buah Ipad yang dipegang oleh PPL KB yaitu an. Rini Mariyati, SE, Rokhim Suprayitno, Denny Harnowo, S.Sos dan Saifuddin, A.Md, 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah modem, 2 (dua) buah proyektor + attachment, 1 (satu) buah Wireless Portable (Sound System).

- 4 (empat) unit kendaraan dinas roda 2 (dua) yaitu DA. 576 LI yang dipegang oleh Rini Mariyati, SE, DA. 4001 LZ yang dipegang oleh Rokhim Suprayitno, DA. 4003 LZ yang dipegang oleh Denny Harnowo, S.Sos dan DA. 350 LC yang dipegang oleh Saifuddin, A.Md.
22. Monitoring BMD berupa 1 (satu) unit Gedung Pos Jaga Permanen dan Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga seluas 900 m² yang terletak di Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kab. Tanah Laut.
23. Monitoring BMD berupa tanah milik Pemerintah Kab. Tanah Laut yang berlokasi di sekitar area pasar Kurau (di pinggiran jalan Swadaya RT. 03 Desa Kurau) yang dimanfaatkan untuk mendirikan warung/kios untuk tempat dagangan oleh Saudara Murjani.
24. Monitoring BMD yang dipinjamkaikan kepada BKKBN Prop. Kalimantan Selatan berupa :
- 1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang difungsikan sebagai kantor UPT KB. Kec. Panyipatan.
 - 1 (satu) buah modem, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) buah komputer/PC, 1 (satu) buah lemari besi, 2 (dua) unit kendaraan dinas roda 2 (dua) yaitu DA. 569 LI yang dipegang oleh Sukimin, S.Sos. I dan DA. 570 LI yang dipegang oleh Rizky Riswahyuni, SE.
25. Monitoring BMD yang dipinjamkaikan kepada BKKBN Prop. Kalimantan Selatan berupa :
- 1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang difungsikan sebagai kantor UPT KB. Kec. Jorong.
 - 1 (satu) buah lemari besi, 2 (dua) buah meja kayu, 15 (enam belas) buah kursi rapat, 1 (satu) buah meja komputer, 4 (empat) buah kursi kerja, 5 (lima) buah meja kerja, 2 (dua) buah komputer/PC, 2 (dua) buah printer, 3 (tiga) buah Ipad yang dipegang oleh PPL KB yaitu an. Iberahim, Tati Endarwati, SE dan Ramliyanoor, S.Th.I, 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah modem, 1 (satu) buah proyektor + attachment dan 1 (satu) buah wireless portable (sound system).
 - 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda 2 (dua) yaitu DA. 562 LC yang dipegang oleh Iberahim, DA. 575 LI yang dipegang oleh Tati Endarwati, SE dan DA. 52 LI yang dipegang oleh Ramliyanoor, S.Th.I
26. Monitoring BMD yang dipinjamkaikan kepada BKKBN Prop. Kalimantan Selatan berupa :
- 1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang difungsikan sebagai kantor UPT KB. Kec. Bati-Bati.

- 1 (satu) buah lemari besi, 2 (dua) buah meja kayu, 15 (enam belas) buah kursi rapat, 1 (satu) buah meja komputer, 4 (empat) buah kursi kerja, 5 (lima) buah meja kerja, 2 (dua) buah komputer/PC, 2 (dua) buah printer, 3 (tiga) buah Ipad yang dipegang oleh PPL KB yaitu an. Maria Franciska Aguswati, Hidayatullah, S.Sos.I dan Mirwan Jamili, S.Sos.I, 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah modem, 1 (satu) buah proyektor + attachment dan 1 (satu) buah wireless portable (sound system), 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda 2 (dua) yaitu DA. 577 LI yang dipegang oleh Maria Franciska Aguswati, DA. 578 LI yang dipegang oleh Hidayatullah, S.Sos.I dan DA. 581 LI yang dipegang oleh Mirwan Jamili, S.Sos.I
27. Monitoring BMD yang dipinjampakaikan kepada BKKBN Prop. Kalimantan Selatan berupa :
- 1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang difungsikan sebagai kantor UPT KB. Kec. Tambang Ulang.
 - 1 (satu) buah lemari besi, 2 (dua) buah meja kayu, 15 (lima belas) buah kursi rapat, 1 (satu) buah meja komputer, 4 (empat) buah kursi kerja, 4 (empat) buah meja kerja, 2 (dua) buah komputer/PC, 1 (satu) buah printer, 3 (tiga) buah Ipad yang dipegang oleh PPL KB yaitu an. Surya Irawan, SE, Siska Damayanti PA, SE dan Dra. Ariati, 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah modem, 1 (satu) buah proyektor + attachment, 1 (satu) buah Wireless Portable (Sound System), 1 (satu) buah Note book.
 - 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda 2 (dua) yaitu DA. 598 LH yang dipegang oleh Surya Irawan, SE, DA. 4006 LZ yang dipegang oleh Siska Damayanti PA, SE dan DA. 4008 LZ yang dipegang oleh Dra. Ariati.
28. Monitoring BMD berupa : 1 (satu) unit Speed Boat yang berada di Pelabuhan Desa Muara Kintap dan dipinjampakaikan kepada Pangkalan TNI Angkatan Laut/Lanal Banjarmasin.

29. Monitoring BMD berupa : Tanah Kampung (Kas Desa) sertifikat tanah Nomor P.01/1994 dengan luasan 49.993 m² yang berlokasi di Desa Damar Lima Kec. Batu Ampar.
30. Monitoring BMD yang dipinjampakaikan kepada BKKBN Prop. Kalimantan Selatan berupa :
- 1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang difungsikan sebagai kantor UPT KB. Kec. Takisung.
 - 1 (satu) buah lemari besi, 4 (empat) buah meja kayu, 16 (enam belas) buah kursi rapat, 1 (satu) buah meja komputer, 5 (lima) buah kursi kerja, 5 (lima) buah meja kerja, 2 (dua) buah komputer/PC, 1 (satu) buah printer, 3 (tiga) buah Ipad yang dipegang oleh PPL KB yaitu an. Hj. Isna Rahmawati, Estya Eriyani, SE dan Annisya Maresti Yanda, SE, 1 (satu) buah laptop, 3 (tiga) buah modem, 2 (dua) buah proyektor + attachment. 1 buah printer dan 1 buah PC/Komputer dalam keadaan rusak dan sudah di amankan di Kantor DP2KBP3A Kab. Tanah Laut.
 - 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda 2 (dua) yaitu DA. 563 LI yang dipegang oleh Hj. Isna Rahmawati, DA. 567 LI yang dipegang oleh Estya Eriyani, SE dan DA. 4004 LZ yang dipegang oleh Annisya Maresti Yanda, SE.
31. Monitoring BMD yang dipinjampakaikan kepada BKKBN Prop. Kalimantan Selatan berupa :
- 1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang difungsikan sebagai kantor UPT KB. Kec. Bumi Makmur,
 - 1 (satu) buah modem, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) buah komputer/PC, 1 (satu) buah lemari besi, 3 (dua) unit kendaraan dinas roda 2 (dua) yaitu DA. 566 LI yang dipegang oleh Dra. Rita Setiyana, DA. 524 LI yang dipegang oleh Masri Yanto, S.Psi dan DA. 590 LH yang dipegang oleh Drs. Akhmad Marzuki.
32. Monitoring BMD di Kec. Jorong berupa : camera elektronik merk Sony/DSC sebanyak 1 (satu) buah, PC Unit/Komputer PC merk Lenovo/Machine sebanyak 1 (satu) buah. Serta 1 (satu) buah kursi rapat merk Prodeline yang dipinjampakaikan kepada Koramil Kec. Jorong.

33. Monitoring BMD di Kec. Bati-Bati berupa : sebagian tanah dan bangunan gedung kantor permanen (Aula) seluas 240 m² dan 1 (satu) unit Mini Bus DA 733 LG merk Izusu Elf yang digunakan sebagai mobil angkutan pedesaan.
34. Monitoring BMD di Kec. Bumi Makmur berupa : 1 (satu) unit bangunan gudang penyimpanan gabah atau bangunan lumbung pangan serta lantai jemur sebanyak 1 (satu) unit yang terletak di Desa Handil Birayang Atas dan digunakan oleh kelompok tani Al Hidayah.
35. Monitoring BMD di Kec. Kurau berupa : sebagian tanah yang dimanfaatkan untuk penempatan booth ATM yang terletak di Jalan Swadaya No. 111 Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kab. Tanah Laut dan dimanfaatkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pleihari.
36. Monitoring BMD di Kec. Bajuin berupa : tanah yang berlokasi di Desa Sungai Bakar yang digunakan untuk pembangunan embung bakar. Tanah ini digunakan oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
37. Monitoring BMD di Kec. Tambang Ulang berupa : tanah yang berlokasi di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang, yaitu Tanah Kampung (Kas Desa) sertifikat tanah Nomor P.06/1993 dengan luasan 91.705 m² yang digunakan oleh kelompok tani.
38. Monitoring BMD ke Kecamatan Panyipatan sekaligus pendampingan penilaian pemanfaatan BMD oleh Tim Penilai KPKNL Banjarmasin. BMD dimaksud adalah berupa : Tenda glamping sebanyak 4 unit, payung pantai sebanyak 4 unit, kursi santai sebanyak 4 unit yang berlokasi di Obyek Wisata Pantai Batakan Baru Kec. Panyipatan.
39. Monitoring BMD ke Kecamatan Bajuin sekaligus pendampingan penilaian pemanfaatan BMD oleh Tim Penilai KPKNL Banjarmasin. BMD dimaksud adalah berupa : 1 (satu) unit Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain yang berlokasi di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin Kec. Bajuin. Juga terhadap 1 (satu) unit Rumah Negara Golongan II Type A Permanen yang berlokasi di Kantor Kec. Bajuin dan saat ini ditempati oleh PTT pada Kantor tersebut (Penjaga Malam).
40. Monitoring BMD di Kecamatan Pelaihari sekaligus pendampingan penilaian pemanfaatan BMD oleh Tim Penilai KPKNL Banjarmasin. BMD dimaksud adalah berupa : Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen yang berlokasi di Rest Area Gunung Kayangan Desa Ambungan Kec. Pelaihari. Yang dinilai adalah warung-warung sebanyak 18 unit. Juga terhadap Angkutan Barang Lain-lain yang berlokasi di Taman Mina Tirta Kec. Pelaihari Yang dinilai adalah warung-warung sebanyak 8 unit.

41. Monitoring BMD di Kecamatan Pelaihari. BMD dimaksud adalah berupa : bangunan gedung kantor serta sebagian tanah dan bangunan untuk booth ATM yang berlokasi di Jalan A. Syairani Pelaihari (Komplek Perkantoran) yang dimanfaatkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

42. Monitoring BMD di Kecamatan Pelaihari. BMD dimaksud adalah berupa : Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang berlokasi di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari (lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Tanah Laut) dengan nomor sertifikat 24 September 1990/P24 yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Tanah Laut. Luasan yang digunakan adalah : untuk reservoir : 15 x 16 m² dan untuk rumah pompa : 10 x 14 m².

3. Jumlah SKPD yang dilakukan Sosialisasi Pemanfaatan & Penggunaan BMD sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 15 kali. Sampai dengan triwulan III ini kegiatan sosialisasi sudah dilaksanakan kepada 9 SKPD dengan persentase sebesar 60% dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kec. Pelaihari dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2021
2. Kec. Panyipatan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2021
3. Kec. Kintap dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021
4. Kec. Takisung dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021
5. Kec. Batu Ampar dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021
6. Kec. Jorong dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021
7. Kec. Bumi Makmur dilaksanakan pada tanggal 02 September 2021
8. Kec. Kurau dilaksanakan pada tanggal 06 September 2021
9. Kec. Bajuin dilaksanakan pada tanggal 09 September 2021
10. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021.
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 14 Oktober 2021.
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tanggal 18 Oktober 2021.
13. Dinas Sosial pada tanggal 21 Oktober 2021.
14. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tanggal 27 Oktober 2021.
15. Dinas Pariwisata pada tanggal 28 Oktober 2021.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2021

Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 207.696.640,-**. Pada APBD Perubahan TA. 2021 dilakukan pergeseran anggaran, sehingga pagu anggaran menjadi **Rp. 187.141.640**. **Realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 156.385.900,- atau sebesar 83,56%**, dengan tolak ukur kinerja sebagai berikut :

- 1) Jumlah buku rekap pemindahtanganan (hibah keluar) BMD per 31 Desember 2021, dengan target 1 dokumen realisasi 1 dokumen atau 100%.
- 2) Jumlah buku rekap pemindahtanganan (hibah masuk) BMD per 31 Desember 2021 dengan target 1 dokumen realisasi 1 dokumen atau 100%.
- 3) Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan dengan target 1 dokumen realisasi 1 dokumen atau 100%.
- 4) Jumlah dokumen monitoring pemanfaatan dan monitoring penggunaan BMD dengan target 1 dokumen realisasi 1 dokumen atau 100%.
- 5) Jumlah dokumen pelaksanaan pemanfaatan BMD dengan target 1 dokumen realisasi 1 dokumen atau 100%.
- 6) Jumlah dokumen pemusnahan BMD per Desember 2021 dengan target 1 dokumen realisasi 1 dokumen atau 100%.
- 7) Jumlah dokumen penghapusan BMD per Desember 2021 dengan target 1 dokumen realisasi 1 dokumen atau 100%.
- 8) Jumlah dokumen rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan BMD dengan target 1 dokumen realisasi 1 dokumen atau 100%.
- 9) Jumlah sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD dengan target 15 kali realisasi 15 kali atau 100%.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

1. Kondisi Pandemi Covid-19 yang merebak di Kabupaten Tanah Laut sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan.
2. Banyaknya jumlah aset yang besar dan lokasi yang menyebar di 11 kecamatan, sehingga memerlukan waktu dan SDM yang lebih untuk melakukan monitoring.
3. Pemanfaatan BMD memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan PAD serta meningkatkan fasilitas publik. Namun faktanya banyak asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang belum mampu menghasilkan keuntungan bagi daerah, dengan pengertian bahwa pemanfaatan asset belum optimal serta rendahnya fungsi manfaat asset.

4. Masih adanya pihak lain yang memanfaatkan barang milik daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kab. Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah .

Rencana Aksi

- 1). Melakukan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD secara intensif dengan sasaran kegiatan langsung ke masyarakat dan SKPD di lingkup Pemerintah Kab. Tanah Laut.
- 2). Melakukan pembenahan administrasi pemanfaatan dan penggunaan BMD agar sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kab. Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 3). Peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan BMD dengan melibatkan Instansi terkait.
- 4). Mendorong pemanfaatan dan penggunaan BMD yang dapat menghasilkan keuntungan bagi daerah atau yang mendatangkan PAD.

Foto - Foto Kegiatan

1. Rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan BMD triwulan IV





2. Sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD di 6 SKPD (Triwulan IV)

a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan



b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



d. Dinas Sosial



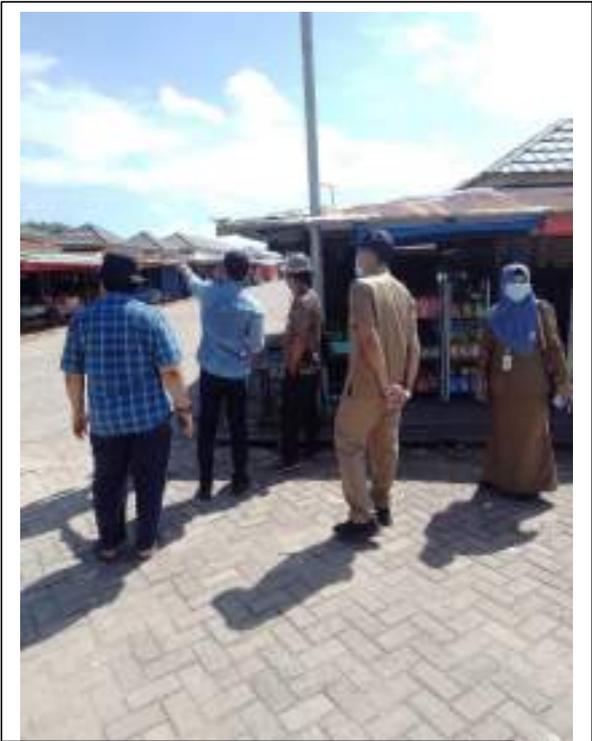
e. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



f. Dinas Pariwisata



3. Monitoring pemanfaatan dan penggunaan BMD



7.ESELON III.B (Kepala Bidang Penatausahaan Aset)

2.1.9. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 9

Sasaran Strategis nomor 9 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Penatausahaan Aset atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani

Sasaran strategis nomor 9 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penatausahaan Aset dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9
Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
9	Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	11	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja							100,00			100,00			100,00			100,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD yang dicatat dengan akurat sesuai ketentuan capaian kinerjanya trendnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%, dibuktikan dengan telah disajikannya Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diaudit oleh BPK RI untuk mendapatkan opini terhadap pengelolaan keuangan dan aset setiap tahunnya. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 9 Kepala Bidang Penatausahaan Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Inventarisasi dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan dibawah ini.

7.1). ESELON IV.A1 (Kasubbid Inventarisasi)

Untuk mendukung Sasaran strategis No 9 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Penatausahaan Aset diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Inventarisasi yaitu dengan melaksanakan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditandatangani. Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Inventarisasi Tahun 2021 sesuai dengan Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan Updating Data BMD pada KIB SKPD sesuai ketentuan	1	Jumlah Dokumen KIB SKPD yang terupdate sesuai ketentuan	17 Dokumen	17 Dokumen	100 %
2	Melaksanakan Rekonsiliasi/verifikasi Belanja Modal SKPD sesuai ketentuan	2	Jumlah Belanja Modal SKPD yang telah direkonsiliasi/verifikasi dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %
3	Melaksanakan Sensus BMD dan tindaklanjut Hasil Sensus BMD sesuai ketentuan	3	Jumlah BMD SKPD yang telah disensus dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-
4	Melaksanakan Monitoring Belanja Modal SKPD sesuai ketentuan	4	Jumlah Belanja Modal SKPD yang telah termonitoring sesuai ketentuan	40 SKPD (12 Keg)	40 SKPD (12 Keg)	100 %
5	Melaksanakan Sosialisasi Inventarisasi BMD SKPD sesuai ketentuan	5	Jumlah SKPD yang telah tersosialisasi dan menerapkan Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	-	-	-

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran RP	Realisasi	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						
A.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah						
1	Inventarisasi Barang Milik Daerah			25.724.300	19.514.300	75,85	
		Jumlah dokumen	1 Dok		1 Dok	100	
2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			44.803.090	43.601.600	97,31	
		Jumlah dokumen	8 Dok		8 Dok	100	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah			289.451.490	253.515.100	87,58	
		Jumlah dokumen	16 Dok		16 Dok	100	

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbid Inventarisasi Tahun 2021

Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021

- 1). Melaksanakan Updating Data BMD pada KIB SKPD sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah dokumen KIB SKPD yang terupdate sesuai ketentuan sebanyak 17 dokumen yaitu :
 1. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Tanah (KIB A) Unaudit 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
 2. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Tanah (KIB A) Audited 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
 3. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B) Unaudit 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
 4. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B) Audited 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
 5. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan (KIB C) Unaudit 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
 6. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan (KIB C) Audited 40 SKPD per 31 Desember 2020 .

7. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)
Unaudit 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
8. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)
Audited 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
9. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya (KIB E) Unaudit 40
SKPD per 31 Desember 2020 .
10. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya (KIB E) Audited 40
SKPD per 31 Desember 2020 .
11. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Kontruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)
Unaudit 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
12. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Kontruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)
Audited 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
13. Buku Rekap Mutasi Barang Milik Daerah Unaudit Tahun Anggaran 2020
14. Buku Rekap Mutasi Barang Milik Daerah Audited Tahun Anggaran 2020
15. Buku Induk Inventaris Kabupaten per 31 Desember 2020
16. Buku Induk Inventaris Kabupaten Ekstrakomtabel per 31 Desember 2020
17. Buku Laporan Kegiatan Inventarisasi tahun Anggaran 2021

Dari 17 dokumen tersebut diatas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 telah terealisasi sejumlah 17 Dokumen Penatausahaan Aset, terdiri dari Kartu Inventaris Barang (KIB A sd KIB F), Buku Inventaris, Buku Rekap Mutasi Barang Milik Daerah dan 1 Dokumen Kegiatan Inventarisasi berupa Buku Laporan Kegiatan Inventarisasi sehingga realisasi kinerja sebesar 100 %. Pada Kegiatan Inventarisasi ini difokuskan pada 7 (tujuh) SKPD besar yang memiliki aset Tanah dan Bangunan Gedung (KIB A dan KIB C) yaitu Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan.

Ke tujuh SKPD tersebut mendapat prioritas, mengingat banyaknya Aset yang dimiliki oleh SKPD tersebut yang lokasinya tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Tanah Laut yang belum disensus secara optimal. Kegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan sungguh sungguh sebagai suatu kewajiban dan didukung secara penuh oleh Tim Inventarisasi SKPD. sehingga realisasi fisiknya bisa tercapai 100 %,sesuai dengan target kinerjanya.

2). Melaksanakan Rekonsiliasi/verifikasi Belanja Modal SKPD sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah Belanja Modal SKPD yang telah direkonsiliasi/verifikasi dan disampaikan Laporannya sesuai dengan Target Kinerja sebanyak 8 dokumen yaitu :

1. Buku Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020 Semester II
2. Buku Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 Semester I
3. Buku Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020

Semester II

4. Buku Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021

Semester I

5. Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa TA.2020 Triwulan

IV

6. Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa TA.2021 Triwulan I

7. Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa TA.2021 Triwulan

II

8. Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa TA.2021 Triwulan

III

Dari 8 Dokumen tersebut telah terealisasi sebanyak 8 Dokumen, sehingga capaian realisasi fisiknya bisa tercapai 100 % sesuai dengan target kinerjanya.

3). Melaksanakan Sensus BMD dan tindaklanjut Hasil Sensus BMD sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah BMD SKPD yang telah disensus dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sudah dilaksanakan pada tahun 2018 dan dilaksanakan tindak lanjut sensus BMD di Tahun 2019. Sehingga pada tahun ini tidak ada Target Kinerja untuk kegiatan tersebut

- 4). Melaksanakan Monitoring Belanja Modal SKPD sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah Belanja Modal SKPD yang termonitoring sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 12 kegiatan , sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 sudah dilaksanakan 12 kegiatan, sehingga capaian kinerja terealisasi sebesar 100 %.
- 5). Melaksanakan Sosialisasi Inventarisasi BMD SKPD sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah SKPD yang telah tersosialisasi dan menerapkan Inventarisasi BMD sesuai ketentuan pada tahun ini tidak ada Target Kinerja karena kegiatan tersebut sudah dilaksanakan pada tahun tahun sebelumnya.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Subbid Inventarisasi Tahun 2021

1). Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 25.724.300,- dengan Realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp.19.514.300,- atau sebesar 75,85%. Sub Kegiatan ini menargetkan 1 dokumen yaitu Dokumen Buku Laporan Kegiatan Inventarisasi tahun Anggaran 2021 dan telah terealisasi 100%. Sub Kegiatan ini semula dijadwalkan akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli 2021, karena terkendala dengan pandemi covid 19 yang meningkat di Kabupaten Tanah Laut, maka kegiatan ini tertunda, dan baru bisa dilaksanakan rapat koordinasi tim Inventarisasi pada tanggal 30 September 2021, Sub Kegiatan ini difokuskan pada 7 SKPD yang mempunyai Aset Tanah (KIB A) dan Bangunan Gedung (KIB C) yang lokasinya berada tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.

2). Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 49.528.090,- pada triwulan IV ada Perubahan Anggaran sehingga Pagu Anggaran menjadi Rp. 44.803.090,- dengan Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 43.601.600,- atau capaian sebesar 97,31 %. Sub

Kegiatan ini menargetkan 8 Dokumen dan telah tercapai 100%. Jumlah Belanja Modal SKPD yang telah direkonsiliasi/verifikasi dan disampaikan Laporrannya sesuai dengan Target Kinerja sebanyak 8 dokumen yaitu sebagai berikut :

1. Buku Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020 Semester II
2. Buku Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 Semester I
3. Buku Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020

Semester II

4. Buku Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021

Semester I

5. Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa TA.2020 Triwulan

IV

6. Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa TA.2021 Triwulan I

7. Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa TA.2021 Triwulan

II

8. Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa TA.2021 Triwulan

III

- 3). Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 290.351.490,- pada triwulan IV ada Perubahan Anggaran sehingga pagu anggaran menjadi Rp.289.451.490,- dengan Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 253.515.100,- atau capaian sebesar 87,58 %, Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan inti di Subbid Inventarisasi, yang menunjang kegiatan penatausahaan barang milik daerah agar tertib adminstrasi. Dalam proses kegiatan ini didukung dengan Aplikasi Simda BMD. Dimana Bidang Penatausahaan Aset bekerja sama dalam rangka pengadaan sewa layanan cloud database system barang milik daerah kabupaten tanah laut tahun 2021 antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan PT. Lawang Sewu melalui Kontrak Kerjasama Nomor : 027/01/SP/BPKAD/2021 Tanggal 1 Januari 2021 Dengan nilai kotrak sebesar Rp[197.208.000,- Yaitu pekerjaan pengadaan sewa layanan Cloud database system barang milik daerah Kabupaten Tanah

LKj BPKAD TAHUN 2021

Laut berupa Layanan Sewa Cloud Simda BMD, selama setahun . Adapun proses pembayaran layanan sewa cloud tersebut PT. Lawang Sewu mengirimkan Invoicenya tiap dua bulan sekali, baru kita lakukan pembayaran. Sampai dengan Triwulan IV sesuai target 12 bulan telah selesai direalisasikan pembayarannya yang setiap bulan dibayar sebesar Rp16.434.000. Sub Kegiatan ini menargetkan 16 dokumen dan telah terealisasi 100% yaitu jumlah dokumen KIB SKPD yang terupdate sesuai ketentuan sebanyak 16 dokumen dengan rincian sebagai berikut yaitu :

1. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Tanah (KIB A) Unaudit 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
2. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Tanah (KIB A) Audited 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
3. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B) Unaudit 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
4. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B) Audited 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
5. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan (KIB C) Unaudit 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
6. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan (KIB C) Audited 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
7. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) Unaudit 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
8. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) Audited 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
9. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya (KIB E) Unaudit 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
10. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya (KIB E) Audited 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
11. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Kontruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) Unaudit 40 SKPD per 31 Desember 2020 .
12. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Kontruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) Audited 40 SKPD per 31 Desember 2020 .

13. Buku Rekap Mutasi Barang Milik Daerah Unaudit Tahun Anggaran 2020
14. Buku Rekap Mutasi Barang Milik Daerah Audited Tahun Anggaran 2020
15. Buku Induk Inventaris Kabupaten per 31 Desember 2020
16. Buku Induk Inventaris Kabupaten Ekstrakomtabel per 31 Desember 2020

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

- 1). Adanya perubahan Aplikasi Keuangan dari SIMDA Keuangan ke Aplikasi SIPD , sehingga bidang Penatausahaan Aset kesulitan memperoleh data Belanja SKPD.
- 2). Adanya mutasi promosi staf Bidang Penatausahaan Aset dan pengurus barang SKPD, sehingga kekurangan SDM staf Bidang Penatausahaan Aset dan Pengurus Barang di SKPD.
- 3). Adanya beban kerja yang dirangkap oleh Pengurus Barang SKPD.
- 4). Adanya beberapa temuan hasil audit BPK terkait penatausahaan aset yang belum tertib di beberapa SKPD.
- 5). Adanya beberapa SKPD yang belum menyampaikan Laporan Realisasi Barang Milik Daerah per 31 Desember 2021

Rencana Aksi

- 1). Pengurus Barang SKPD wajib memberikan informasi data secara berkala tentang pengadaan BMD di SKPD melalui Surat Edaran.
- 2). Mengusulkan penambahan staf ke BKPSDM melalui sekretariat untuk mengganti staf yang promosi serta meningkatkan SDM Pengurus Barang yang baru di SKPD melalui Pendampingan dalam menyusun Laporan BMD SKPD.
- 3). Memberikan apresiasi kepada Pengurus Barang SKPD yang berprestasi dalam pengelolaan BMD.
- 4). Menindaklanjuti hasil temuan audit BPK dengan melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait untuk meningkatkan Kualitas Laporan BMD Kabupaten Tanah Laut Agar bisa meraih WTP di Tahun 2021.
- 5). Membuat surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan agar segera menginformasikan ke Pengurus Barang SKPD agar menyampaikan laporan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Foto - Foto Kegiatan Kasubbid Inventarisasi Triwulan III Tahun 2021
1). Foto Foto Kegiatan





2.1.10. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 10

Sasaran Strategis nomor 10 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Penatausahaan Aset atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

7. ESELON III.B (Kepala Bidang Penatausahaan Aset)

Sasaran strategis nomor 10 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penatausahaan Aset dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10
Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
10	Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	12	Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	108,80	108,80	100	2700	2700	100	850	850
			Rata-rata capaian kinerja				100,00			108,80			2700,00			850,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan capaian kinerjanya dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan juga peningkatan kinerja menyesuaikan dengan usulan yang disampaikan SKPD, sehingga capaian kinerja ada yang tercapai 100% pada tahun 2018, pada tahun 2019 melebihi target yaitu 108,80%, sedangkan pada tahun 2020 adalah yang paling tinggi capaian kinerjanya yaitu 2.700% dan pada tahun 2021 capaian kinerja juga telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 850% namun mengalami penurunan sebesar 1000% dari tahun 2020. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 10 Kepala Bidang Penatausahaan Aset ini telah dilaksanakan oleh Kasubbid

Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan dibawah ini.

7.2). ESELON IV.A1 (Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan)

Untuk mendukung Sasaran strategis No 10 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Penatausahaan Aset diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan yaitu dengan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Tahun 2021 sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kinerja Utama		Indikator Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan lelang umum BMD SKPD sesuai ketentuan	1	Jumlah BMD SKPD yang telah dilelang sesuai ketentuan	1 kegiatan	2 kegiatan	200%
2	Melaksanakan pemindahtanganan BMD SKPD sesuai ketentuan	2	Jumlah BMD SKPD yang telah dipindahtangankan sesuai ketentuan	2 Dokumen BMD	17 Dokumen BMD	850%

3	Melaksanakan Pemusnahan BMD SKPD sesuai ketentuan	3	Jumlah BMD SKPD yang telah dimusnahkan sesuai ketentuan	5 Kegiatan Pemusnahan	19 Kegiatan Pemusnahan	380%
4	Melaksanakan Penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	4	Jumlah BMD SKPD yang telah dihapuskan sesuai ketentuan	12 Dokumen BMD	33 Dokumen BMD	275%
5	Melaksanakan Penyusunan Laporan Hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	5	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
6	Melaksanakan Penilaian BMD terkait Pengelolaan BMD	6	Jumlah BMD SKPD yang sudah dinilai sesuai ketentuan	10 BMD	61 BMD	610%
7	Melaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan BMD	7	Jumlah SKPD yang telah tersosialisasi dan menerapkan peraturan terkait pengelolaan BMD sesuai ketentuan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
8	Melaksanakan Sosialisasi JFT Penatalaksana barang	8	Jumlah SKPD yang telah tersosialisasi terkait JFT Penatalaksana barang	1 Kegiatan	1 kegiatan	100%

9	Melaksanakan FGD/Pembinaan SKPD dlm rangka Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	9	Jumlah SKPD yang mengikuti FGD Pembinaan dan menerapkan pengelolaan BMD sesuai ketentuan	1 Kegiatan	1 kegiatan	100%
---	---	---	--	------------	------------	------

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran RP	Realisasi	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						
A.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah						
1	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			117.053.950	69.604.600	59,46 %	
		Jumlah SKPD peserta	40 SKPD		40 SKPD	100 %	

		Pembinaan Pengelolaan BMD					
2	Penilaian Barang Milik Daerah			189.771.140	70.721.250	37,26 %	
		Jumlah Obyek BMD yang dinilai untuk dicatat, dimanfaatkan dan dipindahtangankan	41 Obyek		61 Obyek	148,78 %	

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Tahun 2021

Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tahun Anggaran 2021 Triwulan IV telah dilakukan kegiatan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan sesuai dengan ketentuan, dengan hasil sebagai berikut :

- I. Kegiatan lelang umum BMD pertama telah dilaksanakan pada 7 Juli 2021 di KPKNL Banjarmasin, dari 45 slot lelang laku terjual 39 slot. 2 slot wanprestasi dan 4 slot tidak ada penawar dan lelang kedua pada 28 Oktober 2021 di KPKNL Banjarmasin dari 5 slot lelang tidak ada penawar.

- II. Kegiatan Pemindahtanganan BMD direncanakan 2 dokumen (Politala dan Masjid Al Muhajirin Panggung) ternyata realisasi pemindahtanganan dalam bentuk hibah keluar sebanyak 17 (tujuh belas) berkas/kegiatan

1	Politala	10	Masjid darul Istiqomah tanjung
2	Masjid Al Muhajirin Panggung	11	Yayasan Nurul Muhibbin Desa Ketapang
3	Yayasan Al Muhibbin Sarang halang	12	PSNU Pagar Nusa Martadah Baru
4	Masjid Al Manar	13	BPK Palam Pelaihari
5	Langgar Hubbul Mustofa	14	Ponpes Ihya iddin Sei Riam
6	Langgar Darul Fallah	15	Rumah Tahfidz Nurul Ulum
7	Ponpes ihya Ulu muddin Tirta Jaya	16	Yayasan Anak Yatim Nurul Anwar Asam-Asam
8	Masjid Pehin	17	Majelis Ta'lim dan dzikir Al-Muawanah Batu Ampar
9	Kejaksaan Negeri Tanah Laut		

Hibah masuk sebanyak 10 (sepuluh) berkas berupa

1	tanah di Batilai	6	tanah lapangan di sungai rasau
2	tanah di Martadah Baru	7	tanah lapangan di kurau utara.
3	tanah makam di Tungkaran	8	tanah makam keramat di bati-bati
4	tanah di kandang lama	9	Peralatan mesin dari kementerian Kesehatan RI
5	tanah jalan di Pelaihari	10	Peralatan mesin dari Pemerintah Provinsi Kalsel

Pemindahtanganan mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan usulan untuk hibah sulit diprediksi;

III. Kegiatan pemusnahan di rencanakan 5 kegiatan (Dishub,BPKAD,Inspektorat ,Dispora dan Dinkes) ternyata realisasi sebanyak 32 kegiatan

1	Dishub	17	Disnakerind
2	BPKAD	18	Isnpektorat
3	Inspektorat	19	Dispora
4	Dispora	20	Diskopdag
5	Dinkes	21	Kecamatan Batu Ampar
6	BPKAD	22	DPRKPLH
7	Inspektorat	23	Kecamatan Kintap
8	Dinkes	24	Kecamatan Takisung
9	Dispar	25	Kecamatan Bumi Makmur
10	Dinkes	26	Diskominfo
11	DPUPRP	27	BPKAD
12	Disdikbud	28	Disdikbud
13	DPRKPLH	29	Sekretariat Daerah
14	Dishub	30	Satpolppdamkar
15	DPRKPLH	31	DPRKPLH
16	Diskopdag	32	DPUPRP

hal ini dikarenakan usulan pemusnahan dari SKPD sulit diprediksi bahkan satu SKPD bisa lebih dari satu usulan;

IV. Kegiatan penghapusan barang milik daerah Kab. Tanah Laut yang direncanakan 12 Dokumen Surat Keputusan ternyata realisasi menerbitkan sebanyak 60 (enam puluh) Surat Keputusan dengan rincian sebagai berikut :

- Sebanyak 4 (empat) Surat Keputusan Bupati Tanah Laut selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD tentang Penghapusan BMD Kab. Tanah Laut dari Daftar Barang Pengelola Barang dan ;
- Sebanyak 56 (lima puluh enam) Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Tanah Laut selaku Pengelola Barang tentang Penghapusan BMD Kab. Tanah Laut dari Daftar Barang Pengguna Barang.

Dari 60 (enam puluh) Surat Keputusan penghapusan BMD disebabkan :

1. Karena Pemindahtanganan (Hibah keluar/penjualan) : 16 SK;
2. Karena Pengalihan Status Penggunaan : 0 SK;
3. Karena Pemusnahan : 30 SK;
4. Karena peraturan perundang-undangan : 1 SK;
5. Karena Sebab Lain : 13 SK.

hal ini dikarenakan usulan penghapusan dari SKPD sulit diprediksi bahkan satu SKPD bisa lebih dari satu usulan penghapusan dengan berbagai sebab penghapusannya

- V. Penyusunan Laporan Hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD SKPD telah dibuat sebanyak 4 dokumen rekapitulasi kegiatan selama satu tahun terdiri dari laporan hibah masuk, laporan hibah keluar, laporan pemusnahan dan laporan penghapusan.
- VI. Kegiatan Penilaian BMD terkait Pengelolaan BMD di rencanakan menilai 10 BMD (R4. 9 buah dan 1 buah Genset) ternyata realisasinya mencapai 45 BMD (R4. 8 buah, 1 buah Genset, R2. 20 buah, inventaris kantor 8 buah dan 8 buah scrup) yang dinilai, hal ini dikarenakan untuk efisiensi biaya penilaian, dengan biaya yang sama tapi masih bisa menambah jumlah BMD yang dinilai.
- VII. Sosialisasi terkait pengelolaan BMD yang direncanakan 2 kegiatan sudah terealisasi 2 kegiatan sesuai target (Sosialisasi pengelolaan BMD oleh BPKP pada 16 Februari 2021 dan Sosialisasi lelang E-auction pada 27 Mei 2021)
- VIII. Sosialisasi JFT Penatalaksana barang direncanakan 1 kali sosialisasi sudah terealisasi 1 kali kegiatan sesuai target pada 9 Desember 2021.

- IX. FGD/Pembinaan SKPD dalam rangka Pengelolaan BMD sesuai ketentuan yang direncanakan 1 kali di PT Lawang Sewu Tecknologi juga sudah dilaksanakan sesuai target pada 30 November s/d 2 Desember 2021.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2021

- 1). Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 117.053.950,-dengan realisasi sd TW IV sebesar Rp. 69.604.600 atau sebesar 59,46% dilaksanakan pada 11 s/d 21 Oktober 2021 pada 40 SKPD dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga jumlah personil yang direncanakan semula 8 orang disesuaikan sehingga masih ada anggaran perjalanan dinas dalam kota yang tidak terserap.
- 2).Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 189.771.140,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 70.721.250, sebesar 37,26% dilaksanakan penilain untuk penjualan pada 12 s/d 14 April 2021 dan penilaian untuk pemanfaatan pada 22 s/d 26 Nopember 2021 sedangkan penilaian untuk pencatatan dalam neraca tidak dijadwalkan oleh KPKNL sehingga masih ada anggaran perjalanan dinas untuk penilai dari KPKNL dan perjalanan dinas pendamping penilai dari BPKAD yang tidak terserap.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

- Ketergantungan dengan penilai pemerintah (KPKNL Banjarmasin)
- Pemerintah Kabupaten Tanah Laut belum memiliki penilai pemerintah

Rencana Aksi

- Menyiapkan data pemindahtanganan, pemanfaatan dan pencatatan barang milik daerah;
- Mengintensifkan komunikasi dengan KPNKL untuk Penilai BMD;
- Menyiapkan perangkat lunak untuk lelang on line (E-Auction)

C. Foto Kegiatan Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Triwulan IV Tahun 2021

1). Foto Pemindahtanganan (hibah ke Politala)





Hibah masuk dari tan selamat sungai rasau



Hibah masuk dari H.ahmadi kurau utara



Hibah masuk dari Aliansyah Desa Tungkaran



Hibah Masuk dari H.Hasbullah Desa Bati-Bati



**2). Foto Pemusnahan
a. Upt Tanjung dewa**



b. Rumah Negara



c. mushola dan parkir



d. Panjat dinding GOR



e. Peralatan mesin





- **Penilaian BMD untuk penjualan secara lelang**



4. Proses lelang

LKj BPKAD TAHUN 2021



8.ESELON III.A (SEKRETARIS)

1.1.11. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 11

Sasaran Strategis nomor 11 adalah menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Eselon III.A sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis Nomor 11 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11
Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
11	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	13	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100,00			100,00			100,00			100,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas pemenuhan sarpras perkantoran dengan indikator sasaran Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik capaian kinerjanya trendnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%, dibuktikan dengan telah terlayannya pemenuhan sarana prasarana di Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 11 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021.

8.ESELON III.A (SEKRETARIS)

1.1.12. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 12

Sasaran Strategis nomor 12 adalah menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Eselon III.A sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani

Sasaran strategis Nomor 12 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada table sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12
Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
12	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	14	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100,00			100,00			100,00			100,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD dengan indikator sasaran Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dan terpelihara dengan baik capaian kinerjanya dari tahun ke tahun mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%, dibuktikan dengan terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 12 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan dibawah ini.

8.1). ESELON IV.A1 (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)

Untuk mendukung Sasaran Strategis No 11 dan Sasaran Strategis No 12 yang menjadi tanggungjawab Sekretaris diatas dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian yaitu dengan melaksanakan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditandatangani.

Pengelolaan administrasi perkantoran merupakan kegiatan rutin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, meliputi pelayanan surat masuk dan surat keluar, pelayanan sarana dan prasarana, pelayanan administrasi kepegawaian sebanyak 46 PNS dan 19 PTT dan semua terlayani dengan baik 100%.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021 sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	Jumlah Administrasi Perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	1 Jenis Pelayanan (Surat Menyurat)	1 Jenis Pelayanan (Surat Menyurat)	100%
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan sarpras SKPD dengan baik	Jumlah Sarana prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Pelayanan (Gedung dan Kendaraan Dinas Operasional)	2 Jenis Pelayanan (Gedung dan Kendaraan Dinas Operasional)	100%
3	Melaksanakan pemenuhan dan peningkatan kualitas S/DM SKPD	Jumlah S/DM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	44 ASN dan 19 PTT	44 ASN dan 19 PTT	100%

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
A.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.966.800	62.000	3,15	
		Jumlah jenis	1 jenis		1 jenis	100	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.570.000	689.200	43,90	
		Jumlah jenis	1 jenis		1 jenis	100	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			212.075.924	197.000.984	92,89	
		Jumlah jenis	6 jenis		6 jenis	100	
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			263.665.383	148.065.237	56,16	
		Jumlah jenis	3 jenis		3 jenis	100	
A.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800.000	800.000	44,44	
		Jumlah SKM	2 SKM		2 SKM	100	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			14.269.640	10.293.000	72,13	
		Jumlah jenis	10 jenis		10 jenis	100	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			59.231.810	47.369.000	79,97	
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	2 jenis		2 jenis	100	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.027.233.314	943.427.670	91,84	
		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis		7 jenis	100	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			965.750.000	750.712.056	77,73	
		Jumlah jenis	3 jenis		3 jenis	100	
A.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

10	Pemeliharaan Mebel			10.000.000	9.900.000	99,00	
		Jumlah jenis	1 jenis		1 jenis	100	
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			10.205.000	8.540.000	83,68	
		Jumlah jenis	1 jenis		1 jenis	100	
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			40.150.000	32.750.000	81,57	
		Jumlah jenis	12 jenis		12 jenis	100	
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			152.200.000	142.515.500	93,64	
		Jumlah jenis	1 jenis		1 jenis	100	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			79.727.880	35.401.650	44,40	
		Jumlah jenis	2 jenis		2 jenis	100	
A.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
15	Pengadaan Mebel			24.895.200	23.654.550	95,02	
		Jumlah jenis pengadaan mebel	1 jenis		1 jenis	100	
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			137.257.890	135.100.000	98,43	
		Jumlah jenis pengadaan	1 jenis		1 jenis	100	
A.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0	0	0	
		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	5 ASN		0	0	
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			48.125.000	44.275.000	92,00	
		Jumlah ASN	50 ASN		50 ASN	100	

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dengan baik

Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dengan baik

- 1) Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dengan indikator Jumlah Administrasi Perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 1 jenis pelayanan yaitu (surat menyurat), sampai dengan Triwulan IV ini telah terealisasi capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Melaksanakan pemenuhan pelayanan sarpras SKPD dengan baik dengan indikator Jumlah Sarana prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 2 Jenis Pelayanan (Gedung dan Kendaraan Dinas Operasional) sampai dengan Triwulan IV ini telah terealisasi capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Melaksanakan pemenuhan dan peningkatan kualitas S/DM SKPD dengan indikator Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 44 ASN dan 19 PTT sampai dengan Triwulan IV ini telah terealisasi capaian kinerja sebesar 100%.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2021

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 1.966.800,00 dengan realisasi s/d Triwulan IV sebesar Rp. 62.000,00 atau capaian 3,15%; Dengan target 1 jenis pelayanan yaitu (surat menyurat) baik pelayanan surat masuk maupun surat keluar dan telah terealisasi 100%. Sedangkan realisasi keuangan hanya tercapai sebesar 3,15% dikarenakan hanya sesuai kebutuhan dan digunakan efektif dan efisien, yaitu belanja paket pengiriman.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 1.570.000,00 dengan realisasi s/d Triwulan IV sebesar Rp. 689.200,00 atau capaian 43,90%; Dengan target kinerja yaitu 1 jenis pelayanan yaitu melayani pembayaran BBM untuk Genset sehingga capaian kinerja terealisasi 100%.. Sedangkan realisasi keuangan hanya tercapai sebesar 43,90% dikarenakan hanya sesuai kebutuhan dan digunakan efektif dan efisien, yaitu belanja BBM untuk mesin genset.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 212.075.924,00 dengan realisasi s/d Triwulan IV sebesar Rp. 197.000.984,00 atau capaian 92,89%; Dengan target kinerja 6 Jenis pelayanan yaitu: penyediaan bahan pembersih, pembayaran gaji PTT petugas keamanan, pembayaran gaji PTT petugas Kebersihan dan pembayaran gaji PTT petugas Administrasi, pelayanan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan PTT, Pembayaran iuran jaminan Kecelakaan Kerja PTT dan pembayaran iuran jaminan Kematian PTT

serta penyediaan peralatan keamanan kantor, sehingga telah terealisasi capaian kinerjanya sebesar 100%

- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 263.665.383,00 dengan realisasi s/d Triwulan IV sebesar Rp. 148.065.237,00 atau capaian sebesar 56,16%; Dengan target kinerja sebanyak 3 Jenis pelayanan yaitu : Pelayanan dalam pemenuhan ketersediaan Listrik, Internet dan Telepon, sehingga telah tercapai kinerja sebesar 100%. Sedangkan realisasi keuangan hanya tercapai sebesar 56,16% dikarenakan hanya sesuai kebutuhan dan digunakan efektif dan efisien, yaitu belanja Listrik, Internet dan Telepon.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 1.800.000,00 dengan realisasi s/d Triwulan IV sebesar Rp. 800.000,00 atau capaian sebesar 44,44%; Dengan target kinerja adalah 2 SKM (surat kabar mingguan) yaitu SKM Banjarmasin Post dan SKM Radar Banjar) dan telah terbayar selama 12 bulan, sehingga telah terealisasi sebesar 100%. Sedangkan realisasi keuangan hanya tercapai sebesar 44,44% dikarenakan hanya sesuai kebutuhan dan digunakan efektif dan efisien, yaitu belanja 2 Surat Kabar Mingguan..
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 14.269.640,00 dengan realisasi s/d Triwulan IV sebesar Rp. 10.293.000,00 atau capaian sebesar 72,13%; Dengan target kinerja adalah 10 Jenis yaitu Belanja barang keperluan kantor terdiri dari : Baterai AA, Baterai AAA, Colokan Listrik, Fiting lampu, Kabel NYM, Lampu 18 Watt, Lampu 23 Watt, Lampu 32 Watt, Lampu LED dan Stop Kontak.
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 59.231.810,00 dengan realisasi s/d Triwulan IV sebesar Rp. 47.369.000,00 atau capaian 79,97%; Dengan target kinerja sebanyak 2 Jenis pelayanan yaitu : Penyediaan Barang cetakan dan penyediaan belanja sewa mesin fotocopy, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
- 8) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 1.027.233.314,00 dengan realisasi s/d Triwulan IV sebesar Rp 943.427.670,00 atau capaian 91,84%; Dengan target kinerja sebanyak 7 Jenis pelayanan yaitu : Pengadaan ATK, kertas dan Cover, Aksesoris computer, Bendera / umbul-umbul, Belanja Modal alat bengkel, belanja Modal alat kantor, Belanja Modal Komputer. Sehingga telah terealisasi sebesar 100%.
- 9) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 965.750.000,00 dengan realisasi s/d Triwulan IV sebesar Rp. 750.712.056,00 atau capaian 77,73%; Dengan target kinerja sebanyak

3 Jenis pelayanan yaitu: Pelayanan makan & minum rapat, pelayanan makan dan minum tamu dan belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi s/d Triwulan IV sebesar Rp. 9.900.000,00 atau capaian 99%; Dengan target kinerja sebanyak 1 jenis pelayanan yaitu pelayanan pemeliharaan meja kursi tamu, sehingga kinerja tercapai 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 10.205.000,00 dengan realisasi s/d Triwulan IV sebesar Rp. 8.540.000,00 atau capaian 83,68%; Dengan target kinerja sebanyak 1 Jenis yaitu pelayanan Pemeliharaan Mobil Jabatan Kepala BPKAD (berupa BBM) telah terealisasi kinerja sebesar 100%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 40.150.000,00 dengan realisasi s/d Triwulan IV sebesar Rp 32.750.000,00 atau capaian 81,57%; Dengan target kinerja sebanyak 12 Jenis yaitu: berupa 12 unit AC, Komputer, Laptop, Printer dan UPS Server dengan realisasi kinerja sebesar 100%.
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 152.200.000,00 dengan realisasi s/d Triwulan IV sebesar Rp. 142.515.500,00 atau capaian 93,64%; Dengan target kinerja sebanyak 1 jenis Unit Gedung Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut, dengan realisasi kinerja sebesar 100%.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 79.727.880,00 dengan realisasi s/d Triwulan IV sebesar Rp 35.401.650,00 atau capaian 44,40%; 2 Jenis berupa pemeliharaan Mobil Operasional dan kendaraan Dinas BPKAD Kab . Tanah Laut, dengan realisasi kinerja sebesar 100%.. Sedangkan realisasi keuangan hanya tercapai sebesar 44,40% dikarenakan hanya sesuai kebutuhan dan digunakan efektif dan efisien, yaitu belanja BBM mobil operasional dan kendaraan dinas BPKAD.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 6) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 24.895.200,00 dengan realisasi s/d Triwulan IV sebesar Rp. 23.654.550,00 atau capaian 95,02%; Dengan target kinerja sebanyak 1Jenis Pengadaan Mebel berupa kursi kerja sebanyak 18 buah. dengan realisasi kinerja sebesar 100%.
- 7) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 137.257.890,00 dengan realisasi s/d Triwulan IV sebesar Rp. 135.100.000,00 atau capaian 98,43%; Dengan target kinerja sebanyak 1 Jenis

berupa Pengadaan Kendaraan Roda 2 sebanyak 7 unit bagi 7 orang Pejabat eselon IV dilingkungan BPKAD Kab. Tanah Laut. dengan realisasi kinerja sebesar 100%.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 8) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi s/d Triwulan IV sebesar Rp. 0,00 dikarenakan tidak dapat dilaksanakan masih masa pandemi COVID-19 sehingga pada APBD Perubahan pagu Sub Kegiatan ini dihapuskan.
- 9) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 48.125.000,00 dengan realisasi s/d Triwulan IV sebesar Rp. 44.275.000,00 atau capaian 92,00%. Dengan target kinerja sebanyak 44 ASN dilingkup BPKAD telah terealisasi 100%.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

- Tidak ada permasalahan/kendala yang berarti (masih bisa diatasi).

Rencana Aksi

- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada ASN BPKAD untuk Tahun 2021.

Foto – Foto Kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2021



<p><i>Pemusnahan BMD</i></p> 	<p><i>Distribusi Surat</i></p> 
<p><i>Pemeliharaan Sarpras (Toilet)</i></p> 	<p><i>Pemeliharaan Sarpras (Parkir)</i></p> 
<p><i>Rapat Banggar APBD 2022 di Banjarmasin</i></p>	<p><i>Konsultasi & Koordinasi Layanan Cloud</i></p>



Pengadaan Barang (Videowall)

Pengadaan Barang (Videowall)



Pengadaan Barang (Sound System)

Pengadaan Barang (Water Boiler)



Rapat DAK dipimpin Bupati Tanah Laut

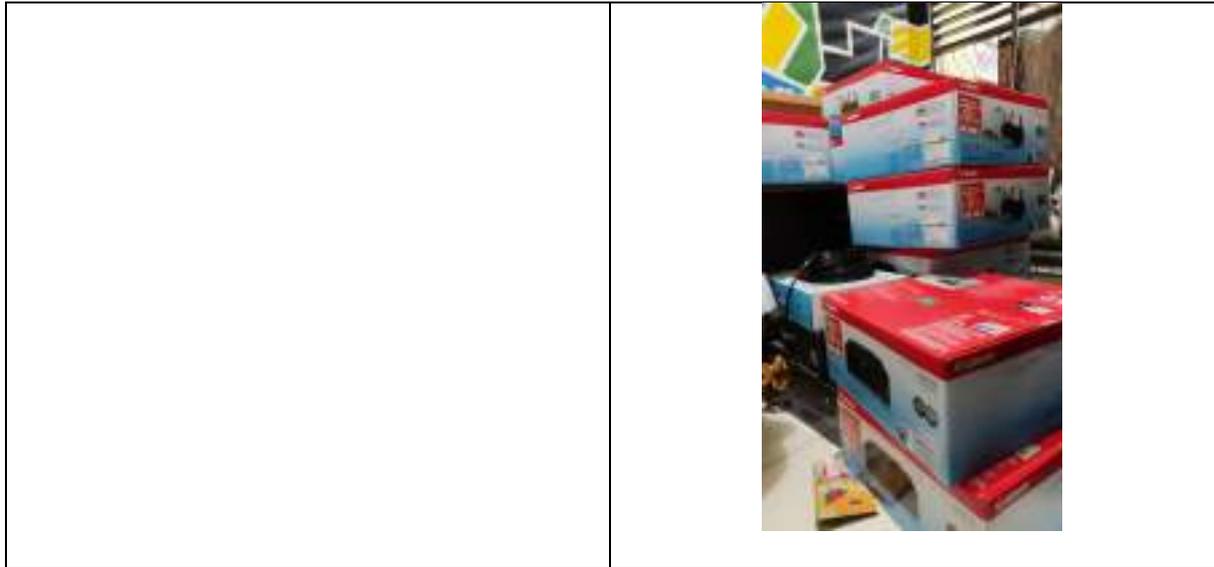
Banner Kaca Pintu Depan



Pengadaan Barang (Printer)

Pengadaan Barang (Laptop, PC, Printer)





8.ESELON III.A (SEKRETARIS)

1.1.13 Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 13

Sasaran Strategis nomor 13 adalah menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Eselon III.A sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis Nomor 13 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada table sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13
Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
13	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	15	Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100,00			100,00			100,00			100,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja SKPD dengan indikator sasaran Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan capaian kerjanya setiap tahunnya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%, dibuktikan dengan telah disajikannya dokumen perencanaan (Renstra,Renja,RKA,DPA) dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 13 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan dibawah ini.

8.2). ESELON IV.A1 (Kasubbag Perencanaan)

Untuk mendukung Sasaran Strategis No 13 yang menjadi tanggungjawab Sekretaris diatas dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan yaitu dengan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbag Perencanaan Tahun 2021 sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai ketentuan	1	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%

2	Melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan	2	Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD	3 dokumen	3 Dokumen	100%
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan kinerja SKPD	3	Jumlah dokumen Laporan Monitoring & Evaluasi perencanaan kinerja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100%
4	Melaksanakan penyusunan SAKIP SKPD	4	Jumlah dokumen SAKIP SKPD	8 dokumen	8 Dokumen	100%
5	Melaksanakan penyusunan dokumen SKM SKPD	5	Jumlah dokumen SKM SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran RP	Realisasi	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
A.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.276.200	1.888.000	82,95	
		Jumlah dokumen	1 Dok		1 Dok	100	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.553.000	2.200.000	86,17	
		Jumlah dokumen	1 Dok		1 Dok	100	
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			5.143.190	4.477.000	87,05	
		Jumlah dokumen	1 Dok		1 Dok	100	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			6.182.960	4.627.700	74,85	

		Jumlah dokumen	2 Dok		2 Dok	100	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9.963.600	8.093.000	81,23	
		Jumlah dokumen	4 Dok		4 Dok	100	
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.981.060	7.865.000	78,80	
		Jumlah dokumen	2 Dok		2 Dok	100	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.569.000	3.420.000	95,83	
		Jumlah dokumen	6 Dok		6 Dok	100	

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbag Perencanaan Tahun 2021

Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021

- 1). Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 2 dokumen yaitu (Renja Murni Thn 2022 dan Renja Perubahan Thn 2021), sampai Triwulan IV Tahun 2021 ini telah terealisasi 100% dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2021 dan SK Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut Nomor : 050.13/18/BPKAD/2021 tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan dengan telah ditetapkannya SK Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut Nomor : 050.13/19/BPKAD/2021 tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, sehingga dengan demikian realisasi kinerja telah tercapai 100%.
- 2). Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD dengan Target Kinerja Sebanyak 3 dokumen yaitu (Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020, LKPJ Thn 2020 dan LPPD Thn 2020) telah terealisasi seluruhnya sebanyak 3 dokumen, sehingga realisasi capaian kinerja telah tercapai 100%.
- 3). Jumlah dokumen Laporan monitoring dan evaluasi perencanaan dan kinerja SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 4 dokumen yaitu (Lap. Monev Tw I, Lap . Monev Tw II, lap. Monev Tw III dan Lap. Monev Tw IV Thn 2021), sampai dengan Tw IV ini telah terealisasi yaitu 4 Dokumen terdiri dari : 1 Dokumen Laporan Triwulan I Thn 2021 dan 1 Dokumen Laporan Triwulan II Thn 2021, 1 Dokumen Laporan Triwulan III Thn 2021 dan 1 Dokumen Laporan Triwulan IV Thn 2021, sehingga capaian kinerja terealisasi sebesar 100%.

- 4). Jumlah Dokumen SAKIP SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 8 dokumen yaitu (Renstra 2018-2023, Renja Thn 2020, Renja Thn 2021, Perjanjian Kinerja Thn 2020, IKU Thn 2020, Pohon Kinerja Thn 2020, Laporan Kinerja Thn 2020, Matrik Keselarasan Thn 2020), sampai dengan Tw II ini seluruh dokumen sebanyak 8 dokumen tersebut telah terealisasi 100% dengan telah di upload pada Aplikasi ESR Menpan RB pada tanggal 30 Maret 2021 dan sampai Triwulan II thn 2021 ini masih melakukan tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dengan melengkapi data-data berupa : 1) Laporan Kinerja Triwulan I Thn 2021 2) Laporan Kinerja Triwulan II Thn 2021 3). Metadata LKE Semester I Thn 2021.
- 5). Jumlah dokumen SKM SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 1 dokumen yaitu (Dokumen SKM Thn 2021), telah terealisasi dengan SK Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Hasil SKM BPKAD Tanah Laut Nomor : 800/ 17 /BPKAD/2021 tanggal 29 Juni 2021, sehingga capaian kinerja telah tercapai 100%.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2021

- 1). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 2.276.200,- dengan realisasi sd Tw IV sebesar Rp 1.888.000,- atau capaian sebesar 82,95%. Sub Kegiatan ini target kinerja sebanyak 1 Dokumen sampai dengan Tw IV telah terealisasi sebanyak 1 dokumen yaitu 1 Dokumen Perubahan RKA Tahun 2021, sehingga dengan demikian capaian terealisasi 100%.
- 2). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 2.553.000,- dengan realisasi keuangan sd Tw IV sebesar Rp 2.200.000 atau capaian sebesar 68,17%. Sub Kegiatan ini target kinerja sebanyak 1 Dokumen sampai dengan Tw IV telah terealisasi sebanyak 1 dokumen yaitu 1 Dokumen RKA Tahun 2022, sehingga dengan demikian capaian terealisasi 100%.
- 3). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 5.143.190,- dengan realisasi sd Tw IV sebesar Rp 4.477.000,- atau capaian sebesar 87,05%, Sub Kegiatan ini target kinerja sebanyak 1 Dokumen sampai dengan Tw IV telah terealisasi sebanyak 1 dokumen yaitu 1 Dokumen DPA Perubahan Tahun 2021 dengan telah ditetapkannya PAPBD Perubahan 2021 DPA Perubahan Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021 tanggal 28 Oktober 2021 , sehingga dengan demikian capaian terealisasi 100%.
- 4). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 6.182.960,- dengan realisasi sd Tw IV sebesar Rp 4.627.700,- atau capaian sebesar 74,85%. Sub Kegiatan ini target kinerja sebanyak 2 Dokumen sampai dengan Tw IV telah terealisasi sebanyak 2 dokumen yaitu 1). Dokumen DPA tahun 2021 dengan telah ditetapkannya APBD Tahun 2021 DPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021 tanggal 4 Januari 2021 2). Dokumen

DPA tahun 2022 dengan telah ditetapkannya APBD Tahun 2022 DPA Nomor : DPA/A/1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 sehingga dengan demikian capaian terealisasi 100%.

- 5). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 9.963.600,- dengan realisasi sd Tw IV sebesar Rp 8.093.000,- atau capaian keuangan sebesar 58,14%, capaian keuangan masih 81,23%. Sub Kegiatan ini target kinerja sebanyak 4 Dokumen sampai dengan Tw IV telah terealisasi sebanyak 4 dokumen yaitu 1). LAKIP tahun 2020 2). LKPJ Tahun 2020 3). LPPD Tahun 2020 4). SKM Tahun 2021 sehingga dengan demikian capaian 100%.
- 6). Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 9.981.060,- dengan realisasi sd Tw IV sebesar Rp 7.865.000,- atau capaian sebesar 78,80%, Sub Kegiatan ini target kinerjanya berjumlah 2 Dokumen yaitu 1). Dokumen Renja Tahun 2022 2). Dokumen Renja Perubahan Tahun 2021 dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2021 dan SK Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut Nomor : 050.13/18/BPKAD/2021 tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan dengan telah ditetapkannya SK Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut Nomor : 050.13/19/BPKAD/2021 tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, sehingga dengan demikian realisasi kinerja telah tercapai 100%.
- 7). Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 3.569.000,- dengan realisasi sd Tw IV sebesar Rp 3.420.000,- atau capaian sebesar 95,83%. Sub Kegiatan ini target kinerjanya berjumlah 6 Dokumen yaitu Jumlah dokumen Laporan monitoring dan evaluasi perencanaan dan kinerja SKPD yaitu (Lap. Monev Tw I, Lap . Monev Tw II, lap. Monev Tw III dan Lap. Monev Tw IV Thn 2021, Laporan Semester I dan Laporan Semester II), sampai dengan Tw IV ini telah terealisasi yaitu 6 Dokumen terdiri dari :1). 1 Dokumen Laporan Semester II Tahun 2020, 2). 1 Dokumen Laporan Triwulan I Thn 2021 3). 1 Dokumen Laporan Triwulan II Thn 2021 4). 1 Dokumen Laporan Semester I Tahun 2021 5). 1 Dokumen Laporan Triwulan III Thn 2021 6). 1 Dokumen Laporan Triwulan IV Tahun 2021, sehingga capaian kinerja terealisasi sebesar 100%.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

- Tidak ada permasalahan dan kendala yang dihadapi

Rencana Aksi

- Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja BPKAD untuk Tahun 2021

Foto - Foto Kegiatan Kasubbag Perencanaan SD Triwulan III Tahun 2021

1). Foto 3 (tiga) buah Dokumen Laporan Kinerja SKPD

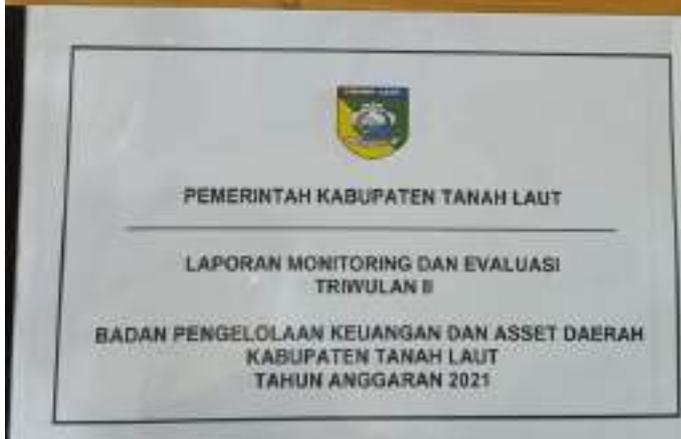
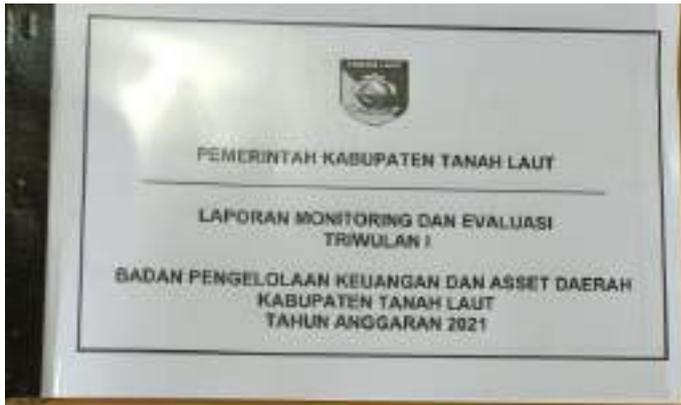
LKj BPKAD TAHUN 2021



2). Foto Dokumen SAKIP SKPD



3). Laporan Monev Kinerja Triwulan I Tahun 2021, Triwulan II Tahun 2021, Laporan Monev Semester I Tahun 2021 dan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2021



4). Dokumen SKM Tahun 2021



5). Dokumen Renja Tahun 2022 dan Renja Perubahan Tahun 2021



6) Dokumen RKA Perubahan Tahun 2021 dan Dokumen RKA Tahun 2022



7). Laporan Laporan Monev Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dan Laporan Monev Semester II Tahun 2021 dan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2021



7) Dokumen DPA Tahun 2021 dan Dokumen DPA Tahun 2022



8.ESELON III.A (SEKRETARIS)

1.1.14 Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 14

Sasaran Strategis nomor 14 adalah menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Eselon III.A sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis Nomor 14 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada table sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14
Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
14	Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	16	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100,00			100,00			100,00			100,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD dengan indikator sasaran Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan capaian kerjanya setiap tahunnya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%, dibuktikan dengan telah terpenuhinya pelayanan penatausahaan keuangan dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan baik dengan realisasi serapan belanja sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 92,88%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 14 Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Keuangan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan dibawah ini.

8.3). ESELON IV.A (Kasubbag Keuangan)

Untuk mendukung Sasaran Strategis No 14 yang menjadi tanggungjawab Sekretaris diatas dilaksanakan oleh Kasubbag Keuangan yaitu dengan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbag Keuangan Tahun 2021 sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan penyusunan laporan keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun)	1	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 Dok	100%
2	Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan SKPD	2	Jumlah dokumen administrasi keuangan SKPD yang akuntabel	75 dokumen	513 Dokumen	684%

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran Rp	Realisasi	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
A.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	4.614.700 – (1.800.000)	3.658.800 – (1.800.000)	79,29	
		Jumlah dokumen	1 Dok	-	1 Dok	100	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	-	-	12.429.950 – (3.150.000)	4.347.400	46,85	
		Jumlah dokumen	18 Dok	-	18 Dok	100	

3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	32.258.510 - 30.683.510	21.365.800	66,23	
		Jumlah dokumen	75 Dok	-	513 Dok	684	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	36.832.015.847	32.026.785.166	86,95	
		Jumlah ASN BPKAD	55	-	55	100	
		Jumlah orang ASN Se Kabupaten Tanah Laut dan Pejabat Daerah Kabupaten yang dibayarkan BPJS, JKK dan JKM	5004	-	5004	100%	

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbag Perencanaan Tahun 2021

Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021

- 1) Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 4 dokumen yaitu (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun), sampai Triwulan IV Tahun 2021 ini Laporan Akhir Tahun 2020 sudah selesai 4 Dokumen (Laporan Akhir Tahun dan Laporan Bulanan selama 12 bulan), sehingga realisasi kinerja tercapai 100%.
- 2) Jumlah dokumen administrasi keuangan SKPD yang akuntabel dengan Target Kinerja Sebanyak 75 dokumen (Dokumen Surat Perintah Membayar) telah terealisasi seluruhnya sebanyak 513 dokumen atau capaian sebesar 684% atau melebihi target dikarenakan adanya sistem aplikasi yang baru dimana proses penatausahaannya tidak lagi melalui PPKD namun melalui bendahara pengeluaran BPKAD sehingga melebihi target.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2021

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran Sebesar Rp 4.614.700,-. Realisasi sd TW III sebesar Rp 3.158.800,- namun pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk makan- minum rapat dikurangi sebesar Rp1.800.000,- sehingga pagu

anggaran menjadi Rp 2.814.700,- dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 1.858.800,- sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 79,29%.

Sub Kegiatan ini target kinerja sebanyak 1 Dokumen sampai dengan TW IV telah terealisasi sebanyak 1 dokumen atau dengan capaian 100%, dokumen tersebut berupa Laporan Akhir Tahun Anggaran 2020 baik yang Unaudited maupun yang Audited.

- 2) Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.429.950,- namun pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk makan- minum rapat dikurangi sebesar Rp 3.150.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp 9.279.950,- dengan realisasi sd TW IV sebesar Rp 4.347.400,- atau capaian sebesar 46,85%.

Realisasi keuangan yang tidak mencapai 50% disebabkan pembelian alat/ bahan untuk kegiatan kantor dibawah harga Standar sehingga anggaran tidak terserap sepenuhnya termasuk PPN.

Sub kegiatan ini mempunyai target kinerja sebanyak 18 Dokumen sampai dengan TW IV telah terealisasi sebanyak 18 dokumen atau dengan capaian 100%.

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 32.258.510,- dengan realisasi sd TW IV sebesar Rp 21.365.800,- atau capaian sebesar 69,63%. Sub kegiatan ini target kinerja sebanyak 75 Dokumen sampai dengan TW IV telah terealisasi sebanyak 513 dokumen atau dengan capaian 684%, dikarenakan adanya sistem aplikasi yang baru dimana proses penatausahaannya tidak lagi melalui PPKD namun melalui bendahara pengeluaran BPKAD sehingga melebihi target.

- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 30.196.152.193,- namun pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dilakukan penambahan pagu anggaran sebesar Rp 6.635.863.654,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp 36.832.015.847,-, sedangkan realisasi sampai dengan TW IV sebesar Rp 32.026.785.166,- atau capaian sebesar 86,95%. Penambahan pagu tersebut diatas dilakukan untuk untuk penganggaran BPJS Kesehatan ASN atas Jasa Sertifikasi Guru Tahun 2021 dan Tahun terhutang 2020.

Sub Kegiatan ini target kinerja sebanyak 55 ASN BPKAD yang dibayarkan gaji dan tunjangannya dan 5004 ASN se Kab & Pejabat Daerah yg dibayarkan BPJS, JKK dan JKM nya setiap bulannya sehingga sampai dengan TW III capaian kinerja fisik tercapai 100%.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

- 1) Kekurangan SDM yang memahami penatausahaan Keuangan Daerah akibat adanya promosi / mutasi staf, salah satunya belum adanya Bendahara Gaji.
- 2) Dengan penerbitan seluruh SPM (termasuk SPM berkenaan dengan Belanja Tidak Terduga (BTT), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah, SPM Dana Bantuan Keuangan Umum, serta SPM Pembiayaan Daerah) semua di Bendahara Pengeluaran SKPD yang mana tahun sebelumnya proses penerbitan ada di Bendahara PPKD, sehingga kadangkala mengganggu proses penatausahaan keuangan selaku SKPD.
- 3) Adanya perubahan proses pencairan dana pada Bank Kalsel, yang mana proses pemindahbukuan berpindah dari pihak Bank ke Bendahara Pengeluaran SKPD.

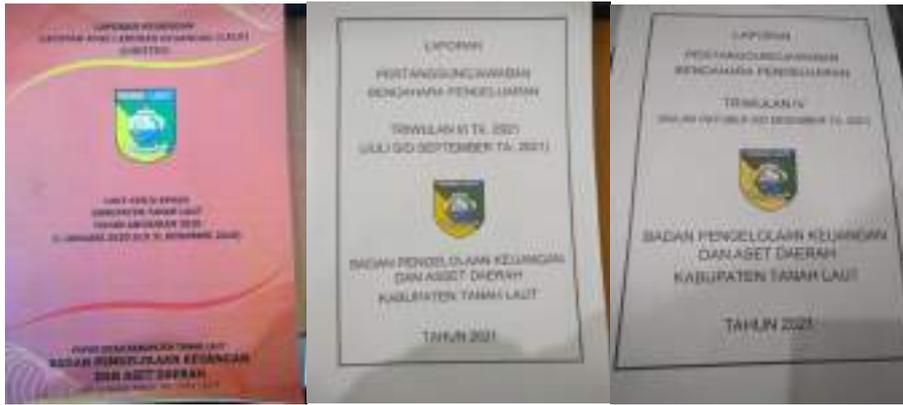
Rencana Aksi

- 1) Mengusulkan penambahan staf yang bisa dibina/ dikaderkan agar memahami Penatausahaan Keuangan Daerah.
- 2) Mengusulkan adanya Pembinaan/ Pelatihan/ Bimtek mengenai Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah.
- 3) Melakukan koordinasi secara berkala dengan PPTK yang mengampu Sub Kegiatan

Foto - Foto Kegiatan Kasubbag Keuangan Triwulan IV Tahun 2021

1). Foto Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan Bendahara Pengeluaran Tahun 2021





2). Foto Dokumen Administrasi Keuangan SKPD Tahun 2021



8.ESELON III.A (SEKRETARIS)

1.1.15 Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 15

Sasaran Strategis nomor 15 adalah menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Eselon III.A sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis Nomor 15 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada table sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	17	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	%	64,15	64,74	100,92	66	74,98	113,61	67	88,43	131,99	68	88,91	130,75
			Rata-rata capaian kinerja				100,92			113,61			131,99			130,75

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator sasaran Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah penilaian LAKIP Tahun 2017 sebesar 100,92% dan tahun 2019 adalah penilaian LAKIP Tahun 2018 sebesar 113,61%, sedangkan Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2020 adalah penilaian LAKIP Tahun 2019 sebesar 131,98%, sedangkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 adalah penilaian LAKIP Tahun 2020 sebesar 130,75% mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 1,23%. Sedangkan untuk mendukung sasaran strategis nomor 15 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 .

8.2). ESELON IV.A1 (Kasubbag Perencanaan)

Untuk mendukung Sasaran Strategis No 15 yang menjadi tanggungjawab Sekretaris diatas dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan yaitu dengan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditandatangani.

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut nomor 15 ini dilaksanakan dengan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan Kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar

LKj BPKAD TAHUN 2021

Realisasi Kinerja SKPD serta Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan yang telah dijelaskan diatas.

Pada tahun 2021 dilaksanakan Reviu SAKIP Tahun 2020 BPKAD Kabupaten Tanah Laut terhadap 9 dokumen SAKIP BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dan telah mendapatkan Nilai A (88,91) dari target nilai 68 atau dengan capaian kinerja sebesar 130,75%, sehingga dengan demikian capaian kinerja BPKAD Kab. Tanah Laut telah melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Rencana Kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Rencana Kinerja tahunan yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang sudah ditentukan.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Sesuai pilihan prioritas rencana kinerja tahunan BPKAD Kabupaten Tanah Laut ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah Instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besar pencapaian target – target yang ditetapkan.

Rencana-rencana yang telah ditetapkan selanjutnya diaplikasikan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam bentuk Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD). Berkaitan dengan pelaksanaan anggaran tentunya haruslah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan aspek keuangan seperti penganggaran,

penatausahaan/pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1). ANGGARAN DAN REALISASI APBD BPKAD 2021

Ringkasan realisasi APBD khusus untuk SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut realisasi belanjanya pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Target dan Realisasi Belanja BPKAD sebagai SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut selain sebagai SKPD juga sebagai Pejabat Pengelola keuangan Daerah PPKD yang bertugas sebagai koordinator dan membina 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tanah Laut.

Arah kebijakan belanja daerah dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2021 mengacu pada upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan program , kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021. Anggaran belanja murni BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2021 adalah sebesar 278.140.595.782, sedangkan pada Anggaran Perubahan Tahun 2021 menjadi sebesar 300.718.140.125,- yaitu bertambah sebesar Rp 22.577.544.343,- dan sampai akhir tahun 2021 realisasi belanjanya sebesar Rp 279.312.442.758,- atau dengan capaian sebesar 92,88%. Sedangkan anggaran belanja BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 32.976.833.150,92,- dengan realisasi sebesar Rp 28.715.546.241,- atau 87,08 %,sehingga pada tahun 2021 terdapat peningkatan kinerja realisasi belanja Daerah sebesar 5,80 % dengan rincian alokasi belanja dan realisasi belanja sebagai berikut :

a. Belanja Operasi BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Belanja Operasi terdiri dari : Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dengan Alokasi anggaran Belanja Operasi BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah sebesar Rp 45.796.483.294,- dengan realisasi sebesar Rp 39.540.109.053,- atau 86,34 % dengan rincian :

- 1) Belanja Pegawai anggaran Rp. 36.832.015.847,- terealisasi sebesar Rp 32.026.785.166,- atau 86,95 %.
- 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.964.467.447,- terealisasi sebesar Rp. 7.513.323.887,- atau 83,81%

b. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari belanja modal tanah, Belanja modal peralatan dan mesin, Belanja modal gedung dan bangunan dengan Alokasi anggaran belanja Modal BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah sebesar Rp 4.053.514.828,- dan realisasi belanja modal Tahun 2021 sebesar Rp 3.581.838.808,- atau 88,36 %, sedangkan anggaran belanja modal pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.268.491.000,- dengan realisasi belanja modal TA 2020 sebesar Rp 1.136.238.230,- atau 89,57 %, sehingga pada tahun 2021 terdapat penurunan kinerja realisasi belanja modal sebesar 1,21%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja modal tanah Rp 576.838.400 ,- terealisasi sebesar Rp 221.890.120,- atau 38,47%.
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin Rp 2.984.598.983,- terealisasi sebesar Rp. 2.874.193.460,- atau 96,30 %.
- 3) Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 492.077.445,- terealisasi sebesar Rp 485.754.500,- atau 98,72%.

b. Belanja Tidak Terduga se Kabupaten Tanah Laut

Alokasi Anggaran belanja Tidak Terduga BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah sebesar Rp 20.569.890.343,- dengan realisasi

belanja Tidak Terduga TA 2021 sebesar Rp 6.471.571.965,- atau 31,46 %, sedangkan anggaran belanja Tidak Terduga pada tahun 2020 adalah sebesar 305.353.328.384,86 terealisasi sebesar Rp 84.356.731.883`,- atau 27,63%, sehingga pada tahun 2021 terdapat peningkatan kinerja realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 3,83 %

c. Belanja Transfer se Kabupaten Tanah Laut

Belanja Transfer terdiri dari : Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dengan alokasi Anggaran Belanja Transfer BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah sebesar Rp 230.298.251.660,- Realisasi Belanja Transfer TA 2021 sebesar Rp 229.718.923.660,- atau 99,75 %, sedangkan anggaran belanja Transfer BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Rp.240.797.204.100,- terealisasi sebesar Rp. 240.081.285.268,- atau 99,70 % , sehingga pada Tahun 2021 terdapat peningkatan kinerja realisasi Belanja Transfer sebesar 0,05 % dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Bagi Hasil Rp 5.183.544.470 ,- terealisasi sebesar Rp 5.183.544.470,- atau 100.00%.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Rp 225.114.707.190 terealisasi sebesar Rp. 224.535.379.190 atau 99,74 %.

d. Penerimaan Pembiayaan Daerah BPKAD sebagai PPKD

Penerimaan pembiayaan daerah yang dikelola BPKAD kabupaten Tanah Laut merupakan SILPA Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 996.302.466.610 dengan realisasi sebesar Rp 996.049.651.010,atau 99,97 %

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari : Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 990.302.466.610,- terealisasi sebesar Rp. 990.302.466.610 atau 100 % ,dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp. 6.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp.5.747.184.400 atau 95,79 %

e. Pengeluaran Pembiayaan Daerah BPKAD sebagai PPKD

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021 yang dikelola BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemberian Pinjaman Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 20.000.000.000,- atau 100,00 %

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari: Pembentukan Dana Cadangan dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp 15.000.000.000,- atau 100%, dan Pemberian Pinjaman Daerah dengan anggaran sebesar Rp 5.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp 5.000.000.000,- atau 100%.

2. RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI APBD BPKAD TAHUN 2021 BERDASARKAN SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2021 pada umumnya sudah tercapai dan sesuai dengan target pencapaian kinerja secara keseluruhan, tidak memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian

dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2021 pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 278.140.595.782, sedangkan pada Anggaran Perubahan Tahun 2021 menjadi sebesar 300.718.140.125,- yaitu bertambah sebesar Rp 22.577.544.343,- dan sampai akhir tahun 2021 realisasi belanjanya sebesar Rp 279.312.442.758,- atau dengan capaian sebesar 92,88%. Sehingga jumlah tingkat capaian kinerja belanja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 92,88 %.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun ringkasan anggaran dan realisasi APBD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun anggaran 2021 berdasarkan Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdiri dari 3 Program, 12 Kegiatan dan 67 Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL REALISASI RENCANA KERJA SESUAI SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	NO	KEGIATAN			TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN (%)	KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T)	ANGGARAN MURNI (RP)		ANGGARAN PERUBAHAN (RP)		REALISASI (RP.)		CAPAIAN (%)	
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN					TERKAIT	TIDAK/TERKAIT	TERKAIT	TIDAK/TERKAIT	TERKAIT	TERKAIT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.Opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	100%																				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2.Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	(84) BAIK	(94) SANGAT BAIK	112,10 %																				

3.	Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	3.Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah												
										1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Ya	35.201.950	Terkait	16.495.710	Terkait	7.895.900	47,87
										2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Ya	25.506.640	Terkait	14.428.640	Terkait	9.783.100	67,80
										3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	40 SKPD	40 SKPD	100%	Ya	22.236.640	Terkait	22.236.640	Terkait	18.918.300	85,08
										4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	40 SKPD	40 SKPD	100%	Ya	22.236.640	Terkait	22.236.640	Terkait	18.290.700	82,25
										5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	40 SKPD	40 SKPD	100%	Ya	6.464.600	Terkait	6.464.600	Terkait	489.700	7,58

									10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran pembiayaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Ya	12.462.080	Terkait	12.462.080	Terkait	9.832.500	78,90
4.	Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	4.Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%				2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah												
									11	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen SPD	750 Dokumen	750 Dokumen	100%	Ya	55.979.870	Terkait	31.654.870	Terkait	23.950.900	75,66
									12	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Ya	223.288.320	Terkait	182.265.230	Terkait	120.562.800	66,15

									13	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Jenis	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	Ya	9.999.700	Terkait	9.999.700	Terkait	5.119.000	51,19
									14	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Ya	46.414.190	Terkait	46.414.190	Terkait	38.200.000	82,30
									15	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah kali	4 kali	4 kali	100%	Ya	14.864.580	Terkait	11.624.580	Terkait	4.273.000	36,76

									16	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Ya	43.874.670	Terkait	43.874.670	Terkait	38.468.000	87,68
									17	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Ya	103.85.010	Terkait	103.485.010	Terkait	82.261.200	79,49
									3	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah												
									18	Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Desa yang tersalurkan Bantuan Keuangan	130 Desa	130 Desa	100%	Ya	229.659.751.660		230.298.251.660	Terkait	229.718.923.660	99,75
									19	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Ya	7.962.087.350		20.569.890.343	Terkait	6.471.571.965	31,46

										25	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Ya	46.821.590	Terkait	46.821.590	Terkait	42.384.000	90,52
										26	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Ya	15.108.940	Terkait	15.108.940	Terkait	-	0,00
										27	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah FGD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Ya	56.871.550	Terkait	56.869.250	Terkait	42.057.000	73,95
6.	Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	6.Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	90%	140%	156%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	5	Pengelolaan Barang Milik Daerah												

		7.Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	100%	0%	0%				28	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah buku rekonsiliasi pengamanan dan pemeliharaan BMD	5 buku 40 paparan dan 80 Patok tanda batas 1 Penyelesaian sertifikat 2 permohonan BPKB duplikat 80 Perumahan Penyerifikan	5 buku 40 paparan nama Patok tanda batas 1 Penyelesaian sertifikat 2 permohonan BPKB duplikat 80 Perumahan Penyerifikan	100%	Ya	818.571.859	Terkait	1.155.051.859	Terkait	719.530.370	62,29
--	--	---	------	----	----	--	--	--	----	--------------------------------	----------------------------	--	---	---	------	----	-------------	---------	---------------	---------	-------------	-------

		8.Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	100%	120%	120%				29	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Buku Hasil Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 buku alat angkut, 5 buah rumah negara, 1 buah rumah negara	1 buku alat angkut, 5 buah rumah negara, 1 buah rumah negara	100%	Ya	341.348.066	Terkait	2.241.836.065	Terka ait	2.162.106.340	96,44
7.	Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	9.Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%				30	Penyusunan Standar Harga	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Ya	45.394.110	Terkait	50.533.310	Terka ait	45.389.000	89,82
									31	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Ya	3.812.497.400	Terkait	3.815.197.160	Terka ait	3.487.257.570	91,40
									32	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Ya	31.779.640	Terkait	41.943.640	Terka ait	39.678.300	94,60

8.	Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	10.Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	100%	100%	100%				33	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	1 dokumen hibah keluaran, 1 dokumen hibah masuk, 1 dokumen laporan hasil kegiatan, 1 dokumen monitoring pengunaan, 1 dokumen monitoring pemanfaatan dan penggunaan BMD, 1 doku	1 dokumen hibah keluar, 1 dokumen hibah masuk, 1 dokumen laporan hasil kegiatan, 1 dokumen monitoring pengunaan, 1 dokumen monitoring pemanfaatan dan penggunaan BMD, 1 doku	100%	Ya	207.696.640	Terkait	187.141.640	Tertakait	156.385.900	83,57
----	--	--	------	------	------	--	--	--	----	---	----------------------------	----------------	--	--	------	----	-------------	---------	-------------	-----------	-------------	-------

											isi BMD	men						.30	a			
									36	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD	8 dokumen BMD	8 dokumen BMD	100%	Ya	49.528.090	Terkait	44.803.090	Terkait	43.601.600	97,32
10.	Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	12.Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	850%	850%				37	Penilaian Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Obyek BMD yang dinilai untuk dicatat, dimanfaatkan dan dipindahkan	41 Obyek	41 Obyek	100%	Ya	429.651.140	Terkait	189.771.140	Terkait	70.721.250	37,27
									38	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD peserta Pembinaan Pengelolaan BMD	40 SKPD	40 SKPD	100%	Ya	132.053.950	Terkait	117.503.950	Terkait	69.604.600,00	59,24
11	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	13.Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%	100%	100%				6	Administrasi Umum Perangkat Daerah												

									39	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	10 Jenis	10 Jenis	100%	Ya	14.393.500	Terkait	14.269.640	Terkait	10.293.000	72,13
									40	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Pegawai Tetap	7 Jenis	7 Jenis	100%	Ya	160.937.920	Terkait	1.027.233.314	Terkait	943.427.670	91,84
									41	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	2 Jenis	2 Jenis	100%	Ya	59.231.810	Terkait	59.231.810	Terkait	47.369.000	79,97
									42	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	2 Jenis	2 Jenis	100%	Ya	7.200.000	Terkait	1.800.000	Terkait	800.000	44,44
									43	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Unit Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	3 Jenis	3 Jenis	100%	Ya	840.850.000	Terkait	965.750.000	Terkait	750.712.056	77,73

13	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	15.Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%					11	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
										57	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPKAD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Ya	13.895.610	Terkait	9.981.060	Terkait	7.865.000	78,80
										58	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen RKA SKPD Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Ya	2.553.000	Terkait	2.553.000	Terkait	2.200.000	86,17
										59	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Ya	2.458.000	Terkait	2.276.200	Terkait	1.888.000	82,95
										60	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen DPA SKPD Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Ya	6.226.000	Terkait	6.182.960	Terkait	4.627.700	74,85

										61	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Ya	5.865.720	Terkait	5.143.190	Terkait	4.477.000	87,05
										62	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	Ya	27.086.900	Terkait	3.569.000	Terkait	3.420.000	95,83
14	Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	16.Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%					12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
										63	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah ASN ,Jumlah orang ASN Se Kabupaten Tanah Laut dan Pejabat Daerah Kabupaten yang dibayarkan BPJS, Orang JKK dan JKM (Orang)	55 ASN , 5004 orang	55 ASN , 5004 orang	100%	Ya	30.196.152.193	Terkait	36.832.015.847	Terkait	32.026.785.166	86,95

									64	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi Kantor 75 dokumen BPKAD	75 Dokumen	75 Dokumen	100%	Ya	32.258.510	Terkait	30.683.510	Terkait	21.365.800	69,63
									65	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Laporan akhir Tahun Kantor BPKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Ya	4.614.700	Terkait	2.814.700	Terkait	1.858.800	66,04
									66	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan, /Triwulan/Semesteran Kantor BPKAD	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	Ya	12.429.950	Terkait	9.279.950	Terkait	4.347.400	46,85
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	17.Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	68 (BAIK)	88,91 (SANGAT BAIK)	130,75 %					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
									67	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Laporan Kinerja BPKAD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Ya	9.963.600	Terkait	9.963.600	Terkait	8.093.000	81,23

Adapun ringkasan anggaran dan realisasi APBD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun anggaran 2021 berdasarkan Program dan Kegiatan yang terdiri dari 3 Program, 12 Kegiatan dan 67 Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2021

PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
		Rp	%
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.964.586.858	34.617.483.713	86,62
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	39.669.010	32.570.700	82,11
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.981.060	7.865.000	78,80
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.553.000	2.200.000	86,17
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.276.200	1.888.000	82,95
Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	6.182.960	4.627.700	74,85

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	5.143.190	4.477.000	87,05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.963.600	8.093.000	81,23
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.569.000	3.420.000	95,83
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.874.794.007	32.054.357.166	86,93
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.832.015.847	32.026.785.166	86,95
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.683.510	21.365.800	69,63
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.814.700	1.858.800	66,04
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.279.950	4.347.400	46,85
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.125.000	44.275.000	92,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.125.000	44.275.000	92,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-

Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.068.284.764	1.752.601.726	84,74
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.269.640	10.293.000	72,13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.027.233.314	943.427.670	91,84
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.231.810	47.369.000	79,97
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	800.000	44,44
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	965.750.000	750.712.056	77,73
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.153.090	158.754.550	97,90
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.257.890	135.100.000	98,43
Pengadaan Mebel	24.895.200	23.654.550	95,02
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.278.107	345.817.421	72,15
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.966.800	62.000	3,15

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	263.665.383	148.065.237	56,16
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.570.000	689.200	43,90
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.075.924	197.000.984	92,89
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	292.282.880	229.107.150	78,39
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.205.000	8.540.000	83,68
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.727.880	35.401.650	44,40
Pemeliharaan Mebel	10.000.000	9.900.000	99,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.150.000	32.750.000	81,57
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.200.000	142.515.500	93,64
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	252.594.595.623	237.627.654.715	94,07

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	358.137.380	262.975.000	73,43
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	16.495.710	7.895.900	47,87
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	14.428.640	9.783.100	67,80
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	22.236.640	18.918.300	85,08
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	22.236.640	18.290.700	82,25
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	6.464.600	489.700	7,58
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	6.464.600	508.300	7,86
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	131.036.370	104.812.700	79,99
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	105.009.500	77.078.500	73,40
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	21.302.600	15.365.300	72,13
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	12.462.080	9.832.500	78,90

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	429.318.250	312.834.900	72,87
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31.654.870	23.950.900	75,66
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	182.265.230	120.562.800	66,15
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	9.999.700	5.119.000	51,19
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	46.414.190	38.200.000	82,30
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	11.624.580	4.273.000	36,76
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	43.874.670	38.468.000	87,68
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	103.485.010	82.261.200	79,49

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	938.997.990	861.349.190	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	131.017.120	125.306.920	95,64
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	103.002.740	96.058.250	93,26
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	162.639.360	155.783.340	95,78
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	257.699.190	253.377.500	98,32
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	165.839.800	146.382.180	88,27
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	46.821.590	42.384.000	90,52
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	15.108.940	-	-
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	56.869.250	42.057.000	73,95

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	250.868.142.003	236.190.495.625	94,15
Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	230.298.251.660	229.718.923.660	99,75
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20.569.890.343	6.471.571.965	31,46
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8.158.957.644	7.067.304.330	86,62
Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.158.957.644	7.067.304.330	86,62
Penyusunan Standar Harga	50.533.310	45.389.000	89,82
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	3.815.197.160	3.487.257.570	91,40
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	41.943.640	39.678.300	94,60
Penatausahaan Barang Milik Daerah	289.451.490	253.515.100	87,58
Inventarisasi Barang Milik Daerah	25.724.300	19.514.300	75,86
Pengamanan Barang Milik Daerah	1.155.051.859	719.530.370	62,29
Penilaian Barang Milik Daerah	189.771.140	70.721.250	37,27
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.241.836.065	2.162.106.340	96,44

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	187.141.640	156.385.900	83,57
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	44.803.090	43.601.600	97,32
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	117.503.950	69.604.600,00	59,24
JUMLAH	300.718.140.125	279.312.442.758	92,88

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 278.140.595.782,-setelah perubahan adalah sebesar Rp 300.718.140.125,- dengan realisasi pada akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp 279.312.442.758,-. Jumlah tingkat capaian kinerja belanja langsung SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 92,88 %. dengan capaian kinerja fisik rata-rata sebesar 100%.

Adapun ringkasan anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

3. PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 DAN 2021

Untuk menggambarkan pencapaian realisasi belanja Program,Kegiatan DAN Sub Kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut serta membandingkannya selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 dan untuk mengetahui pengukuran terhadap pencapaian peningkatan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

Tabel perbandingan realisasi capaian sasaran strategis Program dan Kegiatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021

Berikut ini disajikan realisasi pencapaian sasaran strategis BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018 dan tahun 2020 dapat dibandingkan realisasi pencapaian sasaran tahun 2021 dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Selain perbandingan realisasi pencapaian sasaran seperti yang telah dibahas sebelumnya dapat dilihat baik peningkatan maupun penurunan dalam realisasi pencapaian sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Gambaran tentang target dan realisasi pencapaian sasaran strategis dan realisasi pendanaan BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

TABEL PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 ,2019, 2020 DAN 2021																
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT																
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN %	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN %	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN %	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN %
1	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100%									
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2. Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai indek	82	87	106,10%	82	90	109,76%	83	93	112,05%	84	94,16	112,10%
		3. Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	3. Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		4. Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	4. Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		5. Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	5. Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
2	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.	6. Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	6. Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	%	100	100	100%	87	100	114,95%	89	30	33,70%	90	140	155,55%
		7. Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	7. Persentase SKPD yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	0	0%	100	0	0%
		8. Meningkatnya kualitas pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	8. Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	150	150%	100	120	120%
		9. Meningkatnya kualitas inventarisasi BMD sesuai ketentuan	9. Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
3	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	10. Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	10. Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		11. Meningkatnya kualitas inventarisasi BMD sesuai ketentuan	11. Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		12. Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemsuahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	12. Persentase Pemindahtanganan, Pemsuahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	108,80	108,80%	100	2700	2700%	100	850	850%
		13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	13. Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		14. Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	14. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		15. Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	15. Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		16. Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	16. Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		15. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	17. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	64,15	64,74	100,92%	66	74,98	113,61%	67	88,43	131,99%	68	88,91	130,75%

**TABEL PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	SARGIS	IK SARGIS	IKU/ BUKAN IKU	TARGET KINERJA 2020 IKU/ BUKAN IKU	TARGET KINERJA 2021 IKU/ BUKAN IKU	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	NO	PROGRAM			NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET KINERJA OUTPUT 2020	TARGET KINERJA OUTPUT 2021	REALISASI OUTPUT TAHUN 2020	REALISASI FISIK % THN 2020	REALISASI OUTPUT TAHUN 2021	REALISASI FISIK % THN 2021	ANGGARAN TAHUN 2020(RP.)	REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020	REALISASI KEU % TAHUN 2020	ANGGARAN TAHUN 2021 (RP.)	REALISASI KEUANGAN TAHUN 2021	REALISASI KEU % TAHUN 2021
									URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)												
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.Opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah	1.Opini BPK RI atas laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP																				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2.Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	2.Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	83	84	93	94																				
3.	Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	Ya	3.Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	1	Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah														
												1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	12 Dokumen	2 Dokumen	11 Dokumen	91,06%	2 Dokumen	100%	385.135.300,00	279.436.900,00	72,56	16.495,710	7.895.900	47,87

											10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran pembiayaan	3 Dokumen		3 Dokumen	100%				12.462.080	9.832.500	78,90		
4.	Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	Ya	4.Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%				2	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah														
											11	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen SPD	4 dokumen	750 Dokumen	4 dokumen	100%	750 Dokumen	100%	697.108.500,00	686.181.600,00	98,43	31.654.870	23.950.900	75,66
											12	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	5 dokumen	1 Dokumen	5 dokumen	100%	1 Dokumen	100%	126.919.000,00	106.420.000,00	83,85	182.265.230	120.562.800	66,15

									13	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Jenis	21 dokumen	9 Dokumen	21 dokumen	100%	9 Dokumen	100%	278.949.000,00	273.414.400,00	98,02	9.999.700	5.119.000	51,19
									14	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penerimaan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	4 dokumen	1 Dokumen	4 dokumen	100%	1 Dokumen	100%	59.096.000,00	46.739.900,00	79,09	46.414.190	38.200.000	82,30

										15	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah kali	3 Jenis	4 kali	3 Jenis	100%	4 kali	100%	703.119.206,00	612.922.924,00	87,17	11.624.580	4.273.000	36,76
										16	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	10 jenis	2 Dokumen	10 jenis	100%	2 Dokumen	100%	321.180.668,00	265.996.447,00	82,82	43.874.670	38.468.000	87,68
										17	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	19 PTT	2 Dokumen	19 PTT	100%	2 Dokumen	100%	439.356.000,00	437.424.006,00	99,56	103.485.010	82.261.200	79,49

											26	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	1 Dokumen								15.108.940		0,00	
											27	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah FGD	2 Dokumen									56.869.250	42.057.000	73,95
6.	Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	Ya	6.Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	89%	90%	30%	165%	2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	WTP	5	Pengelolaan Barang Milik Daerah													

			7.Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	0%	0%	0%	0%				28	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah buku rekonsiliasi pengamanaan dan pemeliharaan BMD	5 buku 40 papan nama 80 Patok tanda batas 1. Penyelesaian sertifikat 2 permohonan BPKB duplikat 80 Permohonan Penyerifikatan		5 buku 40 papan nama 80 Patok tanda batas 1 Penyelesaian sertifikat 2 permohonan BPKB duplikat 80 Permohonan Penyerifikatan	100%				1.155.05 1.859	719.530.370	62,29
			8.Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	100%	100%	150%	120%				29	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Buku Hasil Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pengelola Barang Milik Daerah	1 buku 5 alat angkut, 5 buah rumah negara, 1 buah rumah negara		1 buku 5 alat angkut, 5 buah rumah negara, 1 buah rumah negara	100%				2.241.83 6.065	2.162.106.340	96,44

7.	Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	Ya	9.Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%					30	Penyusunan Standar Harga	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen	100%				50.533.310	45.389.000	89,82
												31	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen		4 Dokumen			4 Dokumen	100%				3.815.197.160	3.487.257.570	91,40
												32	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen		3 Dokumen			3 Dokumen	100%				41.943.640	39.678.300	94,60
8.	Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	Ya	10.Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%					33	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen		1 dokumen hibah keluar, 1 dokumen hibah masuk, 1 dokumen lap hasil kegiatan, 1 dokumen monitoring penggunaan, 1 dokumen monitoring pemanfaatan dan penggunaan BMD, 1 dokumen pelaksanaan pemanfaatan BMD, 1 dokumen pemusnahan BMD 1 dokumen penghapusan BMD 1 dokumen rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan BMD 15 sosialisasi			1 dokumen hibah keluar, 1 dokumen hibah masuk, 1 dokumen lap hasil kegiatan, 1 dokumen monitoring penggunaan, 1 dokumen monitoring pemanfaatan dan penggunaan BMD, 1 dokumen pelaksanaan pemanfaatan BMD, 1 dokumen pemusnahan BMD 1 dokumen penghapusan BMD 1 dokumen rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan BMD 15 sosialisasi	100%				187.141.640	156.385.900	83,57

9.	Meningkatnya kualitas inventarisasi BMD sesuai ketentuan	Ya	11.Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	100%	100%	100%	100%			34	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD	16 Dokumen		16 Dokumen	100%			289.451.490	253.515.100	87,58
										35	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD	1 Dokumen		1 Dokumen	100%			25.724.300	19.514.300	75,86
										36	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD	8 dokumen BMD		8 dokumen BMD	100%			44.803.090	43.601.600	97,32
10.	Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	Ya	12.Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	2700%	850%			37	Penilaian Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Obyek BMD yang dinilai untuk dicatat, dimanfaatkan dan dipindahtanggankan	41 Obyek		41 Obyek	100%			189.771.140	70.721.250	37,27
										38	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD peserta Pembinaan Pengelolaan BMD	40 SKPD		40 SKPD	100%			117.503.950	69.604.600,00	59,24

										51	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	2 Jenis			2 Jenis	100%					79.727.880	35.401.650	44,40	
										52	Pemeliharaan Mebel	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	1 Jenis			1 Jenis	100%					10.000.000	9.900.000	99,00	
										53	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	12 Jenis			12 Jenis	100%					40.150.000	32.750.000	81,57	
										54	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	1 Jenis			1 Jenis	100%					152.200.000	142.515.500	93,64	
1 2	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Ya	14.Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%			10	Administrasi Kepegawaian Daerah															

											55	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah ASN BPKAD	50 ASN		50 ASN	100%				48.125.000	44.275.000	92,00
											56	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	5 ASN		-	0%				-	-	#DIV/0!
13	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	Ya	15. Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%				11	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>												
											57	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPKAD	2 Dokumen		2 Dokumen	100%				9.981.060	7.865.000	78,80
											58	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen RKA SKPD Tahun 2022	1 Dokumen		1 Dokumen	100%				2.553.000	2.200.000	86,17
											59	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD Tahun 2021	1 Dokumen		1 Dokumen	100%				2.276.200	1.888.000	82,95

LKj BPKAD TAHUN 2021

											60	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen DPA SKPD Tahun 2022	1 Dokumen											6.182.960	4.627.700	74,85		
											61	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD Tahun 2021	1 Dokumen												5.143.190	4.477.000	87,05	
											62	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen	6 Dokumen												3.569.000	3.420.000	95,83	
14	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	Ya	16.Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%				12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
											63	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah ASN ,Jumlah orang ASN Se Kabupaten Tanah Laut dan Pejabat Daerah Kabupaten yang dibayarkan BPJS, Orang JKK dan JKM (Orang)	55 ASN , 5004 orang													36.832.015,847	32.026.785.166	86,95

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja keuangan pada tahun 2021 adalah sebesar 92,88% mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun 2020 yaitu sebesar 89,66%, dan demikian juga mengalami peningkatan capaian kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan pada masa Renstra SKPD Tahun 2018-2023, yaitu telah dicapai target akuntabel / dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu terbukti dengan telah diraihnya opini WTP dari auditor BPK RI selama 8 (delapan) tahun berturut-turut, hal ini dikarenakan adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk bersama-sama dalam meningkatkan kinerja pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Tanah Laut.

Sedangkan untuk membandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 106,05% dengan realisasi keuangan sebesar 92,88% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 13,17% dengan rincian per Sasaran Strategis dan indikatornya sebagai berikut:

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021													
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT													
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN % 2021	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi	Penanggungjawab		
1.	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100%	90,35%	100%	9,65%	Kepala Badan		
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2 Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai Indek	84	94,16	112,10%	86,62%	112,10%	25,48%			
		3. Meningkatkan kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	3 Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	%	100	100	100%	73,43%	100%	26,57%	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan		
		4. Meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	4 Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100%	83,51%	100%	16,49%			
		5. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	5 Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	91,73%	100%	8,27%		Kepala Bidang Akuntansi	
2.	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.	6. Meningkatkan kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	6 Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	%	90	140	155,55%	79,37%	91,85%	12,48%	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset		
			7 Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	%	100	0	0%						
			8 Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	%	100	120	120%						
			9 Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	91,94%	100%	8,06%			
				10 Meningkatkan kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	10 Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	%	100	100	100%	83,57%	100%	16,43%	
				11 Meningkatkan kualitas inventarisasi BMD sesuai ketentuan	11 Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	%	100	100	100%	86,92%	100%	13,00%	Kepala Bidang Penatausahaan Aset
				12 Meningkatkan kualitas Pemindahtanganan, Pemsuahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	12 Persentase Pemindahtanganan, Pemsuahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	%	100	850	850%	48,26%	850%	48,26%	
		3	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	11. Meningkatkan kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	13 Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	%	100	100	100%	86,92%	100%	13,08%	Sekretaris
				12. Meningkatkan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	14 Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	%	100	100	100%	92,00%	100%	8,00%	
				13. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	15 Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	%	100	100	100%	81,84%	100%	18,16%	
14. Meningkatkan kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	16 Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan			%	100	100	100%	86,93%	100%	13,07%			
15. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	17 Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Nilai	68	88,91	130,75%	95,83%	130,75%	34,92%			

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 yang merupakan tahun ketiga Renstra 2018-2023, sehingga dengan demikian tujuan BPKAD yaitu

1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan keuangan secara tertib, akuntabel & transparan.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penatausahaan aset daerah secara tertib.
3. Terwujudnya tata kelola administrasi yg tertib, efektif dan efisien, sudah tercapai dengan diraihnya predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 8 (delapan) tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini memuat perencanaan dan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan serta telah dilaksanakan secara akuntabel, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

Dapat disimpulkan bahwa dari 15 indikator kinerja sasaran strategis yang ditargetkan hampir semuanya dapat dilaksanakan dan tercapai target kinerjanya, pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2018,2019 dan 2020 antara lain sebagai berikut:

- 1). Sasaran Strategis Nomor 1 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator sasaran nomor 1 Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2021 sebesar 100%,

dan pada Tahun 2018,2019 dan 2020 juga mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 untuk yang keenam kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 8 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor : 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2018 dan Nomor : 12.C/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

- Sedangkan pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 untuk yang ketujuh kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 10 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 6 temuan, bukti surat Nomor : 7.B/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan bukti surat Nomor : 7.C/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 untuk yang kedelapan kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 26 temuan, bukti surat Nomor : 12.A/LHP/IX.BJM/05/2021 tanggal 27 Mei 2021, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%, bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023, bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel, tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab pada tahun 2021 telah berhasil dilaksanakan 100%.

Untuk mendukung sasaran nomor 1 dan IKU BPKAD ini dilaksanakan dan menjadi Perjanjian Kinerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta tanggungjawab Bidang Belanja & Pembiayaan, Bidang Akuntansi, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset dan Bidang Penatausahaan Aset.

- 2). Sasaran Strategis Nomor 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama BPKAD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama BPKAD nomor 2 ini maka sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 selama 8 (delapan) tahun dilaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKPD khususnya terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah terhadap 4 bidang pelayanan yaitu pelayanan satu pintu di Sekretariat, pelayanan bantuan keuangan lainnya, pelayanan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pada bidang Akuntansi. Jumlah responden sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dari Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survei kepada masyarakat yang menjadi konsumen dari 4 bidang pelayanan tersebut, dengan jumlah responden adalah 150 (seratus lima puluh) orang. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dalam periode minggu terakhir bulan April sampai dengan minggu keempat bulan Juni. Dari hasil survey tersebut didapat nilai indeks dengan hasil 87 dari target 82 pada tahun 2018 atau capaian 106,10%, kemudian pada tahun 2019 didapat nilai indeks dengan hasil 90 dari target 82 atau capaian sebesar 109,76%, sedangkan pada tahun 2020 didapat nilai indeks dengan hasil 93 dari target 83 atau capaian sebesar 112,05%, sedangkan pada tahun 2021 didapat nilai indeks dengan hasil 94,16 dari target 84 atau capaian sebesar 112,10%, sehingga dengan demikian terdapat peningkatan trend kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pencapaian nilai hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan

pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut berada dalam mutu pelayanan SANGAT BAIK, sehingga dengan demikian realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. atau terdapat peningkatan sebesar 0,05 % dari tahun 2020 Dengan demikian bahwa dengan adanya hasil survey kepuasan masyarakat yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut berada dalam mutu pelayanan Sangat Baik.

Untuk mendukung sasaran nomor 2 dan IKU BPKAD ini dilaksanakan dan menjadi Perjanjian Kinerja, Program dan kegiatan serta tanggungjawab Bagian Sekretariat.

- 3). Sasaran Strategis Nomor 3 Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan 100%. Penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan yaitu paling lambat pada tanggal 31 Desember.

Pada tahun 2018 penetapan APBD Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017, dan untuk penetapan APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2018 Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Sedangkan pada tahun 2019 penetapan APBD Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019 Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan

Tahun 2019 Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Pada tahun 2020 penetapan APBD Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020 Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2020 Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Pada tahun 2021 penetapan APBD Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2021 Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2021 Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Sasaran nomor 3 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan dan indikator sasaran nomor 3 ini dilaksanakan oleh Kasubbid Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021.

- 4).Sasaran Strategis Nomor 4 Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan yang merupakan perjanjian kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 %. Untuk mendukung sasaran strategis Kepala Bidang Pembiayaan nomor 4 ini Indikator sasaran dilaksanakan oleh Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi dan Kasubbid Pembiayaan dengan pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA Tahun 2021.Penyerapan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2018 pagu anggaran sebesar Rp 1.588.171.203.597,00,- dengan

realisasi sebesar Rp 1.350.553.289.307,60 ,- atau capaian sebesar 85,04%. Penyerapan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.746.968.360.693,50,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.515.185.842.727,95,- atau 86,74%. Anggaran belanja daerah (BTL dan BL) Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2020 adalah sebesarRp 2.041.948.857.213,36 dengan realisasi sebesar Rp 1.508.835.025.639,47 atau 73,89%. terdapat penurunan kinerja realisasi belanja sebesar 12,85% hal ini disebabkan adanya kebijakan refocusing keuangan daerah dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid 19, namun secara kinerja rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini setiap tahunnya mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan penyerapan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.220.694.238.313,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.881.305.839.322,37,- atau 84,72%, terdapat peningkatan kinerja realisasi belanja sebesar 10,83% dari tahun 2020.

- 5). Sasaran Strategis Nomor 5 Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan adalah perjanjian kinerja Kepala Bidang Akunatnsi capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 %. Untuk mendukung sasaran strategis Kepala Bidang Akuntansi nomor 5 Indikator sasaran ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Kasubbid yaitu Kasubbid Pengelolaan Kas, Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban dan Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Piutang dengan pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA Tahun 2021.

Pada tahun 2014 Laporan Keuangan SKPD berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual), sehingga capaian kinerja hanya mencapai 50%, karena Laporan Keuangan SKPD belum sepenuhnya berbasis akrual.

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut

memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) dan pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 dibuat berdasarkan Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 ini adalah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yaitu BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Demikian juga pada tahun 2016,tahun 2017,tahun 2018,tahun 2019, tahun 2020 serta tahun 2021 Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual telah disampaikan oleh seluruh SKPD dan telah di Audit oleh BPK – RI dan telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 (delapan) tahun berturut-turut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual. Dengan demikian bahwa pelaporan keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berbasis AkruaI dapat dijamin terpenuhi 100%.

- 6). Sasaran Strategis Nomor 6 Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan, Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan dan Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan pada tahun 2019 capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 104,99% dari tahun 2018 terdapat peningkatan kinerja sebesar 4,99%. Namun pada tahun 2020 capaian kinerja mengalami penurunan yaitu 61,23% dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kendala pandemi Covid 19, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kinerja sebesar 91,85% sehingga untuk indikator sasaran strategis no 6 yaitu presentase BMD (Tanah) yang memiliki sertifikat sesuai ketentuan hanya tercapai 140% dari target sebesar 90%, atau capaian sebesar 155,55% hal ini dikarenakan adanya dukungan dari Pihak BPN, kemudian indikator sasaran

strategis no 7 yaitu Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan tidak tercapai atau 0% dikarenakan pelaksanaan pengajuan permohonan duplikasi BPKB BMD (Kendaraan Bermotor) dari target 2 buah, realisasi 0 buah (tidak dapat realisasi). Pengajuan permohonan duplikasi BPKB kendaraan dinas bermotor tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. sehingga kedua sasaran Kepala Bidang PPA tersebut tidak tercapai targetnya atau mengalami penurunan kinerja. Namun pada indikator sasaran strategis no 8 milik Kepala Bidang PPA mengalami kenaikan capaian pada tahun 2021 yaitu sebesar 120%, hal ini dikarenakan dari target BMD sebesar 10 telah tercapai sebesar 12 yang dipelihara, sehingga dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan kinerja. Sehingga secara keseluruhan untuk sasaran strategis no 6 Kepala Bidang PPA pada tahun 2021 capaian kinerjanya mengalami peningkatan kinerja sebesar 30,62%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 6 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021

Telah dilaksanakan BMD (Tanah) yang telah memenuhi persyaratan penyertifikatan sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 30 persil, realisasi sebanyak 42 persil permohonan penyertifikatan pada tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Telah dilaksanakan BMD (Kendaraan Bermotor) yang telah memenuhi persyaratan Duplikasi BPKB sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 2 permohonan realisasi masih 0%, dikarenakan BPKB yang dimohonkan untuk pembuatan BPKB Duplikat telah ditemukan setelah dilakukan pemasangan pengumuman di media massa, sehingga proses pembuatan BPKB Duplikat dibatalkan.

Telah dilaksanakan SKPD yang melakukan rekonsiliasi/verifikasi pemeliharaan BMD sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 41 SKPD realisasi mencapai 100%.

Telah dilaksanakan BMD yang ditelusuri sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 10 lokasi realisasi 40%, dikarenakan kurangnya kerjasama pihak ketiga/masyarakat dalam membantu/menunjukkan lokasi dan batas-batas tanah.

Telah dilaksanakan BMD-PPKD yang dipelihara sesuai ketentuan dengan target 10 buah BMD dengan rincian 5 buah kendaraan dinas dan 5 buah rumah negara, realisasi 120% atau 12 buah BMD berupa 6 buah kendaraan dinas PPKD yang dipelihara.

Telah dilaksanakan BMD-PPKD yang dikuasai fisiknya sesuai ketentuan dengan target 40 Buah BMD, realisasi masih 100%, yaitu berupa terlaksananya pemasangan Papan Nama Kepemilikan sebanyak 40 buah pada lokasi tanah. Serta pemasangan Patok Tanda Batas Tanah sebanyak 80 buah pada lokasi tanah .
Telah dilaksanakan BMD yang dikuasai dimonitoring sesuai ketentuan dengan target 50 Kali, realisasi 75 kali atau 150%.

- 7). Sasaran Strategis Nomor 7 Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset capaian kerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 7 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Perencanaan Kebutuhan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021.

Telah dilaksanakan penyusunan RKBMD (untuk RKBMD perubahan Tahun Anggaran 2021) dengan Target Kinerja sebanyak 40 SKPD sampai Triwulan IV Tahun 2021 sudah 40 SKPD yang sudah melaksanakan dan ini sudah cetak, sehingga realisasi kinerja 100%.

Tersusunnya dokumen Buku Standar Satuan Harga dengan Target Kinerja Sebanyak 1 dokumen yaitu Buku Standar Satuan Harga Tahun 2022 dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tanggal 25 Juni 2021 sehingga telah terealisasi capaian sebesar 100%.

Tersusunnya dokumen Buku Standar Kebutuhan Barang dengan Target Kinerja sebanyak 1 dokumen (Buku Standar Kebutuhan Barang Tahun 2022) sampai dengan TW III sudah dilaksanakan pencetakan dan capaian kinerja terealisasi sebesar 100%.

Telah dilaksanakan SKPD yang di rekonsiliasi/ verifikasi Barang Pakai Habis dengan Target Kinerja sebanyak 40 SKPD, realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 ini sudah dilaksanakan Rekonsiliasi Belanja Pakai Habis Triwulan I sebanyak 40 SKPD sehingga capaian kinerja terealisasi sebesar 100%, dan dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi triwulan II, III sebanyak 40 SKPD dan triwulan IV untuk 40 SKPD ditambah dengan 5 dari Kelurahan.

Tersusunnya dokumen Beban Persediaan yang tersusun dengan Target Kinerja sebanyak 1 dokumen (Dokumen Beban Persediaan Tahun 2020), sampai dengan Triwulan IV sudah tersusun dan capaian kinerja terealisasi sebesar 100% dikarenakan sudah terealisasi di triwulan III.

Telah dilaksanakan SKPD yang mengikuti Sosialisasi Standar Satuan Harga/ Peraturan Bupati Tanah Laut dengan Target Kinerja sebanyak 40 SKPD, realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 ini sudah dilaksanakan dihadiri oleh 40 SKPD ditambah 5 dari Kelurahan dan capaian kinerja terealisasi sebesar 100%.

Tersusunnya Barang Pakai Habis SKPD yang telah termonitoring Tahun 2021 dengan Target Kinerja sebanyak 40 SKPD sampai Triwulan IV Tahun 2021 ini dilaksanakan terhadap 40 SKPD (11 Kecamatan, 5 Kelurahan), sehingga realisasi kinerja mencapai 100%.

- 8). Sasaran Strategis Nomor 8 Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 8 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pemanfaatan dan Penggunaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021.

Telah dilaksanakan SKPD yang dilakukan Rekonsiliasi/Verifikasi Pemanfaatan & Penggunaan BMD sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 41 SKPD.

Untuk kegiatan ini sudah direalisasikan/dilaksanakan s.d triwulan IV (periode 01 Oktober s/d 10 Desember 2021) tanggal 13 s/d 15 Desember 2021) terhadap 41 SKPD.

Telah dilaksanakan BMD yang dimanfaatkan dan digunakan dimonitoring sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 42 BMD, realisasi sebanyak 42 BMD atau 100,00%

Telah dilaksanakan SKPD yang dilakukan Sosialisasi Pemanfaatan & Penggunaan BMD sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 15 kali. Sampai dengan triwulan III ini kegiatan sosialisasi sudah dilaksanakan kepada 9 SKPD dengan persentase sebesar 60%

- 9). Sasaran Strategis Nomor 9 Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD yang dicatat dengan akurat sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penatausahaan Aset capaian kerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 9 Kepala Bidang Penatausahaan Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Inventarisasi dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021.

Terlaksananya Updating Data BMD pada KIB SKPD sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah dokumen KIB SKPD yang terupdate sesuai ketentuan sebanyak 17 dokumen.

Dari 17 dokumen tersebut diatas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 telah terealisasi sejumlah 17 Dokumen Penatausahaan Aset, terdiri dari Kartu Inventaris Barang (KIB A sd KIB F), Buku Inventaris, Buku Rekap Mutasi Barang

Milik Daerah dan 1 Dokumen Kegiatan Inventarisasi berupa Buku Laporan Kegiatan Inventarisasi sehingga realisasi kinerja sebesar 100 %. Pada Kegiatan Inventarisasi ini difokuskan pada 7 (tujuh) SKPD besar yang memiliki aset Tanah dan Bangunan Gedung (KIB A dan KIB C) yaitu Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan.

Ke tujuh SKPD tersebut mendapat prioritas, mengingat banyaknya Aset yang dimiliki oleh SKPD tersebut yang lokasinya tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Tanah Laut yang belum disensus secara optimal. Kegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan sungguh sungguh sebagai suatu kewajiban dan didukung secara penuh oleh Tim Inventarisasi SKPD. sehingga realisasi fisiknya bisa tercapai 100 %,sesuai dengan target kinerjanya.

Melaksanakan Rekonsiliasi/verifikasi Belanja Modal SKPD sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah Belanja Modal SKPD yang telah direkonsiliasi/verifikasi dan disampaikan Laporrannya sesuai dengan Target Kinerja sebanyak 8 dokumen.

Melaksanakan Sensus BMD dan tindaklanjut Hasil Sensus BMD sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah BMD SKPD yang telah disensus dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sudah dilaksanakan pada tahun 2018 dan dilaksanakan tindak lanjut sensus BMD di Tahun 2019. Sehingga pada tahun ini tidak ada Target Kinerja untuk kegiatan tersebut

Melaksanakan Monitoring Belanja Modal SKPD sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah Belanja Modal SKPD yang termonitoring sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 12 kegiatan , sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 sudah dilaksanakan 12 kegiatan, sehingga capaian kinerja terealisasi sebesar 100 %.

Melaksanakan Sosialisasi Inventarisasi BMD SKPD sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah SKPD yang telah tersosialisasi dan menerapkan Inventarisasi BMD sesuai ketentuan pada tahun ini tidak ada Target Kinerja karena kegiatan tersebut sudah dilaksanakan pada tahun tahun sebelumnya.

- 10). Sasaran Strategis Nomor 10 Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penatausahaan Aset capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 850%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 10 Kepala Bidang Penatausahaan Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021.

Tahun Anggaran 2021 Triwulan IV telah dilakukan kegiatan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan sesuai dengan ketentuan, dengan hasil sebagai berikut :

Kegiatan lelang umum BMD pertama telah dilaksanakan pada 7 Juli 2021 di KPKNL Banjarmasin, dari 45 slot lelang laku terjual 39 slot. 2 slot wanprestasi dan 4 slot tidak ada penawar dan lelang kedua pada 28 Oktober 2021 di KPKNL Banjarmasin dari 5 slot lelang tidak ada penawar.

Kegiatan Pemindahtanganan BMD direncanakan 2 dokumen (Politala dan Masjid Al Muhajirin Panggung) ternyata realisasi pemindahtanganan dalam bentuk hibah keluar sebanyak 17 (tujuh belas) berkas/kegiatan.

Pemindahtanganan mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan usulan untuk hibah sulit diprediksi.

Kegiatan pemusnahan di rencanakan 5 kegiatan (Dishub,BPKAD,Inspektorat ,Dispota dan Dinkes) ternyata realisasi sebanyak 32 kegiatan. hal ini dikarenakan usulan pemusnahan dari SKPD sulit diprediksi bahkan satu SKPD bisa lebih dari satu usulan.

Kegiatan penghapusan barang milik daerah Kab. Tanah Laut yang direncanakan 12 Dokumen Surat Keputusan ternyata realisasi menerbitkan sebanyak 60 (enam puluh) Surat Keputusan, hal ini dikarenakan usulan penghapusan dari SKPD sulit diprediksi bahkan satu SKPD bisa lebih dari satu usulan penghapusan dengan berbagai sebab penghapusannya.

Penyusunan Laporan Hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD SKPD telah dibuat sebanyak 4 dokumen rekapitulasi kegiatan selama satu tahun terdiri dari laporan hibah masuk, laporan hibah keluar, laporan pemusnahan dan laporan penghapusan.

Kegiatan Penilaian BMD terkait Pengelolaan BMD di rencanakan menilai 10 BMD (R4. 9 buah dan 1 buah Genset) ternyata realisasinya mencapai 45 BMD (R4. 8 buah, 1 buah Genset, R2. 20 buah, inventaris kantor 8 buah dan 8 buah scrup) yang dinilai, hal ini dikarenakan untuk efisiensi biaya penilaian, dengan biaya yang sama tapi masih bisa menambah jumlah BMD yang dinilai.

Sosialisasi terkait pengelolaan BMD yang direncanakan 2 kegiatan sudah terealisasi 2 kegiatan sesuai target (Sosialisasi pengelolaan BMD oleh BPKP pada 16 Februari 2021 dan Sosialisasi lelang E-auction pada 27 Mei 2021)

Sosialisasi JFT Penatalaksana barang direncanakan 1 kali sosialisasi sudah terealisasi 1 kali kegiatan sesuai target dilaksanakan pada 9 Desember 2021.

FGD/Pembinaan SKPD dalam rangka Pengelolaan BMD sesuai ketentuan yang direncanakan 1 kali di PT Lawang Sewu Tecknologi juga sudah dilaksanakan sesuai target pada 30 November s/d 2 Desember 2021.

- 11). Sasaran Strategis Nomor 11 Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran dengan indikator sasaran Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 11 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan pencapaian

sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021.

12). Sasaran Strategis Nomor 12 Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD dengan indikator sasaran Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dengan baik adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 12 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021.

13). Sasaran Strategis Nomor 13 Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD dengan indikator sasaran Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 13 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021.

Pada tahun 2021 Kasubbag Perencanaan telah melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 2 dokumen yaitu (Renja Murni Thn 2022 dan Renja Perubahan Thn 2021), sampai Triwulan IV Tahun 2021 ini telah terealisasi 100% dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2021 dan SK Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut Nomor : 050.13/18/BPKAD/2021 tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan dengan telah ditetapkannya SK Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut Nomor : 050.13/19/BPKAD/2021 tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

Telah menyusun dokumen pelaporan kinerja SKPD dengan Target Kinerja Sebanyak 3 dokumen yaitu (Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020, LKPJ Thn 2020

dan LPPD Thn 2020) telah terealisasi seluruhnya sebanyak 3 dokumen, sehingga realisasi capaian kinerja telah tercapai 100%.

Telah menyusun dokumen Laporan monitoring dan evaluasi perencanaan dan kinerja SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 4 dokumen yaitu (Lap. Monev Tw I, Lap . Monev Tw II, lap. Monev Tw III dan Lap. Monev Tw IV Thn 2021), sampai dengan Tw IV ini telah terealisasi yaitu 4 Dokumen terdiri dari : 1 Dokumen Laporan Triwulan I Thn 2021 dan 1 Dokumen Laporan Triwulan II Thn 2021, 1 Dokumen Laporan Triwulan III Thn 2021 dan 1 Dokumen Laporan Triwulan IV Thn 2021, sehingga capaian kinerja terealisasi sebesar 100%.

Telah menyusun Dokumen SAKIP SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 8 dokumen yaitu (Renstra 2018-2023, Renja Thn 2020, Renja Thn 2021, Perjanjian Kinerja Thn 2020, IKU Thn 2020, Pohon Kinerja Thn 2020, Laporan Kinerja Thn 2020, Matrik Keselarasan Thn 2020), sampai dengan Tw II ini seluruh dokumen sebanyak 8 dokumen tersebut telah terealisasi 100% dengan telah di upload pada Aplikasi ESR Menpan RB pada tanggal 30 Maret 2021 dan sampai Triwulan II thn 2021 ini masih melakukan tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dengan melengkapi data-data berupa : 1) Laporan Kinerja Triwulan I Thn 2021 2) Laporan Kinerja Triwulan II Thn 2021 3). Metadata LKE Semester I Thn 2021.

Telah menyusun dokumen SKM SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 1 dokumen yaitu (Dokumen SKM Thn 2021), telah terealisasi dengan SK Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Hasil SKM BPKAD Tanah Laut Nomor : 800/ 17 /BPKAD/2021 tanggal 29 Juni 2021, sehingga capaian kinerja telah tercapai 100%.

- 14). Sasaran Strategis Nomor 14 Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD dengan indikator sasaran Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 14 Sekretaris

BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Keuangan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021.

Telah menyusun dokumen Laporan Keuangan SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 4 dokumen yaitu (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun), sampai Triwulan IV Tahun 2021 ini Laporan Akhir Tahun 2020 sudah selesai 4 Dokumen (Laporan Akhir Tahun dan Laporan Bulanan selama 12 bulan), sehingga realisasi kinerja tercapai 100%.

Telah menyusun dokumen administrasi keuangan SKPD yang akuntabel dengan Target Kinerja Sebanyak 75 dokumen (Dokumen Surat Perintah Membayar) telah terealisasi seluruhnya sebanyak 513 dokumen atau capaian sebesar 684% atau melebihi target dikarenakan adanya sistem aplikasi yang baru dimana proses penatausahaannya tidak lagi melalui PPKD namun melalui bendahara pengeluaran BPKAD sehingga melebihi target.

- 15). Sasaran Strategis Nomor 15 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator sasaran Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut capaian kerjanya melebihi target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah penilaian LAKIP Tahun 2017 sebesar 100,92% dan tahun 2019 adalah penilaian LAKIP Tahun 2018 adalah sebesar 113,61%, sedangkan Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2020 adalah penilaian LAKIP Tahun 2019 sebesar 131,98%, sedangkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 adalah penilaian LAKIP Tahun 2020 sebesar 130,75% mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 1,23%. Sedangkan untuk mendukung sasaran strategis nomor 15 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 .Pada tahun 2021 telah dilaksanakan Reviu SAKIP Tahun 2020 BPKAD Kabupaten Tanah Laut terhadap 9 dokumen SAKIP BPKAD

Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dan telah mendapatkan Nilai A (88,91) dari target nilai 68 atau dengan capaian kinerja sebesar 130,75%.

Telah dilaksanakan penyusunan dokumen SKM SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 1 dokumen yaitu (Dokumen SKM Thn 2021), telah terealisasi dengan SK Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Hasil SKM BPKAD Tanah Laut Nomor : 800/ 17 /BPKAD/2021 tanggal 29 Juni 2021.

Sehingga dengan demikian pernyataan sasaran strategis nomor 13 dan pernyataan sasaran strategis nomor 15 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut yang dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan telah terpenuhi 100%.

- 16).Pejabat struktural Eselon IV setiap triwulan telah membuat Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021 yang menjadi tanggungjawabnya sebagai langkah Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsungnya sebagai bukti telah dilakukan pengawasan internal dari Atasan Langsung kepada Pejabat Struktural dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut terhadap kinerja kegiatan-kegiatan di Bidangny masing-masing sebagai bahan acuan pedoman untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Berhasilnya pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentunya sangat ditunjang oleh kualitas sumber daya aparatur, sumber dana serta dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait. Selain itu, masih terdapatnya kelemahan-kelemahan seperti terbatasnya tenaga profesional serta pelaksanaan tugas pada BPKAD sangat tergantung dari input SKPD lainnya sehingga diperlukan kerjasama yang baik dan harmonis dengan SKPD dalam mengelola keuangan dan aset daerah.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi persoalan tersebut diantaranya dengan berupaya secara bertahap terus meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin SDM aparatur pada BPKAD serta peningkatan sarana dan

prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas. Serta upaya untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja baik pada waktu tahun berjalan maupun setelah akhir tahun sebagai pedoman dalam melakukan langkah-langkah perbaikan, salah satunya dengan memberikan reward dan penghargaan kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pengurus Barang terbaik setiap tahunnya. Selain itu diperlukan peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta kerjasama dengan institusi lain.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan dan pencapaian kinerja SKPD khususnya bagi BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2022

Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

NIP. 19661227 198703 1 002